

EDISI 77 • JUNI 2024/Th. VII

• MOESLIMCHOICE.COM • MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM CHOICE

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

HAJI FURODA MEMANG BEDA

HAMDALAH
'ALA SALAMAH
JAMA'AH HAJI
INDONESIA

TAMBANG
MINERBA UNTUK
ORMAS
KEUMATAN

RANGKAIAN AKHIR
AGUS FATONI
SEBAGAI
PJ GUBERNUR

MANFAAT
SEHAT MAWAR
DAN KEMBANG
SEPATU

MENUMBANGKAN
JUDI
ONLINE

MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTUR

Irmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie

REDAKTUR BISNIS

.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin

REPORTER

Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir

KEPALA BIRO SUMSEL

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

DZULHIJJAH

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Akhir 1445 dalam kalender hijriyah telah tiba. Dzulhijjah, bulan ke-12 atau terakhir, beriringan dengan pertengahan 2024 pada kalender masehi atau gregorian.

Dzulhijjah berasal dari dua kata: dzu yang berarti pemilik dan al hijjah, haji. Begitu lah umat Islam memaknai Dzulhijjah dengan kilas balik ibadah haji sejak Abul Anbiya (Bapak para Nabi) Ibrahim alaihi salam melaksanakannya. Serangkai dengan perintah mengurbankan anaknya dari Siti Hajar, Ismail alaihi salam yang akhirnya menjadi ritual mengurbankan hewan.

Maka kita mengenal ritual ibadah haji sebagai salah satu rukun, pilar atau tiang penyangga eksistensi Islam. Ibadah haji yang serangkai dengan ritual kurban menjadi pilar kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa Ramadan.

Sama seperti tradisi yang telah berlangsung selama 15 abad itu, puncak ibadah haji di Tanah Suci Makkah Al Mukarramah berlangsung pada 8-10 Dzulhijjah dengan wuquf (berhenti) sejenis di Padang Arafah untuk merenungkan eksistensi sebagai manusia di dunia sejak Adam dan Hawa melanggar ketentuan kehidupan surga.

Nah, pada Dzulhijjah 1445 H, patut pula renungan eksistensi kita sebagai manusia secara perorangan (individu), maupun sebagai anggota keluarga, lingkungan yang lebih luas, maupun sebagai warga dunia mengemuka. Untuk urutan terakhir tadi, sebagai warga dunia, situasi dan kondisi geopolitik global memang sedang mengalami ketegangan di sana-sini.

Serangan Israel di Rafah, Jalur Gaza, Palestina, juga Perang Rusia-Ukraina yang belum usai, akan berimplikasi pada ketegangan geopolitik dan ekonomi global. Dampaknya, positif maupun negatif, pada saatnya akan sampai ke tingkat perorangan: Apakah kelesuan ekonomi, kenaikan harga barang dan jasa, juga kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang semakin melebar. Tambahan pula, perubahan iklim yang dampaknya kian terasa menyulitkan.

Maka, pada Dzulhijjah 1445, kita layak saling mengingatkan dengan ayat ke-41 Surat ke-30 (Ar-Rum). Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Semoga usai Dzulhijjah 1445 kita semua kembali ke jalur yang benar (on the right track) sebagaimana maksud kerasulan Muhammad SAW: Rahmatan lil 'alamin. ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06

LAPORAN UTAMA

Usai sudah penyelenggaraan ibadah haji 2024. Berlanjut dengan kepulangan jamaah haji Indonesia secara berangsur-angsur menurut kelompok terbangnya. Hamdalah ala salamah, selamat datang kembali ke Tanah Air, semoga semua menjadi haji mabrur.

20

EKONOMI SYARIAH

Badan usaha milik organisasi masyarakat bidang keagamaan mendapat penawaran prioritas untuk berbisnis tambang mineral dan batu bara.

24

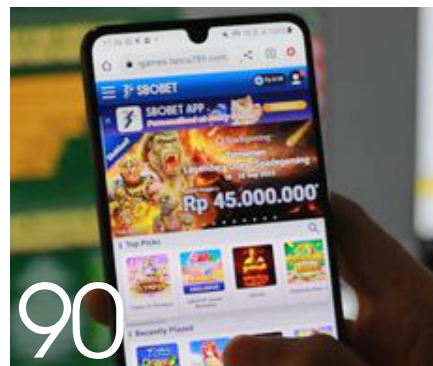
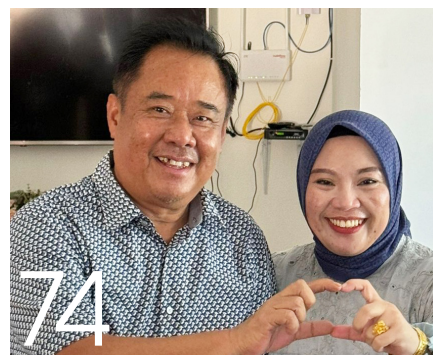
SUMSEL SYARIAH

Hari Raya Idul Adha 1445 H menjadi pertama kalinya bagi Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melaksanakan Shalat Id bersama masyarakat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin.

44

BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman mengenai program cetak sawah rakyat.



60

MUBA BERSINERGI

Guna mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang damai dan tanpa konflik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar peluncuran pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muba tahun 2024. Peluncuran Pilkada Damai berlangsung di Stable Berkuda Sekayu.

74

PILKADA SUMSEL

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai hangat. Karena 17 kabupaten-kota di Provinsi Sumsel, semuanya menggelar Pilkada Kabupaten/Kota 2024, yang nama para kandidat calon bupati (cabup) dan calon wali kota (cawako) telah bermunculan.

88

LAPORAN KHUSUS

Satgas Pemberantasan Judi dalam Jaringan sudah terbentuk. Semoga darurat judi online bisa berubah ke tingkat yang dapat terkendali.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 36 | WISATA HALAL
- 56 | PARLEMEN
- 64 | KAJIAN
- 66 | PROFIL
- 68 | MUALAF
- 72 | KESEHATAN
- 78 | RESENSI
- 80 | INSPIRATIF
- 82 | KOLOM 1
- 84 | PILKADA
- 98 | KOLOM 2

40

KEMENAG

Sebanyak 34 jamaah dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap aparat keamanan (Apkam) Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa non haji, akhirnya pulang ke Tanah Air. Sementara tiga orang lainnya masih akan diproses secara hukum.



HAMDALAH 'ALA SALAMAH JAMAAH HAJI INDONESIA

Usai sudah penyelenggaraan ibadah haji 2024. Berlanjut dengan kepulangan jamaah haji Indonesia secara berangsur-angsur menurut kelompok terbangnya. Hamdalah ala salamah, selamat datang kembali ke Tanah Air, semoga semua menjadi haji mabrur.



Gelombang pertama jamaah Indonesia mulai kembali ke Tanah Air secara bertahap pada 22 Juni 2024. Sebagian akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah al muna-waroh..

"Alhamdulillah puncak haji sudah usai. Hari ini kita mulai memberangkatkan jamaah dari Makkah untuk kembali ke Tanah Air," kata Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat di Makkah, Arab Saudi, Jumat, 21 Juni 2024.

Arsad mengatakan ada perbedaan skema kepulangan jamaah gelombang 1 di tahun ini. Sebanyak 49 kelompok terbang (kloter) gelombang I akan dipulangkan

sebelum wukuf.

"Bahkan untuk penimbangan barang bagasi yang biasa dilakukan sekitar 48 jam sebelum keberangkatan, untuk SOC 2 karena masuk kategori keberangkatan awal itu ditimbang sebelum pelaksanaan wukuf," kata dia.

Sedangkan Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Machzumi menjelaskan hari ini direncanakan ada enam kloter gelombang pertama yang akan tiba di Madinah untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Air. "Mereka akan transit satu malam, lalu 22 Juni 2024 diberangkatkan ke Indonesia," kata Ali.

Kabar baik yang menyertai kepulangan jamaah haji pun datang dari Menteri

Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

"Malam ini saya menghadiri Haflul Haji Al-Khitamy semacam malam tasyakuran atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji 'Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M," terang Menag Yaquut, di kantor Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkah, Selasa, 18 Juni 2024.

Gus Yaquut pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji Saudi yang mengumumkan kuota lebih awal. "Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji



melalui Bandara AMAA Madinah.

Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, seluruh jamaah haji gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara jamaah gelombang kedua melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Tahun ini, tidak semua jamaah gelombang I dipulangkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ada 49 kloter yang akan dipulangkan melalui Madinah. Termasuk SOC 02 yang kita antar pagi ini," kata Arsad.

Arsad menyampaikan SOC 02 termasuk jamaah kloter awal yang segera dipulangkan usai wukuf. Penimbangan koper pun telah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan

Agama Yaquut Cholil Qoumas. Gus Men mengemukakan, Indonesia mendapat kuota 221.000 jamaah pada penyelenggaraan haji 1446 hijriyah pada 2025

Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menag usai menghadiri Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan Pemberian Kuota 1446 H. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

Ikut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri

juga bisa dilakukan lebih cepat," ujarnya.

Selain itu, Gus Men menilai positif ketegasan Kerajaan Saudi soal penerapan visa yang lebih ketat. "Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji," ucapnya.

Dari pihak shohibul bait, tuan rumah, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam dua tahun terakhir menggelar Haflul Haji Al-Khitamy (pertemuan akhir penyelenggaraan haji). Acara ini terjadwal berlangsung pada 12 Zulhijjah, hari saat jamaah haji yang mengambil Nafar Awal telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel di Makkah. Acara ini mengambil tema yang sama "Khitaamuhu Misk" (Aroma Kesturi Surga).

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah dalam sambutannya mengatakan kesuksesan haji berdasarkan hasil kerja sama Kantor Urusan Haji (KUH) dari berbagai negara dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Menurutnya, pada hari yang sama setahun yang lalu, sejarah mencatat untuk kali pertama kuota diberikan setelah operasional haji. Sehingga, langkah persiapan menjadi lebih cepat, visa bisa diterbitkan jauh sebelum operasional.

Penerapan Kartu Nusuk, kata Menhaj Tawfiq, juga berjalan sukses. Dengan kartu ini, bisa dibedakan antara jamaah haji resmi dan tidak resmi. Para konsul haji pada KUH juga diberikan kemudahan akses Masyair dengan kartu khusus untuk memantau

kedatangan berjalan lancar. Kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 jamaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup. "Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji," sebut Menag.

Kedua, proses pelayanan jamaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. Jamaah bisa mendapatkan layanan catering, transportasi, akomodasi, termasuk perlindungan jamaah, dan bimbingan ibadah.

"Padahal, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah," ujar Menag.

Selanjutnya, layanan fast track yang mu-

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

"Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jamaah bisa diberangkatkan lebih awal, jam 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri," kata Gus Men.

Toh Gus Men mengakui ada masalah di Mina sebagai bagian yang akan dievaluasi. Menurut dia, wilayah Mina jelas batasan-nya dan sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 jamaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tam-



pergerakan dan kondisi jamaah.

Menhaj Tawfiq berharap kerja sama lintas pihak ini terus berlangsung di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Menteri Tawfiq juga mengumumkan bahwa masa umrah segera dimulai dengan penerbitan visa umrah.

Usai Haflul Hajj Al Khitamy, Gus Men mengemukakan, penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Untuk jamaah Indonesia, ia mengemukakan sejumlah indikator kesuksesannya.

Pertama, pelayanan jamaah pada fase

lai meluas dari satu ke tiga embarkasi. "Layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar," lanjutnya.

Bagaimana dengan layanan untuk jamaah setelah tiba di Saudi? "Layanan catering, bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji. Ini juga kali pertama dilakukan dalam kuota normal, setelah sebelumnya diterapkan pada 2022," ucapnya lagi.

Indikator kesuksesan ketiga, lanjut Gus Men, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas

bahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," kata Gus Men.

Dalam keterbatasan ruang, sambung-nya, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. "Ini yang perlu menjadi pertimbangan," lanjutnya.

Namun, Gus Men menegaskan, secara keseluruhan, penyelenggaraan haji 1446 hijriyah pada 2024 tuntas dengan baik. "Alhamdulillah kita bersyukur, proses puncak haji berjalan lancar," katanya lagi.

Selanjutnya Gus Men mengemukakan, Kemenag akan segera menggelar evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini.

Sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang.

"Kita tetap akan upayakan kuota tambahan dalam jumlah yang terukur untuk tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan jamaah," tegasnya.

Keselamatan dan kenyamanan jamaah idealnya hingga sampai di rumah. Dalam hal ini Kementerian Agama meminta maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines bisa memegang komitmennya dan berharap tidak ada keterlambatan penerbangan pada fase kepulangan jamaah haji ke Indonesia.

"Mudah-mudahan dari maskapai yang melayani kita tidak ada kelambatan, bisa sesuai schedule," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemen-

dan Madinah. Sistem sewa hotel di Madinah berdasarkan jumlah hari atau blocking time. Sementara di Makkah full musim atau sewa penuh selama pelaksanaan musim haji.

"Dampak hotel (di Madinah) itu kalau terlambat jadwal (penerbangan)-nya, berganti jadwal, itu kan hotel harus diisi lagi oleh jamaah yang lain. Kalau di Makkah, itu semua jamaah dapat hotel sampai akhir musim haji," kata dia.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan memastikan seluruh proses kepulangan jamaah haji Indonesia dapat berjalan lancar, aman dan selamat.

"Kemenhub siap mendukung kepulangan jamaah haji, baik dari sisi kesiapan sarana dan prasarana bandara debarkasi

terhadap Pusat Data Nasional yang terdeteksi pada Kamis, 20 Juni 2024. Dampaknya, layanan imigrasi dalam jaringan internet (online) non-aktif.

Perkembangan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan sebagian layanan keimigrasian mulai kembali beroperasi. Pemulihan berlangsung setelah adanya gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Koinfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan



terian Agama Hilman Latief di Madinah, Jumat, 21 Juni 2024.

Fase kepulangan jamaah akan dimulai pada 22 Juni sampai 3 Juli 2024. Hilman mengatakan keterlambatan penerbangan akan berdampak pada berbagai layanan, seperti akomodasi, konsumsi, hingga transportasi. Di samping itu, jamaah juga akan kelelahan.

"Karena itu komitmen dan kesiapan maskapai-lah yang juga akan membantu menyelesaikan situasi ini," ujar dia.

Khusus untuk hotel, Hilman menyoroti perbedaan sistem sewa antara di Makkah



maupun kesiapan armada pesawat udara," kata Direktur Angkutan Udara DJPU Kemenhub Putu Eka Cahyadi.

Putu menyampaikan bahwa pihaknya juga akan memastikan kesiapan armada pesawat udara yang digunakan baik Saudia Airlines (SV) maupun Garuda Indonesia (GA) serta meningkatkan pengawasan pemenuhan dalam aspek safety, security, dan services bagi kepulangan jamaah haji.

Yang perlu diantisipasi juga adalah pemulihan layanan imigrasi di bandara kedatangan mengingat dampak gangguan

resmi, Sabtu, 22 Juni 2024.

Semuel menuturkan layanan Imigrasi melalui autogate di Bandara Soekarno-Hatta juga telah kembali beroperasi secara bertahap, meskipun layanan autogate di bandara lain masih dalam proses pemulihan. Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual juga masih dilakukan.

Kita berdoa, dan sama-sama berusaha, semoga tak ada rintangan berarti dalam proses kepulangan jamaah haji kali ini. Hamdalah 'ala salamah. ♦

SOAL KUOTA HAJI REGULER JADI FURODA

Kabar pengalihan kuota haji dari Kerajaan Saudi untuk jamaah Indonesia menjadi isu mencuat dalam rangkaian penyelenggaraan kali ini. Benarkah terjadi pengalihan kuota haji reguler ke haji furoda?

Memang sedikit keluhan soal layanan jamaah haji pada penyelenggaraan kali ini. Mulai dari pemberangkatan, layanan katering dan akomodasi serta kesehatan, ritual ibadah, hingga kepulangan, tak terlalu bising.

Cara termudah mengidentifikasinya adalah dengan melihat perbandingan jumlah jamaah wafat pada penyelenggaraan tahun ini dengan angka tahun sebelumnya. Nah, perbandingan hingga hari ke-41 operasional haji, pada 2023 jamaah yang wafat di Tanah Suci mencapai 374 orang. Sedangkan pada kurun waktu yang sama pada 2024, jamaah haji wafat berjumlah 224 orang.

Dengan perbandingan itu, tercermin layanan jamaah haji kali ini insya Allah lebih baik dari penyelenggaraan pada 2023.

Kesaksian dari jamaah haji yang tergolong tokoh penting, very important person (VIP) juga demikian.

Untuk jamaah kaum hawa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama suaminya, Tonny Sumartono, yang berhaji memenuhi undangan Raja Salman dapat menjadi kesaksian penting. Di sela kegiatan ritual haji, Bu Menkeu sempat menghadiri undangan dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman Al Saud.

Momen itu dibagikan langsung oleh bendahara negara di Instagramnya @smindrawati. Sri Mulyani dan tamu haji lainnya dijamu di Royal Court Mina.

"Alhamdulillah, menghadiri undangan dari Custodian Two Holy Mosques Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Crown

Prince dan Perdana Menteri Mohammad bin Salman resepsi delegasi tamu haji di Royal Court Mina," tulis Sri Mulyani, Selasa, 18 Juni 2024

Di acara itu Bu Menkeu mendengarkan laporan dari Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi Arabia Tawfiq-Al Rabiah tentang penyelenggaraan Haji 1445 H. Sri Mulyani terkagum dengan manajemen ibadah haji yang disebutnya sangat kompleks.

"Mendengarkan laporan Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi Arabia Tawfiq-Al Rabiah tentang penyelenggaraan Haji 1445 H yang telah berjalan aman dan damai serta berbagai reform pembaharuan perbaikan manajemen Haji yang sungguh luar biasa kompleks. Subhanallah," sebutnya.

"Semoga ibadah haji seluruh tamu Allah SWT diterima serta mabrur/mabrurroh



dan segala dosa diampuni Allah SWT. Aamiin YRA," tambah dia.

Sedangkan untuk kaum Adam, kesaksian figur VIP yang dapat menjadi contoh adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas. Figur berlatar Muhammadiyah yang menjadi Naib Amirul Haji (Wakil Ketua Rombongan Haji) Indonesia menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada sebelumnya.

"Saya melihat dan juga setelah saya bertanya ke berbagai pihak, juga kepada jamaah mereka berkesimpulan ya, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," katanya di Makkah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024.

Secara khusus, ia mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI-Polri. Menurut dia, kesuksesan ini bukan atas nama Kementerian Agama semata, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat.

Bahkan ia mengaku tidak akan sanggup dalam mengurus ekosistem penyelenggaraan haji, karena banyak indikator yang mesti dipenuhi dan dipersiapkan. "Kalau saya yang jadi Menteri Agama

enggak sanggup saya, maaf saja ya. Memang enggak sanggup saya mengikuti, jadi Dirjen Haji pun juga enggak sanggup saya, terus terang ya," katanya.

"Kenapa? Karena mereka itu gak tahu saya kapan tidurnya gitu ya. Saya makan, mencari makanan subuh-subuh, menjel-



Saya melihat dan juga setelah saya bertanya ke berbagai pihak, juga kepada jamaah mereka berkesimpulan ya, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

ang subuh ini. Mereka rapat, coba bayangin," tambah Anwar Abbas.

Buya Anwar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras para petugas haji sehingga penyelenggaraan haji bisa berjalan baik. Ia tidak mem-

bayangkan fisik para petugas haji yang seperti tidak kenal lelah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai 24 jam.

"Kesimpulan saya ya, kalau fisik mereka itu enggak kuat ya repot juga bisa am-buradul. Jadi, saya terus terang berterima kasih kepada mereka," kata dia.

Kemudian soal petugas haji, Anwar Abbas juga mengungkapkan penghar-gaannya. Para petugas cukup cekatan membantu para jamaah. Anwar pun sempat menceritakan pengalaman pribadinya saat beribadah kemudian kelelahan di Makkah.

"Cekatan menurut saya. Dan saya punya pengalaman juga di Mina ketika kaki saya sudah merasa berat sekali itu ada seorang tentara dari Kostrad, itu jalan sendiri jauh. Tapi menunjukkan jalan pintas, yang lebih dekat," ujar Anwar.

Toh Kendati demikian, Anwar mengatakan ketika ada kritik atau masukan dari berbagai pihak jangan dianggap angin lalu. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan harus menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.

"Menurut saya sah-sah saja (mengkritik) dan Kementerian Agama tidak usah panas kupingnya mendengar kritik. Tapi yang jelas Kementerian Agama harus bisa





mendengarkan dan kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat serta berupaya untuk bergerak ke arah kesempurnaan,” katanya.

Nah, poin terakhir Buya Anwar mengenai kritik itu memang terasa. Antara lain yang datang dari Tim Pengawas Haji DPR.

Tahun ini, DPR memberangkatkan 40 anggota Timwas Haji 2024 dengan rincian dua orang pimpinan DPR, 28 anggota Timwas Haji dari Komisi VIII, dan 10 anggota Timwas Haji dari Komisi/badan

terkait. Timwas DPR diketuai Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR, berangkat dalam dua tahap, tahap I pada 6 Juni dan tahap II pada 9 Juni 2024.

Sejak awal, Timwas sudah menyoroti penambahan kuota haji Indonesia menjadi 241 ribu sebagai tantangan bagi penyelenggara haji 2024. “Yang kedua, jumlah tambahan kuota baru yang diberikan oleh Saudi sejumlah 20 ribu jamaah baru ini hendaknya digunakan dengan amat sangat sungguh-sungguh, tidak ada per-

mainan, sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jamaah-jamaah yang sudah mengantre begitu lama. Di satu sisi pelayanannya tetap optimal dan memberi keamanan dan kenyamanan para jamaah,” kata Gus Muhaimin.

Begitulah, dalam perkembangan selanjutnya, Gus Muhaimin menyebutkan, ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil. Kecurigaan itu terkait distribusi kuota untuk antrean haji reguler yang digunakan travel-travel tertentu berbasis haji khusus atau yang dikenal sebagai haji furoda (mandiri).

Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyoroti berbagai masalah terkait penyelenggaraan haji 2024 agar segera ditindaklanjuti. Dia mengungkapkan pula, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, catering, dan tenda bagi jamaah.

“Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus),” katanya di Mekkah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024.

Gus Muhaimin mengatakan, beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan tiap





tahun yang kemudian lenyap ketika evaluasi atau tidak ditindaklanjuti. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," ujarnya dalam siaran pers.

Ia mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin Anggota DPR RI Lodewijk Friedrich Paulus bersama Kemenag untuk membentuk pansus. "Saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Lodewijk beserta Kemenag menyepakati pembentukan pansus agar detailing dari seluruh kasus yang ada di proses haji bisa dipotret lebih dalam," katanya.

Menurut dia, pansus tersebut akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Namun, kecurigaan yang disebut oleh Gus Muhaimin itu dibantah oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya," kata Menag di Madinah, Arab Saudi, Jumat, 21 Juni 2024.

Ia menjelaskan kuota haji Indonesia tahun ini 241 ribu jamaah. Rinciannya, kuota reguler sebanyak 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus. Lalu 20 ribu kuota tambahan dibagi masing-masing 10

ribu untuk jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus.

Soal alokasi kuota tambahan menjadi 10 ribu untuk jamaah furoda atau khusus itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Gus Men di DPR dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII pada Rabu, 13 Maret 2024. Semula, dalam rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), komposisi tambahan kuota ialah 92 persen atau 18.400 untuk jamaah reguler dan delapan persen atau 1.600 untuk haji khusus.

Dengan komposisi 92:8 persen, besaran kuota haji reguler 2024 sebanyak 221.720 jamaah dan haji khusus 19.280 jamaah. Namun komposisi tersebut berubah dengan beberapa alasan.

"Besaran kuota tambahan telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejumlah 20 ribu jamaah dengan distribusi alokasi kuota sebesar 10 ribu untuk jamaah haji reguler atau 50 persen dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus 50 persen," ujar Yaqut dalam rapat.

Dengan begitu, besaran kuota haji pada 1445 H, 2024 Masehi pun mengalami perubahan. "Berubah menjadi 213.320 jamaah reguler dan 27.680 jamaah haji khusus," sambungnya.

Adapun komposisi itu mempertim-

bangkan keselamatan jamaah haji. Gus Men menyebutkan kapasitas asrama untuk menampung juga belum memadai jika diberatkan ke jamaah haji reguler.

"Penyesuaian komposisi kuota tambahan jadi 50 persen banding 50 persen dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan jamaah haji, antara lain daya tampung asrama embarkasi kapasitas belum memadai untuk menampung jumlah jamaah yang cukup besar setiap harinya," ujar Yaqut.

Dia mengatakan daya tampung di Asrama Haji Bekasi sekalipun hanya mampu menampung 1.782 tempat tidur atau maksimal empat kloter per hari. Overkapasitas itulah yang juga menjadi perhatian pihak Kemenag.

"Apabila kuota haji reguler bertambah cukup besar akan menambah jumlah kloter setiap harinya sehingga berpotensi kesulitan dalam sirkulasi keluar masuk jamaah haji di Asrama Haji akibat kelebihan kapasitas," ungkapnya.

Alhasil, jika masih ada kecurigaan penyimpangan, yang mengkritik dan yang dikritik silakan mengajukan fakta dan data masing-masing. Apa perlu panitia untuk membentuk Tim Pencari Fakta? Dengan digitalisasi e-government, seharusnya semua data sudah tersedia. ♦



Raffi Ahmad

HAJI FURODA MEMANG BEDA

Haji furoda (mandiri) memang berbeda dengan haji reguler. Sebagai bagian dari haji khusus yang diatur oleh Undang-Undang Haji, jumlah jamaahnya memang lebih kecil dari haji reguler. Tapi, jenis jamaahnya juga khusus bagi yang waktunya tak selonggar jamaah reguler, 40 hari. Sebagai kompensasi, biaya jamaah haji furoda pasti lebih tinggi. Harap maklum jika para pesohor memilih haji furoda.

Pelaksanaan ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M telah dimulai. Dan jamaah haji Indonesia telah mulai diberangkatkan sejak 12 Mei 2024. Hal ini tentu saja menjadi momen spesial bagi sejumlah artis Tanah Air, yang memutuskan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

Di tengah kesibukan mereka sebagai seorang artis, para artis ini tetap menunjukkan komitmennya yang mendalam terhadap ibadah dan spiritualitas.

Dengan penuh antusiasme dan penuh ketulusan, para artis ini mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, Makkah.

Inilah Deretan Artis yang melaksanakan Ibadah Haji di tahun 1445 H/ 2024 M:

1. Atta Halilintar dan Istri, Aurel Hermansyah

Pasangan artis, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah awalnya merencana-

kan melaksanakan ibadah hajinya tahun depan. Namun karena visa haji furoda pasangan ini, ternyata sudah dikabulkan pada tahun 2024, maka mereka pun akhirnya berangkat. Atta dan Aurel berangkat dengan diantar ke bandara oleh keluarga serta sang putri, Ameena, pada 9 Juni 2024.

2. Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi

Kakak beradik Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi, tahun ini juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji bersama Shindy Putri. Mereka berangkat pada 12 Juni 2024.

Oki Setiana Dewi menyatakan bahwa mereka sudah lama memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, namun baru tahun ini kesempatan itu datang. Mereka juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk manasik haji.

3. Raffi Ahmad dan Keluarga

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ber-



Aurel dan Atta Halilintar

sama keluarga besarnya, termasuk Mama Amy, Mama Rieta, Syahnaz Sadiqah, Nisya Ahmad, hingga Caca Tengker.

Raffi dan Nagita juga mengajak tiga orang karyawannya untuk ikut menunaikan ibadah haji. Rombongan ini diketahui sudah berangkat sejak 7 Juni 2024 lalu.

4. Tantri Kotak dan Suami, Arda

Tantri Syalindri Ichlasari atau yang dikenal dengan nama Tantri Kotak, juga melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ia berangkat bersama suaminya, Arda Naiff.

Melalui akun Instagram pribadinya,



Aku setiap kali umrah ada aja rezekinya, pokoknya kita bisa berangkat. Kadang kita bingung, ya alhamdulillah. Kadang kita punya uang banyak aja nggak bisa berangkat. Ada yang memang orang susah banget, bisa berangkat.

Tantri membagikan kebahagiaannya bisa mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji Furoda yang ditawarkan pada Desember 2023 lalu.

5. Saipul Jamil

Pedangdut Saipul Jamil juga menjadi salah satu artis yang berangkat haji tahun ini. Ia membagikan sebuah foto dirinya di Masjidil Haram, Makkah, melalui Instagram pribadinya.

Dalam keterangan foto tersebut, Saipul Jamil memohon doa agar ibadah hajinya

diterima oleh Allah dan juga mendoakan agar para pengikutnya juga dapat menunaikan ibadah haji di masa depan.

6. Arie Untung

Artis, yang juga presenter, Arie Untung, tahun ini juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun untuk tahun ini, Arie berangkat sendiri alias tidak ditemani sang istri, Fenita.

Arie memperlihatkan momen haru saat berpamitan dengan keluarganya sebelum berangkat ke Tanah Suci.



Ria Ricis dan Oki Setiana



Tantri Kotak dan Suami, Arda

7. Wirda Mansyur

Putri ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur tahun ini juga mendapat kesempatan khusus untuk menunaikan ibadah haji sebagai tamu Raja Arab Saudi, Salman bin

Janji tersebut dibuat Fadil Jaidi pada ulang tahun ayahnya, Pak Muh, pada 2 November 2022. Awalnya, direncanakan berangkat haji pada tahun 2023, namun karena ada beberapa kendala akhirnya

memboyong 9 anggota keluarga termasuk karyawannya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini.

Sembilan orang yang diboyong Raffi Ahmad tersebut adalah sang istri, Nagita Slavina; ibunya, Amy Qanita; ibu mertuanya, Rieta Amilia; adik iparnya, Caca Tengker; dua adiknya, yaitu Nisya Ahmad dan Syahnaz Sadiqah, dan tiga karyawannya.

Tahun 2023 lalu, Raffi Ahmad batal berangkat haji, dan di tahun ini dia menebusnya dengan sekaligus mem-berangkatkan 9 anggota keluarga dan karyawannya berangkat ke Tanah Suci.



Saipul Jamil

Abdulaziz.

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Wirda dan keluarganya menggelar pengajian sebagai bentuk syukuran. Ia berharap, perjalanannya ke Tanah Suci akan berjalan lancar dan hajinya diterima oleh Allah SWT.

8. Fadil Jaidi

Niat Fadil Jaidi untuk memberangkatkan haji seluruh anggota keluarganya untuk menunaikan ibadah haji, akhirnya terpenuhi.

niat itu baru terpenuhi tahun 2024 ini.*

Raffi Ahmad Boyong 9 Anggota Keluarga dan Karyawannya Tunaikan Ibadah Haji

Artis yang dijuluki Sultan Andara, Raffi Ah- m a d

Mengutip dari unggahan Instagram Story travel @janamadinahwisata, ada 10 orang yang ikut dalam rombongan haji Raffi Ahmad yakni istrinya Nagita Slavina, ibu mereka, Amy Qanita, Rieta Amilia, kedua adik Raffi Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad, adik Nagita, Caca Tengker serta tiga orang lainnya Prio Bagja, Abrar Rafles, dan Mohamad Fahmi. Foto-foto visa mereka pun d i -



Arie Untung

unggah oleh akun tersebut.

Raffi Ahmad mengunggah video saat dirinya mengunjungi travel tersebut dengan keterangan yang berisi doa-doa dan harapan terbaik karena keinginannya untuk pergi haji akhirnya bisa terkabul.

"Bismillah.. Akhirnya..doa kita dikabulkan.. Alhamdulillah ya Allah. Terimakasih sekali @janamadinahwisata yang jadi penyambung kita, keluarga dan tim," tulis Raffi Ahmad, seperti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @raffinagita1717, Sabtu (18/5/2024).

Video tersebut juga berisi pernyataan Raffi yang menyatakan bahwa ia akan berangkat haji bersama istri, keluarga, serta karyawannya. Namun, belum diketahui kapan tanggal pasti Raffi dan rombongan berangkat ke tanah suci.

"Insya Allah bisa memberangkatkan saya beserta istri dan rombongan menuju Tanah Suci untuk ibadah haji," tambah Raffi Ahmad.

Lantas, apa sebenarnya alasan atau yang mendorong Raffi Ahmad memboyong keluarganya berangkat ibadah haji ke Tanah Suci ini?

Raffi pun mengatakan, bahwa dirinya memboyong keluarga dan orang dekatnya ke Tanah Suci tak lain karena pesan dari almarhum ayahnya, Munawar Ahmad.

"Jadi kalau almarhum Papa dulu pernah bilang, kalau memang ada rezeki yang dikasih itu keluarga dulu, kerabat dulu, baru nanti orang sekitar yang dekat-dekat," kata Raffi Ahmad, saat mengisi acara di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Minggu (9/6/2024).

Raffi Ahmad dan keluarga serta karyawannya berangkat ke Tanah Suci, Mekah pada Minggu (9/6/2024). Raffi Ahmad melaksanakan ibadah haji dengan melalui Haji Furoda yaitu program haji yang mendapatkan kuota khusus dari pemerintah Arab Saudi. Haji Furoda ini bersifat legal secara hukum dan peserta haji ini dapat langsung berangkat tanpa perlu antri.

Lantas, seberapa besar Raffi Ahmad harus menggelontorkan dana untuk biaya haji keluarganya tersebut? Tidak main-main, karena biaya yang dikeluarkan Raffi Ahmad untuk membayar haji furoda keluarga dan karyawannya itu mencapai miliaran rupiah. Bisa disebut Furoda menjadi jalur untuk berangkat haji dengan biaya paling mahal. Biaya haji furoda dikabarkan mencapai Rp300 sampai Rp 900 juta per orang.

"Aku setiap kali umrah ada aja rezekinya, pokoknya kita bisa berangkat. Kadang kita bingung, ya alhamdulillah. Kadang kita punya uang banyak aja nggak



Wirda Mansyur



Fadil Jaidi



Raffi Ahmad

bisa berangkat. Ada yang memang orang susah banget, bisa berangkat. Ada yang bergelimang harta nggak bisa berangkat. Apa pun yang penting niatnya baik," kata Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad pun tak mau sombong, apalagi angkuh. Ia mengaku selalu merasa ngeri ketika bicara soal uang.

"Ngeri lah. Rezekinya masing-masing. Beneran nih gue nggak tahu (harganya)," ujar artis 37 tahun ini.

Meski Raffi enggan membocorkan biaya hajinya, namun teman hostnya, yakni Irfan Hakim, sempat mempertanyakan soal kebenaran Raffi Ahmad yang diduga menggelontorkan uang sampai Rp 1 Miliar untuk keberangkatan haji kali ini.

"Kalau lihat angka gini ngeri ya karena mau beribadah. Sejujurnya aku nggak cari termahal, aku cari yang bisa memberangkatkan kita dengan baik saja," ucap Raffi Ahmad. ♦

UTANG

GUNAWAN EFFENDI

Utang negara menjadi bahasan di acara Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap bidang kepemudaan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Sah-sah saja jika utang negara ke pihak asing maupun dalam negeri menjadi bahasan di acara ormas pemuda.

Toh anak-anak muda itu yang pada saatnya akan berperan mengelola, jika belum sampai melunasi, utang negara yang harus dibayar. Terlebih lagi, yang mengemukakan soal utang itu adalah Kepala Negara, Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

Berkaitan dengan akhir masa jabatan Presiden, bisa saja muncul tafsir pembahasan utang negara itu semacam pertanggungjawaban atas utang di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi. Jangan lupa pula dua Wakil Presiden di masa Presiden Joko Widodo berlatar, malah memiliki kadar kental dalam relasi dengan Nahdlatul Ulama: HM Jusuf Kalla dan KH Ma'ruf Amin. Tak perlu banyak cerita tentang ini seharusnya.

Boleh jadi juga Kepala Negara ingin menjawab kritik-kritik yang beredar di media sosial maupun mainstream mengenai pembengkakan utang negara di masa 10 tahun pemerintahannya. Apapun tafsirnya, Presiden Jokowi memang membahas utang luar negeri Indonesia dalam konteks dinamika geopolitik regional dan global di acara inagurasi (pelantikan sekaligus pengukuhan) Pengurus Pusat GP Ansor masa khidmat 2024-2029 pada Senin petang, 27 Mei 2024 beriringan dengan 18 Dzulqaidah 1445.

Dalam sambutan di acara inagurasi itu, Presiden melontarkan tiga hal yang menjadi ancaman perekonomian negara dengan frasa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia. "Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini? Ada tiga. Yang pertama berkaitan dengan kurs, kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana, kuat rupiah atau kuat dolar, begitu kuat dolar, hati-hati. Ada harga-harga yang akan naik," ungkap Presiden Jokowi.

Ancaman kedua, kenaikan harga minyak mentah. Ketiga, kenaikan suku bunga pinjaman atau utang luar negeri.

Mengenai kenaikan harga minyak mentah, Presiden mengemukakan jika harga minyak mentah naik, maka semua harga produk barang dan jasa akan ikut terkerak. Jelas ini terkait dengan biaya produksi dan distribusi yang masih banyak tergantung pada bahan bakar minyak dibandingkan dengan energi alternatif. Sedangkan Indonesia kini lebih menjadi importir minyak dibandingkan dengan eksportnya, meski ladang-ladang minyak dalam negeri masih beroperasi dan ladang-ladang baru masih bisa ditemukan.

Jokowi menyebutkan pula, salah satu faktor pemicu kenaikan harga minyak mentah dunia adalah situasi di Gaza, Palestina dan perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir.

Situasi Gaza yang masih menjadi sasaran gempuran Israel berimplikasi pada keterlibatan Iran sehingga memicu pula ketegangan di banyak negara karena pasok minyak dari Iran (salah satu produsen migas terbesar di dunia) dapat terhambat dan menyebabkan harganya naik, bahkan melambung.

"Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangankan dianggap remeh, perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik, karena produksi Iran turun, semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya nggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh, Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik," kata Jokowi.

Tambahan pula perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga gandum melonjak hingga 50 persen. Sekitar 207 ton gandum gagal diekspor akibat perang yang berkontribusi atas naiknya harga mie, roti, dan pangan lain yang menggunakan bahan baku tepung terigu. Baik ekspor gandum Ukraina maupun Rusia sama-sama terhambat akibat perang kedua negara. Pada sisi lain, Rusia juga sudah membatasi pasokan migasnya ke Uni Eropa sejak 2022.

"Kelihatannya jauh banget tapi pengaruhnya bisa ke mana-mana. Itulah geopolitik kalau tidak kita cermati bisa menyebabkan harga-harga yang juga naik," sambung Jokowi.

Dua isu geopolitik itu kemudian akan berdampak pada kenaikan suku bunga utang dalam dan luar negeri dan seretnya pinjaman yang tetap diperlukan untuk pembiayaan bagi kelangsungan dan kesinambungan bangsa Indonesia di masa depan. Toh Jokowi menegaskan, posisi utang luar negeri In-



Indonesia masih aman mengingat sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membayar dan mengelola utang luar negeri sebagaimana dicerminkan oleh perbandingan utang terhadap produk domestik bruto (nilai hasil produksi barang dan jasa satu negara sepanjang setahun).

Meski begitu Indonesia patut bersyukur karena rasio utang terhadap PDB masih di angka 39 persen, lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sedangkan Undang-Undang membolehkan rasio utang terhadap PDB Indonesia hingga 60 persen.

"Karena semua negara itu memiliki pinjaman, ada yang sampai 120 persen, nggak usah saya sebutkan negara mana Bapak Ibu saya kira sudah tahu. Ada yang 130 persen yang

sio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

"Itu sebetulnya juga masih jauh dari undang-undang yang diperbolehkan, dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi saya sampaikan. Ini sekali lagi patut kita syukuri bersama," ujarnya.

Jokowi pun mengemukakan momen situasi dan kondisi ini harus diperbaiki dan ditingkatkan demi mencapai Indonesia Emas 2045. Ia berpesan agar kondisi politik dalam negeri terus dijaga agar tidak terjadi turbulensi.

"Kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik karena itu menjadi kunci pembangunan di negara mana pun. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi adalah kerusakan ekonomi kembali. Oleh sebab itu, di sini hadir ketua-ketua



dekat kita. Saya kita Bapak-Ibu juga sudah tahu," ujar Jokowi.

Yang memiliki rasio utang 120-130 persen terhadap PDB itu ada banyak, termasuk Amerika Serikat. Jika yang dekat-dekat kita, negeri tetangga bisa saja Laos dan Singapura. Apapun, tingkat kemampuan bayar dan sumber utang (dari dalam atau luar negeri) harus diperhitungkan juga.

Mengenai rasio utang terhadap PDB Indonesia, Presiden menyebutnya masih di bawah ketentuan undang-undang. Sesuai dengan UU No. 1/2003 tentang Keuangan Negara, ra-

partai, ke depan sekali lagi stabilitas politik itu penting sekali," tandas Jokowi.

Sangat relevan Presiden Jokowi membahas utang di acara inaugurasi PP GP Ansor itu. Ranah wacananya berada dalam konteks ekonomi politik Indonesia masa kini dan masa depan sebagaimana tema inaugurasi: "Menuju Ansor Masa Depan".

Jadi, untuk sahabat H Addin Jauharuddin, Ketua Umum PP GP Ansor 2024-2029, selamat mengemban amanah. Banyak yang akan kebersamaan kita menghadapi utang-utang itu. ♦



TAMBANG MINERBA UNTUK ORMAS KEUMATAN

Badan usaha milik organisasi masyarakat bidang keagamaan mendapat penawaran prioritas untuk berbisnis tambang mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2024 menjadi landasan hukumnya.

Masih akan muncul banyak pertanyaan terkait PP No 25 Tahun 2024 yang dutandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada Kamis, 30 Mei 2024 itu. Malah bukan sekadar pertanyaan, melainkan juga penentangan, di samping apresiasi terhadap aturan baru ini.

Tapi, sebagai landasan hukum, PP No 25 Tahun 2024 ini merupakan revisi dari PP No 96 Tahun 2021. Judul PP itu pun jelas menunjukkannya: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Beberapa pasal yang direvisi antara lain Pasal 22 yang mengatur persyaratan

calon peserta lelang (Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batubara. Selanjutnya Pasal 54 yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi.

Terjadi revisi pula pada Pasal 56 yang mengatur kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Juga beberapa pasal lainnya yang diubah sebagaimana diatur dalam PP ini.

Selain itu, PP ini juga menambah beberapa ketentuan antara lain Pasal 83A yang menyebutkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi

kemasyarakatan keagamaan. Nah, tambahan Pasal 83A inilah yang terkait langsung dengan ormas keumatan.

Dalam Bagian Kedua BAB VI aturan lama ditambahkan satu paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas

Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A terdiri dari tujuh ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilaku-



kan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

- (2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.
- (3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
- (4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha mayoritas dan menjadi pengendali.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.
- (6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Nah, ayat 7 itu pun menyisakan pertanyaan, apakah Presiden Joko Widodo yang

menjabat hingga 20 Oktober 2024 atau Presiden terpilih yang terjadwal dilantik pada tanggal yang sama, Prabowo Subianto. Pada saatnya memang akan diketahui pula yang menerbitkan Perpres terkait.

Sedangkan Penjelasan pada Angka 8, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari PP No 25 Tahun 2024 ini, memuat keterangan yang berbunyi:

Pasal 83A

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melaksanakan

penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Selain itu, implementasi kewenangan Pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan keagamaan" adalah organ-

isasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.

Toh sejumlah media online segera saja memuat daftar ormas keagamaan dengan mengutip data Kementerian Agama yang memuat Ormas Keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Khonghucu. Meski begitu, yang layak ditegaskan terkait PP No 25 Tahun 2024 adalah bukan ormas keagamaannya, melainkan badan usaha yang berada di bawah naungan ormas-ormas itu.

Jadi, entitas bisnisnya, bukan ormasnya. Entitas bisnis di bawah ormas keagamaan itu seharusnya yang menjadi pelaku usaha bisnis pertambangan, termasuk urusan transportasinya sebagai contoh.

Lagi pula, setelah Perpres ditandatangani oleh Presiden, masih perlu aturan-aturan penunjang lainnya, katakanlah keputusan Menteri ESDM, juga ketentuan teknis yang lebih rinci misalnya dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. belum lagi koordinasi dengan pemerintah daerah di lokasi masing-masing. Ringkasnya, masih perlu waktu untuk menindaklanjuti PP ini hingga eksekusinya efektif di lapangan.

Namun, secara berani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan

segera menerbitkan segera Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua," kata Bahlil saat mengisi kuliah umum kepada Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Universitas Islam As Syafi'iyah, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 31 Mei 2024 yang juga tayang di saluran media sosial YouTube Kementerian Investasi.

Bahlil menyebut, pemerintah berencana memberikan konsesi tambang batu bara yang cadangannya cukup besar kepada NU. "Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi

Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju tidak? Kalau ada yang tidak setuju mau kau apain dia?" kata Menteri Bahlil.

Rencana pemberian konsesi tambang batu bara pada PBNU juga diklaim sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," beber Bahlil.

Menurut Bahlil, karena PBNU tidak berpengalaman dalam urusan tambang batu bara, pengelolaan bisa diserahkan ke pihak lain. Dia bilang, banyak perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya dikelola sendiri melainkan dibantu kontraktor. Demikian juga dengan ormas yang tentu akan mencari partner lain untuk mengelola IUP.

"Dikelola secara profesional, dicari partner yang baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa organisasi keagamaan itu enggak punya spesialisasi untuk mengelola itu, memang perusahaan-perusahaan yang punya IUP itu

mengelola sendiri?" ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, pada 29 April 2024.

Dia juga beralasan, para ormas keagamaan memiliki jasa dalam memerdekakan bangsa Indonesia sehingga sudah selayaknya mereka diberikan IUP untuk mengelola usaha pertambangan. "Di saat Indonesia belum merdeka, memang siapa yang merdekakan bangsa ini? Di saat agresi militer tahun 48 yang membuat fatwa jihad memang siapa? Konglomerat? Perusahaan?" ucapny.

"Kita koq malah enggak senang ya kalau negara hadir untuk membantu mereka? Tapi kok ada yang senang kalau investor yang kita kasih terus," ujarnya.

Tak lupa Bahlil mengaku memiliki kedekatan dengan organisasi yang kini dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf tersebut, lantaran ibunya merupakan seorang kader NU. "Saya merasa saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU," imbuh Bahlil.

Toh Bahlil adalah anggota kabinet yang berasal dari Partai Golkar. Bagaimana tanggapan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan hak keistimewaan (privilege)

yang diberikan pemerintah. "Ya itu mendapat privilege salah satunya untuk ke aset pertambangan tapi itu silakan saja," kata Airlangga kepada awak media di Pondok Pesantren Mama Bakry Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Barat Sabtu, 1 Juni 2024.

Terkait pertanyaan prioritas ormas keagamaan yang akan terlebih dahulu mendapatkan izin untuk mengelola tambang. Airlangga menyebut, prioritas izin akan diatur pemerintah lebih lanjut. "Ya pemerintah memberikan prioritas nanti," bebernya.

Sedangkan terkait potensi konflik yang timbul antara ormas keagamaan dan masyarakat adat dalam mengelola tambang. Airlangga menyebut, izin mengelola tambang akan diberikan pada ormas keagamaan tertentu. "Ya ini kan diberikan kepada organisasi masyarakat khusus ya yang sudah," tegasnya.

Soal konflik horisontal itu memang sempat menjadi kekhawatiran para pemerhati eksplorasi tambang minerba di Indonesia. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman, misalnya, mengemukakan kebijakan ini dapat memicu konflik horisontal antara ormas keagamaan dan masyarakat adat.

Alasannya, sejauh ini banyak kelompok masyarakat adat sudah berkonflik dengan tambang dan proyek investasi. Mereka berhadapan dengan perusahaan dan aparat untuk mempertahankan tanah yang telah lama mereka diami yang tumpang tindih dengan izin konsesi tambang.

Terlebih lagi, catatan Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) pernah mengungkapkan terdapat 32 konflik agraria akibat tambang sepanjang 2023. Dampaknya mencakup lebih dari 48.000 keluarga di 57 desa. Nah, saat ormas keagamaan masuk ke dalam pusaran itu, Arman khawatir akan timbul konflik horisontal.

"Ini bisa menjadi konflik SARA malah. Misalnya ketika satu kelompok adat terdiri dari kelompok agama tertentu, kemudian dimasuki oleh ormas keagamaan dari kelompok agama lainnya, itu isunya berpotensi dipelintir ke mana-mana," ungkap Arman.

Sedangkan Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menyangsikan tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan

masyarakat ialah bahasa umum yang kerap ada di setiap regulasi. Namun, implementasinya kerap kali berjalan tak searah.

Kekayaan sumber daya mineral Indonesia sudah seharusnya dikelola secara baik, profesional, dan benar-benar berorientasi kemasalahatan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. "Bagaimana bisa membandingkan badan usaha milik ormas keagamaan dengan perusahaan tambang yang sejak lama memang memiliki kompetensi di bidang itu? Yang dikhawatirkan, ujungnya beralih atau dijual ke perusahaan lain dan menjadi efek bola salju. Ini akan buruk bagi iklim usaha pertambangan di Indonesia," ujar Ferdy.

Menurut dia, PP itu berpotensi mencederai tata kelola pertambangan yang idealnya dibangun secara profesional. Jika tidak, tata kelola itu cedera oleh politik akomodatif dan balas budi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat, PP No 25/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Sebab, dalam UU disebutkan pengembalian wilayah (relinquishment) PKP2B diprioritaskan untuk dilelang kepada BUMN dan BUMD. Apabila BUMN dan BUMD tak berminat, baru dilelang ke swasta.

"Ormas ini termasuk ke dalam golongan swasta yang harus memenuhi semua persyaratan. Tidak bisa langsung diberikan. Dalam proses lelang itu ada hak negara berupa PNB (penerimaan negara bukan pajak) dari Kompensasi Data dan Informasi (KDI). Kalau tidak dilelang, ada potensi kerugian negara. PP ini juga bisa menjadi polemik serta ada kemungkinan diajukan judicial review oleh masyarakat," ujarnya.

Boleh jadi, karena itu sejumlah tokoh organisasi keumatan berhati-hati menanggapi keluarnya PP No 25 Tahun 2024 itu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, misalnya, menyatakan selama ini belum ada pembicaraan dan penawaran kepada Muhammadiyah terkait pengelolaan lahan tambang tersebut. "Itu wewenang pemerintah. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan dan penawaran untuk Muhammadiyah," kata Mu'ti, Sabtu, 1 Juni 2024.

Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin menilai rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan merupakan ide yang baik. Toh Addin menegaskan sejauh ini GP Ansor belum mendapatkan kabar atau tawaran atas wacana pemberian IUP tersebut.

"Belum. Tapi bahwa ide itu bagus lah.

Bagus," kata Addin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024 sesuai beraudiensi dengan Presiden dalam rangka Acara Inaugurasi GP Ansor.

Addin pun mengaku siap apabila Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia atau perwakilan pemerintah ke depannya mengajak GP Ansor berdiskusi membahas rencana itu. Ia menjelaskan rencana pemberian IUP itu sebagai ide yang cukup baik

erangannya, Gomar menyebut keputusan ini jadi pertanda bahwa Jokowi selaku presiden berkomitmen untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk ikut mengelola kekayaan negara.

"Lalu yang kedua juga menunjukkan penghargaan presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Juni 2024.



lantaran ormas keagamaan menurutnya telah memiliki peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan dan pembangunan Indonesia.

"Ya Kalau diajak ngobrol ya boleh. Saya kira bahwa kan itu bagian kontribusi bersama terhadap komponen yang membangun negara ini lah, salah satunya ormas," ujarnya.

Di sisi lain Ketua umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan memiliki badan usaha yang mengelola area pertambangan. Dalam ket-

Menurut Gomar, yang perlu dijaga adalah agar ormas keagamaan itu kelak tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat. Juga menjaga agar ormas keagamaan tersebut tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

"Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab, sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya," kata dia.

Nah, pada saatnya semua akan terlihat dalam aturan penunjang PP No 25 Tahun 2024. Kemudian, tentu saja tindak lanjut serta praktiknya di lapangan. ♦



HARI RAYA IDUL ADHA 1445 HIJRIAH PJ GUBERNUR AGUS FATONI DAN ISTRI SHALAT DI MASJID AGUNG PALEMBANG

Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah menjadi pertama kalinya bagi Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr H Agus Fatoni dan Ketua TP PKK Hj Tyas Fatoni melaksanakan Shalat Id bersama masyarakat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang.

Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pj Gubernur dan Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumsel serta ketiga putra-putri mereka melaksanakan Shalat Id bersama masyarakat di Halaman Griya Agung Palembang. Segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga Shalat Id di sana juga. Usai Shalat Id, Pj Gubernur dan Pj TP PKK mengundang masyarakat halal bihalal di Griya Agung.

Pada Senin 17 Juni 2024, H Agus Fatoni didampingi Hj Tyas Fatoni menunaikan Shalat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Palembang bersama para pejabat pendamping. Tak hanya masyarakat di sekitar Masjid Agung, ribuan warga dari berbagai penjuru Kota Palembang berdatangan untuk Shalat Id sejak pagi-pagi sekali.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengajak seluruh jamaah Shalat Idul Adha ini sentiasa meneladani Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, dalam menjalankan perintah Allah SWT untuk berkorban.

Dikemukakan Agus Fatoni, pentingnya memaknai Idul Adha ini, untuk membangkitkan jiwa ikhlas dalam pengabdian diri kepada Allah yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Termasuk kerelaan untuk berkorban hewan dan segala bentuk amal jariyah yang membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat", tuturnya.

Sejalan dengan hikmah Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Idul Qurban, Agus Fatoni mengatakan bahwa hari itu merupakan momentum yang tepat bagi semua orang untuk mengasah keikhlasan. Juga,

kepedulian sosial terhadap sesama serta membangun kualitas sebagai pribadi yang sabar, tahan uji, dan tegar menghadapi cobaan kehidupan.

"Kiranya hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk mewujudkan budaya gotong royong dan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju", ajaknya.

PENEGUH NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DAN SPIRIT Keadilan

Penjabat Gubernur Agus Fatoni juga mengemukakan bahwa ibadah kurban setiap tahun dilaksanakan oleh umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Ibadah kurban ini seharusnya tak lagi dimaknai sebatas prosesi ritual, tetapi juga diletakkan dalam konteks peneguhan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit keadilan.

Idul Adha bermakna keteladanan Nabi Ibrahim AS, yang mampu mentransformasi pesan keagamaan ke aksi nyata



Kiranya hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk mewujudkan budaya gotong royong dan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju

perjuangan kemanusiaan. Peristiwa yang harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah Sang Pencipta.

"Hal ini yang harus kita teladani bersama untuk menjadi insan yang lebih baik lagi," kata Agus Fatoni.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Ir Kgs H Abdul Rozak, M.SC, menyampaikan pada Idul Adha 1445 H tahun ini, Masjid Agung Palembang mendapatkan hewan kurban sebanyak 14 ekor Sapi dan 9 ekor Kambing yang akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Agung.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan hewan kurban ini, kami akan melaksanakan penyembelihannya dengan baik, dan akan kami salurkan kepada keluarga yang berada di sekitar Masjid Agung ini", ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya

Palembang, Abdul Rozak berharap Gerakan Berkurban Serentak ini terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Menjadi satu gerakan berkelanjutan, yang hasilnya langsung dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Shalat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid



atas dilaunchingnya Gerakan Berkurban Secara Serentak Se Sumsel oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada Minggu 17/6/2024. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan bertambahnya hewan kurban yang diterima oleh Pengurus Masjid Agung Palembang.

Sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung

Agung Palembang dipimpin Imam Ustadz Kgs Adlan Maghfur, M.H., Al Hafizh. Yang bertindak sebagai Khotib adalah Ustadz Drs. Mgs. H. Ahmad Fathoni Husin Umrie, M.Si.

Turut hadir Pj. Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel. ♦

355 SAPI KURBAN DIBAGIKAN KE BERBAGAI DAERAH PJ GUBERNUR BUKA GERAKAN BERKURBAN SERENTAK SE-SUMATERA SELATAN

Ide brilian Pj Gubernur Sumatera Selatan Dr H Agus Fatoni terus membuat masyarakat di Provinsi ini terkagum-kagum. Ia himpun segala potensi dan menjadikannya gerakan masif, yang dampaknya langsung dapat dinikmati masyarakat termasuk dalam hal ibadah Kurban.

Untuk itulah pada Minggu (16/6/2024), Pj Gubernur membuka Gerakan Berkurban Serentak Se-Sumatera Selatan di Halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo Palembang.

Agus Fatoni menjelaskan bahwa saat ia menyampaikan sambutan tersebut, 355 hewan kurban sapi yang sudah terdistribusi dan diserahkan ke berbagai daerah dan masjid di Sumatera Selatan.

"Pembelian hewan-hewan kurban tersebut berasal dari anggaran Pemerintah Daerah, Gubernur, dan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," kata Pj Gubernur.

Selain di Masjid Agung SMB I Jayo Wikramo Palembang, Pj Gubernur juga menyerahkan sejumlah sapi ke masjid-masjid lainnya di Kota Palembang. Di antaranya Masjid Dharma Wanita Baitur-

rahim yang beralamat di Jl Brigjen Effendi, Kelurahan 24 Palembang, dan Masjid Darul Hijrah di Jl Lingkar Istana, Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang.

Gerakan Berkurban Serentak akan Terus Dilanjutkan

Gerakan Berkurban Serentak Se-Sumatera Selatan langsung menunjukkan hasil yang positif. Begitu diwacanakan Pj Gubernur, langsung 355 sapi terhimpun di seluruh Provinsi Sumsel.

"Total hewan kurban saat ini sebanyak 355 ekor sapi. Ini lumayan banyak, dan inilah bedanya jika kita lakukan bersama-sama, jumlahnya cukup besar," katanya.

Oleh karena itu, Pj Gubernur terus mendorong agar gerakan berkurban serentak terus dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun.

"Kegiatan seperti ini akan terus kita



dorong untuk dilakukan. Mudah-mudahan ini akan bisa kita laksanakan terus - menerus setiap tahunnya," harap Agus Fatoni.

Ia pun berharap, dengan adanya penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha 1445 H dan Hari-hari Tasyrik, dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap permasalahan stunting di Sumatera Selatan.

Gerakan Berkurban Serentak Se-Sumsel resmi dibuka ditandai dengan diserahkannya hewan kurban secara simbolis oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni kepada Pengurus Masjid Agung Palembang.

Kegiatan tersebut diikuti juga oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan secara virtual.

Selain itu, Agus Fatoni dalam kegiatan yang berlangsung secara online tersebut menyempatkan diri menyapa para Bupati dan Wali Kota yang hadir. Ia mengimbau agar para Bupati dan Walikota dapat memerintahkan para camatnya untuk mendata pelaksanaan pemotongan hewan kurban di daerah masing-masing.

Tujuan pencatatan tersebut, agar dike-

etahui jumlah total keseluruhan hewan kurban yang disembelih di Sumatera Selatan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.

"Saya juga minta Bupati-Walikota dapat memerintahkan para camat untuk mendata keseluruhan hewan kurban yang disembelih. Sehingga nantinya kita akan mengetahui total keseluruhan he-

wan kurban yang dikurbankan tahun ini, baik itu dari pemerintah, BUMN/BUMD, maupun Masyarakat", tuturnya.

Turut hadir Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin, Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang Ir Kgs H Abdul Rozak, M.SC, dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel. ♦



HUT KOTA PALEMBANG, AGUS FATONI BERI KADO RP88 MILIAR JUMLAH YANG FANTASTIS UNTUK MEMAJUKAN PALEMBANG

Penjabat (Pj) Gubernur Dr H Agus Fatoni didampingi Pj Ketua TP PKK Sumatera Selatan Tyas Fatoni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-1341 Kota Palembang Tahun, Minggu (16/6/2024), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang.

Pj Gubernur mengatakan, Palembang adalah kota strategis dengan berbagai potensi, prestasi, dan capaiannya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas capaian yang telah diraih oleh Kota Palembang.

"Selamat HUT Kota Palembang dan selamat atas berbagai capaian. Dalam kurun waktu yang telah lama Kota Palembang menjadi kota yang maju dan menjadi kebanggaan bersama," ungkapnya.

Agus Fatoni mengapresiasi sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang, DPRD, Forkopimda beserta jajaran. Kolaborasi dan sinergi ini menjadi kekuatan bagi semua untuk melaksanakan pembangunan di Kota Palembang.

"Berbagai upaya telah

dilakukan untuk memajukan Sumsel dan Kota Palembang, antara lain dengan sejumlah kegiatan serentak yang terus digemakan. Hal ini dilakukan bersama dengan kekompakan sehingga mampu mendorong lompatan kinerja di Sumsel," jelasnya.

Kekompakan menunjukkan keinginan untuk maju bersama. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menjaga iklim kondusif bersama di Sumsel, sehingga seluruh aktivitas dapat terlaksana dengan baik. Dan, hal ini tentu sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Membangun citra di Sumsel penting. Kita perlu menyebarkan berita positif dan capaian kinerja, agar masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja dan hadir untuk masyarakatnya," Sambungnya.*



KOMITMEN PEMPROV SUMSEL DUKUNG PEMBANGUNAN

Agus Fatoni mengatakan, Sebagai bentuk komitmen mendukung pembangunan, Pemprov Sumsel pada tahun 2024 akan memberikan bantuan keuangan Rp88 miliar, untuk memajukan Kota Palembang dan bantuan serupa juga akan diberikan ke seluruh kabupaten-kota se-Sumsel.

"Mari kita satukan tekad dengan berbagai kegiatan produktif efektif mendorong kemajuan di Sumsel pada umumnya, dan di Kota Palembang khususnya. Capaian yang ada merupakan kerja keras kekompartisan bersama," ajaknya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur mengajak semua pihak mempertahankan kekompakan yang telah terbina dan jangan mudah terpecah belah. Mari Kita bersatu padu membangun Sumsel, tidak mudah terprovokasi dan bersama melawan berita hoax.

Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, S.H., M.H., saat membuka rapat paripurna, mengucapkan selamat HUT Palembang ke-1341 peringatan ke-53, dan berharap HUT ini akan semakin memantapkan semangat juang dalam membangun Kota Palembang dan dapat mewujudkan Palembang Jaya.

"Di HUT kota Palembang Ini telah banyak keberhasilan yang telah dicapai dan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kemudian untuk program yang belum tercapai menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya," katanya.

Menurutnya, Selama setahun terakhir telah terjadi banyak kemajuan pembangunan antara lain infrastruktur jalan, penataan pemukiman, transportasi, prasarana peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan

pengembangan UMKM. Palembang juga menerima Opini WTP ke 13, dan berbagai penghargaan dalam berbagai bidang.

"Fungsi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah harus terjalin dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita bersinergi dengan visi misi yang sama yaitu bersatu bersama untuk Palembang berdaya dan

tuan dan kerja keras bersama Pj Gubernur Sumsel, Forkopimda, instansi vertikal, aparat penegak hukum dan masyarakat Palembang," Ujarnya.

Kita telah membangun sinergi, harmonis, dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tambahannya. Dan Kerjasama yang telah ada diharapkan dapat terus berlanjut.



berjaya," Tandasnya.

Sementara itu Pj Walikota Palembang Drs Ratu Dewa, mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama dan kolaborasi bersama Pj Gubernur Sumsel, dan DPRD Kota Palembang dalam membangun Kota Palembang yang berjaya dan berdaya.

"Capaian dalam berbagai Indikator prioritas pembangunan makro yang selalu kita lakukan dapat terwujud berkat ban-

Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Hj. Anita Noeringhati, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH., MH, Ketua Komisi III M. Yansuri S.IP., anggota DPRD Sumsel Tamtama Tanjung dan Nopianto, Para Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel dan Kota Palembang, Dirut BSB, Achmad Syamsudin, Para Lurah dan Camat di Kota Palembang, Para Kepala OPD Sumsel. ♦



PJ GUBERNUR SUMATERA SELATAN AGUS FATONI: UCOK DAN RATU DEWA DUET MAUT MEMAJUKAN PALEMBANG

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Dr Agus Fatoni melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Wali Kota Palembang yang baru Dr Ucok Abdulrauf Damenta.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 1300 Tahun 2024 Tanggal 12 Juni 2024.

Dr. Ucok Abdulrauf Damenta sebelumnya menjabat sebagai Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). Usai dilantik Agus Fatoni, Dr Ucok Abdulrauf Damenta resmi menjabat sebagai Pj Wali Kota Palembang Periode 2023-2024 menggantikan Drs. H. Ratu Dewa.

Dalam sambutannya Agus Fatoni men-

gatakan bahwa dengan hadirnya Dr. Ucok Abdulrauf Damenta di Kota Palembang serta didampingi Drs. H. Ratu Dewa yang kembali menduduki jabatan definitifnya sebagai Sekretaris Daerah, tentunya ini akan menjadi duet maut yang sangat baik dalam membangun Kota Palembang.

"Kita baru saja menyaksikan Pelantikan Pj Walikota Palembang. Dimana Pak Ucok akan didampingi Ratu Dewa dalam menjalankan tugasnya. Karena Ratu Dewa kembali kejabatan definitifnya sebagai Sekda Kota Palembang. Ini bisa jadi duet maut yang sangat baik dalam memajukan

Kota Palembang", ungkapnya.

PILKADA DI SELURUH SUMSEL HARUS BERJALAN BAIK

PJ Gubernur Agus Fatoni usai melantik Pj Wali Kota Palembang Dr Ucok Abdulrauf Damenta mengingatkannya tentang tugas dan fungsi utama Pj Kepala Daerah.

Bahwa Pj Kepala Daerah diberikan tugas untuk melanjutkan tugas kepala daerah sebelumnya, dan memastikan agar Pilkada berjalan baik sebagaimana mestinya hingga terpilih kepala daerah yang baru.

Dalam kesempatan itu juga, tak lupa



Agus Fatoni juga mengucapkan terima kasih kepada Drs H Ratu Dewa beserta istrinya Hj Dewi Sastrani Ratu Dewa, SAG yang telah mengabdikan diri dalam memimpin dan memajukan Kota Palembang.

"Saya juga berterimakasih kepada Bapak Ratu Dewa dan Ibu, yang sudah banyak sekali terobosan dan inovasi yang telah dilakukan. Serta sinergi yang dilakukan selama ini bersama Pemprov memberikan dampak yang banyak untuk kemajuan Kota Palembang", tuturnya.

Mengakhiri sambutannya Agus Fatoni mengajak Seluruh Kepala Daerah, baik yang baru saja dilantik serta yang meng-

hadiri kegiatan tersebut untuk dapat menjaga iklim kondusif yang ada di Sumatera Selatan.

Karena menurutnya, daerah yang kondusif merupakan modal awal pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang yang baru, Ir-mawati Habi Damenta, SH menggantikan Pj. Ketua TP PKK Kota Palembang Periode 2023 - 2024, Hj. Dewi Sastrani Ratu Dewa,

SAG oleh Pj. Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Tyas Fatoni.

Dalam kesempatan itu juga, A. Fatoni menyerahkan SK Perpanjangan kepada Pj. Bupati OKU, Teddy Meilwansyah untuk melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Turut hadir Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Para Bupati/Walikota, Sekda Prov. Sumsel, Ir. SA Supriono, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. ♦



Karena Ratu Dewa kembali ke jabatan definitifnya sebagai Sekda Kota Palembang. Ini bisa jadi duet maut yang sangat baik dalam memajukan Kota Palembang





PJ GUBERNUR SUMATERA SELATAN AGUS FATONI BAGIKAN TEKNIK JITU MENGENDALIKAN LAJU INFLASI DI KABUPATEN-KOTA

Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Agus Fatoni, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menikmati Angka Inflasi yang terkendali, dan ekonomi mengalami pertumbuhan sepanjang 2024.

Hal itu terungkap saat Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Prov. Sumsel Bersama Bupati dan Walikota Se-Sumsel dalam Rangka Menghadapi Perayaan Hari Raya Idul Adha dan Libur di Wyndham OPI Hotel Palembang, Rabu (12/6/2024).

Pj Gubernur mengemukakan bahwa pertemuan yang dilakukan merupakan agenda sangat penting untuk dilakukan agar inflasi di Sumsel tetap terkendali dan terjaga.

"Saya mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah kita lakukan bersama, sehingga inflasi bisa terkendali dan ekonomi mengalami pertumbuhan di tahun ini", ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Tingkat Inflasi adalah salah satu indikator yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana perekonomian daerah akan tumbuh dan berjalan baik bila tingkat inflasi daerah terjaga rendah dan stabil.

"Saat ini, tingkat inflasi Sumatera Selatan mengalami Inflasi bulan Mei 2024 sebesar 0,06% (mtm) menurun dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan April 2024 mengalami inflasi sebesar 0,43%, dan dengan inflasi tahunan menurun 2,98% secara year on year (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya 3,12% (yoy).

"Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan pada Triwulan I-2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% (yoy), dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoy)", katanya.

Untuk menjaga inflasi di Sumsel dalam rangka menghadapi perayaan Hari Raya Idul Adha dan Libur Sekolah, melalui

kesempatan tersebut Agus Fatoni memberikan 10 arahan yang harus dilakukan oleh Seluruh Kepala Daerah Di Sumatera Selatan.

10 Langkah Pengendalian Inflasi ala Pj Gubernur Sumsel:

Kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran, Agus Fatoni memberikan 10 langkah agar Inflasi Daerah terkendali dan terjaga:

Pertama Melakukan antisipasi ketidakpastian cuaca; Kedua Mendorong optimalisasi lahan pekarangan, sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan; Ketiga Mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara end to end, melalui sarana prasarana, SDM, dan teknologi pertanian, maupun melalui aspek kerjasama dan kelembagaan; Keempat Membentuk dan mengoptimalkan BUMD Pangan/lembaga sejenis untuk melakukan KAD; Kelima, Menyusun dan mengoptimalkan neraca pangan untuk mendukung KAD; Keenam, Mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); Ketujuh, Terus melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, termasuk rutin melaksanakan pasar murah; Kedelapan, Melakukan optimalisasi dan replikasi Toko Penyeimbang, termasuk di pasar-pasar; Kesembilan, Memberikan dukungan fiskal, baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan; Kesepuluh, Melakukan kajian sebelum menaikkan harga.

Selanjutnya, Agus Fatoni berharap kepada seluruh peserta rapat terus menjaga iklim kondusif di Sumsel agar situasi aman dan terkendali tetap terjaga sehingga perekonomian tetap berjalan dan inflasi di Sumsel dapat terjaga.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Ricky P Gozali selaku Wakil Ketua TPID Sumsel, mengungkapkan saat ini komoditas utama penyumbang inflasi di Sumatera Selatan ialah Cabai Merah (0,10%), Emas Perhiasan (0,08%), Bawang Merah (0,07%), dan Gula Pasir (0,03%).

"Peningkatan harga Cabai Merah dan Bawang Merah disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di daerah sentra yang mengganggu produksi dan distribusi komoditas tersebut. Terkait dengan kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh sentimen eksternal, selanjutnya untuk kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh mundurnya musim giling tebu sehingga kebutuhan gula masih mengandalkan stok awal tahun yang

tersedia", ungkapnya menjelaskan pada forum rapat tersebut.

Berkaitan hal tersebut ia juga memberikan rekomendasi upaya dalam pengendalian inflasi melalui 4K yaitu Keterediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

frastruktur, retribusi, pajak dan kebijakan lainnya dalam mendukung kelancaran distribusi tersebut.

Terkait dengan keterjangkauan harga, ia mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumsel cukup baik melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se Sumsel dengan Gerakan



Melalui paparan ia menjelaskan untuk Ketersediaan Pasokan upaya yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya; Mendorong Optimalisasi Kerjasama Antara Daerah (KAD), Mendorong Implementasi IP200 dan IP300 untuk optimalisasi produksi beras, Mendorong pengembangan komoditas bawang merah dan cabai.

Untuk Kelancaran Distribusi upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan upaya - upaya dalam menghilangkan hambatan distribusi seperti perbaikan in-

Pasar Murah dan Toko Kepo yang telah dilakukan. Ia berharap gerakan tersebut dapat terus dilakukan di setiap kab/kota secara terus - menerus.

Selanjutnya ia menjelaskan terkait dengan Komunikasi Efektif dimaksudkan untuk mengkomunikasikan atau mengkampanyekan tentang belanja bijak dan belanja efektif dengan mengajak Para Influencer, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam menyuarakannya kepada masyarakat. ♦

Peringatan HPN Provinsi Sumatera Selatan 2024

PJ GUBERNUR AGUS FATONI DIANUGERAHI JAS KEHORMATAN PWI PUSAT

Penjabat Gubernur Dr Agus Fatoni dianugerahi Jas Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Jas diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat Sayid Iskandarsyah pada Kegiatan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang diselenggarakan di Griya Agung.

Jas kehormatan yang diberikan kepada Agus Fatoni merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan PWI kepada Kepala Daerah sebagai sahabat dan mitra PWI.

Dalam sambutannya Agus Fatoni mengajak semua insan pers yang tergabung dengan PWI, baik wartawan media cetak dan online untuk menjaga marwah dan nama baik sumsel, serta iklim kondusif menjelang Pilkada 2024.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan untuk menggunakan jas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Melalui peringatan ini, mari kita bersama menjaga iklim kondusif yang ada di sumsel dan kita terus pertahankan sumsel zero konflik yang aman dan damai sehingga menciptakan iklim kondusif di sumsel, tentunya juga ini dibutuhkan peran

wartawan dan media dalam mewujudkannya", katanya.

Pj Gubernur yang juga Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi terselenggaranya Peringatan HPN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan selama 10 hari yang diisi dengan beragam kegiatan di antaranya Donor Darah, Seminar, Webinar, Lomba Gaplek, Lomba Mancing, FGD Gabungan, Bimtek Bakohumas dan kegiatan lainnya.

"Hari ini puncaknya peringatan HPN 2024, diselenggarakan selama 10 hari dan kegiatan yang cukup banyak dan sangat bermanfaat. Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi. Kita merasa bersyukur atas capaian yang kita lalui dan yang telah dicapai oleh PWI Sum-sel, dan kita merasa bangga karena sum-sel menjadi bagian perkembangan pers di Indonesia", ungkap Agus Fatoni.



WARTAWAN DIMINTA INFORMASIKAN POTENSI SUMSEL

Agus Fatoni di akhir sambutannya mengajak semua insan pers dan media, untuk menginformasikan sebanyak mungkin semua potensi yang dimiliki oleh Sumsel, serta memberitakan semua hal-hal positif agar terjaganya iklim kondusif di Sumsel.

Di kesempatan yang sama, Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah mewakili Ketua Umum PWI Pusat mengapresiasi PWI Sumsel atas dilaksanakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional pada Tingkat Provinsi.

"Luar biasa apa yang telah dilakukan PWI Sumsel atas terselenggaranya kegiatan ini dan kemudian terbangunnya sinergi bersama dengan stakeholder pemerintah provinsi sumsel", ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua PWI Pusat agar seluruh PWI Provinsi dan Daerah untuk menjaga marwah PWI dan ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.

Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Ketua PWI Sumsel diharapkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam menciptakan Pilkada Damai yang wajib untuk dilakukan oleh PWI.

"Terkait Pemilu Damai, Kita juga diharapkan oleh Ketua PWI untuk da-

pat ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar terciptanya pemilu damai, karena kita bagian dari itu", ucapnya menyampaikan pesan.

Terkait hal tersebut, ia menegaskan kepada semua Anggota PWI di Sumsel yang ikut dalam kegiatan politik dan berkampanye diharapkan untuk dapat mengambil cuti agar profesi dan keanggotaan PWI tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik serta menjaga Marwah PWI itu sendiri.

Sementara itu Ketua PWI Sumsel Kurnaidi, ST menyampaikan bahwa pers merupakan pilar dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Maka dari itu, ia berharap hubungan baik

yang telah terjalin antara PWI dan Pemerintah dapat terus terjalin dan ditingkatkan.

"Kami juga memberikan award kepada kepala daerah se sumsel, harapannya agar hubungan yang sudah terjalin bagus agar menjadi kokoh lagi. Kami juga berharap Kepala Daerah dapat mendukung dan membantu dalam kegiatan-kegiatan PWI selanjutnya", tuturnya.

Turut hadir Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bambang Panca Hariadi, SH., MH, Para Bupati/Walikota Se Sumsel, Para Pimpinan Redaksi Media Se Sumsel, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. ♦



10 DESTINASI WISATA HALAL RAMAH MUSLIM DI EROPA

Tak hanya kota-kota di kawasan Asia, kota-kota di Eropa juga menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang selalu tujuan masyarakat dari berbagai negara. Tak terkecuali bagi masyarakat Muslim. Meski tidak semua, beberapa kota di Eropa dapat dipilih sebagai alternatif untuk berwisata halal.

Para wisatawan Muslim tak perlu khawatir, karena akan dapat dengan mudah menemukan menu makanan halal di beberapa kota di Eropa dengan hadirnya orang Turki, Maroko, dan Aljazair.

Tak hanya itu, para wisatawan muslim juga dapat menemukan tempat-tempat ibadah atau masjid di kota-kota di Eropa

yang kini banyak ditemukan. Sehingga bagi wisatawan muslim tidak akan terganggu saat akan menjalankan ibadah.

Berikut 10 Kota Destinasi Wisata Halal di Eropa yang Ramah Muslim:

1. BERLIN

Berlin memiliki banyak tempat menarik untuk memanjakan wisatawan. Mulai

dari department store terbesar di Eropa (KaDeWe) hingga hutan Grunewald. Kota ini dapat dinikmati semua orang, mulai dari shopping hingga pecinta alam.

Kurang lebih 9% warga Berlin adalah Muslim. Oleh karena itu, wisatawan muslim dapat dengan mudah menemukan Masjid untuk beribadah. Salah satunya adalah Masjid Sehlik. Masjid yang terletak



Berlin

di jantung kota Berlin ini, merupakan salah satu masjid termegah di Jerman. Berada di jalan Columbadamm di wilayah Tempelhof ini, membuat Masjid Sehitlik sangat mudah ditemukan.

Berlin juga memiliki lebih dari 60 restoran yang menyajikan makanan halal yang sangat cocok bagi wisatawan Muslim.

Selain itu, wisatawan Muslim juga dapat mengunjungi Rayan Chicken, makanan Turki yang lezat atau Maroush makanan Lebanon yang nikmat. Dengan segala fasilitas yang ada, Berlin layak menjadi salah satu pilihan kunjungan wisata halal bagi para traveller Muslim.

2. HAMBURG

Selain Berlin, Hamburg juga merupakan salah satu kota di Jerman yang ramah Muslim. Kota Hamburg menawarkan berbagai tempat wisata halal, mulai dari tempat bersejarah, hingga museum lengkap arsitektur yang luar biasa.

Selain itu, sebagai kota pelabuhan utama di Jerman Utara, wisatawan juga dapat berjalan-jalan di pasar ikan hingga menikmati aktivitas air yang seru dan menyenangkan.

Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 10% dari populasi seluruh kota, Hamburg memiliki banyak fasilitas yang ramah untuk umat Muslim, karena sangat saying jika dilewatkan.

Setidaknya ada lebih dari 20 Masjid di kota Hamburg ini dan beberapa yang populer termasuk Islamisches Zentrum dan Centrum Moschee.

Untuk makanan, wisatawan Muslim juga tak perlu khawatir, banyak sekali makanan Turki di Hamburg, mengingat banyak sekali imigran Turki yang tinggal di kota tersebut. Namun masakan Timur Tengah juga tersedia di sini. Wisatawan juga dapat menemukan menu Indonesia seperti masakan Jawa.

3. FRANKFURT

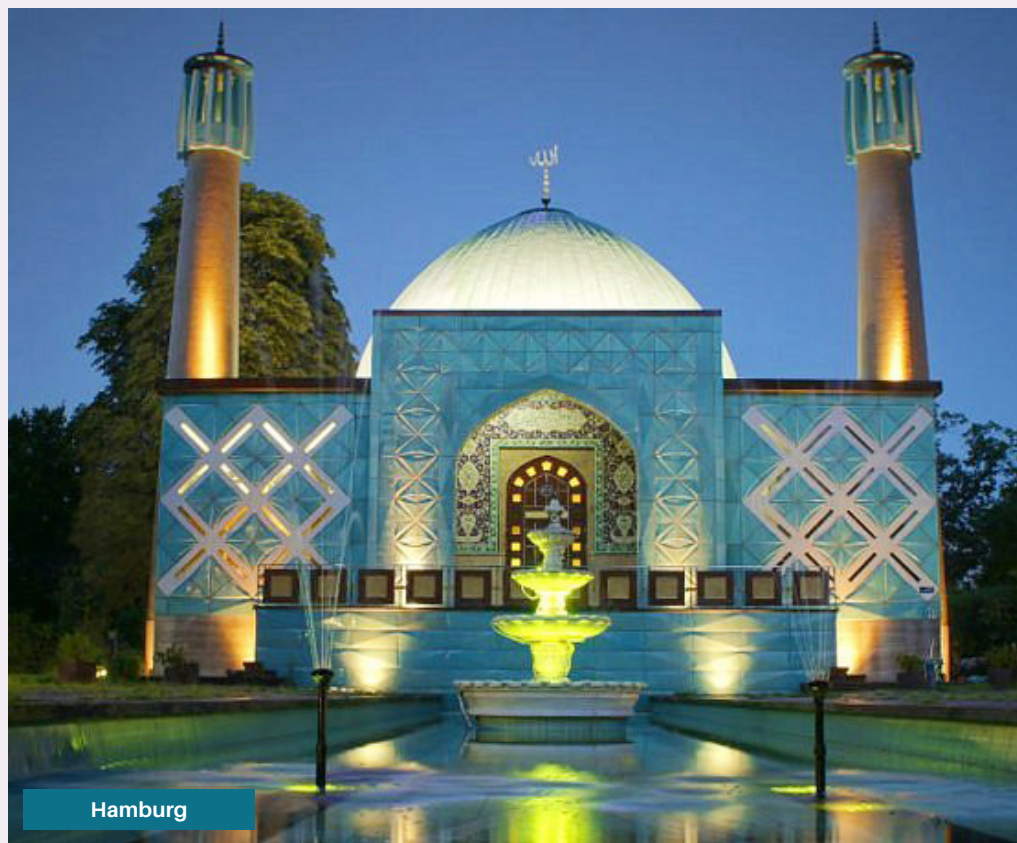
Frankfurt merupakan kota yang identik dengan museum, seni rupa, dan bangunan arsitektur yang menakjubkan. Kota kekaisaran tua ini, memberikan suasana yang unik dan klasik bagi para wisatawan.

Salah satu tempat wisata yang sayang untuk dilewatkan adalah Römerberg (Pusat Kota Tua Frankfurt). Di Römerberg wisatawan dapat untuk menikmati pemandangan bangunan bersejarah yang indah dan unik. Selain museum, di Frankfurt juga terdapat beberapa Masjid, di antaranya Masjid Abu Bakar dan Noor Masjid.

Frankfurt menjadi kota paling ramah untuk wisata halal, karena sekitar 11,8% warga Frankfurt adalah Muslim, sehingga pengunjung dapat menemukan fasilitas ramah Muslim dengan mudah.

4. MUNICH

Lain Frankfurt lain pula Munich. Di kota ini menawarkan atraksi wisata menarik seperti landmark Frauenkirche dan bangunan bersejarah dengan arsitektur men-



Hamburg



Frankfurt

Untuk makanan, wisatawan Muslim juga dapat dengan mudah menemukan makanan halal. Di antaranya beberapa hidangan Persia di restoran Kish dan restoran Hafez. Selain itu, wisatawan juga dapat memuaskan selera Asia dengan mengunjungi Thai Fun untuk menikmati beberapa kelezatan makanan khas Thailand.

gagumkan di kota tua Altstadt.

Bagi penyuka sekaligus penyayang binatang, para wisatawan bisa mengunjungi Tierpark Hellabrunn yaitu kebun binatang terbesar di dunia. Sementara para pecinta alam, juga pasti tak akan melewatkan untuk mengunjungi Englischer Garten, taman alam raksasa dengan lubang berenangnya yang ikonik.

Berbagai jenis makanan halal dapat ditemukan di Munich. Mulai dari masakan Afghanistan di Kababji Grill Haus, Bamyang Narges, dan Kabura hingga kombinasi ma-

London Eye, Istana Buckingham, Tower of London hingga Westminster Abbey.

London juga merupakan rumah bagi lebih dari satu juta Muslim. Masjid-masjid

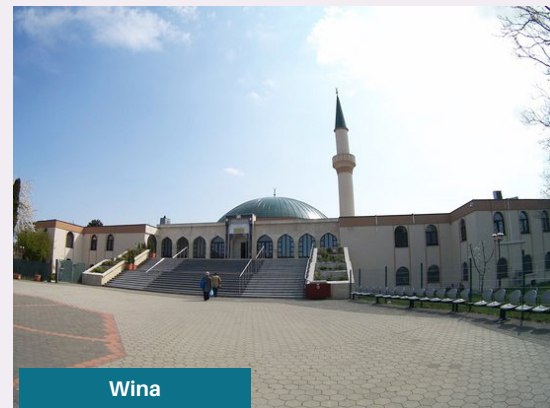
Untuk makanan halal, kota ini juga dipenuhi dengan makanan halal hingga sangat mudah menjangkaunya, hanya dengan berjalan kaki. Mulai dari makanan Turki, makanan Pakistan, makanan India atau makanan Timur Tengah, di London semua ada.

6. WINA

Ibu kota Austria ini kaya akan pemandangan indah dan atraksi wisata yang beragam. Mulai dari istana besar seperti Schloss Schönbrunn, Riesenrad Ferris Wheel yang mempesona, hingga Istana



Munich



Wina



London

sakan Arab dan Jeram di El Sham Restaurant.

Wisatawan muslim juga bisa mengunjungi Masjid paling ikonik, yaitu Masjid Penzberg, yang memiliki arsitektur Islam tradisional yang mengagumkan dengan desain modern sederhana tapi indah.

5. LONDON

Kota ikonik ini memiliki berbagai tempat wisata menarik, mulai dari Big Ben,

bertebaran di berbagai lokasi untuk mengakomodasi masyarakatnya dan juga wisatawan.

Mulai dari Masjid Pusat London, Masjid London Timur, Masjid Fazal hingga Masjid Leyton. Tak hanya itu, wisatawan Muslim juga dapat menemukan beberapa pusat Islam di kota ini, seperti Deptford Islamic Centre, Masjid London Timur dan Pusat Muslim London dan Pusat Kebudayaan Islam.



Barcelona

Kekaisaran Hofburg, yang sangat mengagumkan

Wina juga menjadi salah satu destinasi wisata halal di Eropa dengan berbagai makanan halal yang disajikan. Wisatawan Muslim dapat menemukan beragam sajian seperti Quicky's (burger halal), Sababa (makanan Timur Tengah), Asala Halal (makanan Mediterania), Der Wiener Deewan (makanan Pakistan) dan Sen (barbeque Turki).

7. BARCELONA

Merupakan salah satu kota di Eropa yang terkenal di kalangan penggemar berat tim sepak bola. Namun jangan salah paham dulu, daya tarik Barcelona tak hanya tentang sepak bola. Naun kota ini juga sangat menarik, terutama untuk wisatawan yang punya hobi jalan kaki.

Kota Barcelona juga cocok sebagai

destinasi wisata halal. Wisatawan Muslim dapat menemukan berbagai tempat dengan fasilitas beribadah. Seperti Masjid utama di Barcelona, Mezquita Tariq bin Ziyad dan dua pusat Islam di kota ini termasuk Center Islâmic de Barcelona dan Minhaj Islamic Center.

Untuk makanan tak perlu diragukan lagi. Barcelona kaya akan makanan halal, seperti Bismillah Raval Kebabish (makanan Turki), Lal Qila (makanan halal India), Habibi Café (makanan Timur Tengah) dan Zeeshan Kebabish (makanan Pakistan).

8. PARIS

Tak hanya kota yang dikenal sebagai kota mode dunia, namun kota ini, juga memiliki berbagai tempat ikonik yang selalu dituju oleh para wisatawan, seperti Menara Eiffel, Notre Dame de Paris, Louvre dan Arc the Triomphe.

Selain itu, di Paris juga memiliki Masjid Grande Mosque De Paris, yang merupa-



Paris

kan masjid tertua di Prancis, yang berdiri sangat megah.

Paris juga cocok untuk menjadi alternatif wisata halal. Wisatawan Muslim dapat berburu hidangan halal di Helm dan Chez Le Libanais (Lebanon), Les Quatre Frères (Arab), atau Pacha Kebab (Turki).

9. BRUSSELS

Negara Belgia juga memiliki kota yang ramah Muslim, yaitu kota Brussels. Ibu kota Belgia, yang juga ibu kota Uni Eropa ini, dikenal banyak orang dengan sajian wafel paling enak di dunia.

Tak hanya itu, kota ini juga memiliki berbagai atraksi wisata yang indah seperti Grand Place (Grote Markt), Pusat Strip Komik Belgia, Place Royale (Koningsplein), Museum Seni Kerajaan Belgia dan Atomium.

Wisatawan Muslim juga tidak akan pernah kesulitan mencari masjid atau makanan halal.

Pengunjung dapat dengan mudah menemukan hidangan halal Arab (Bab El Hara), makanan halal Prancis (L'Inconnu), kelezatan Maroko (Le Livre Jaune) dan bahkan masakan halal Etio-

pia (Kokob) di kota ini.

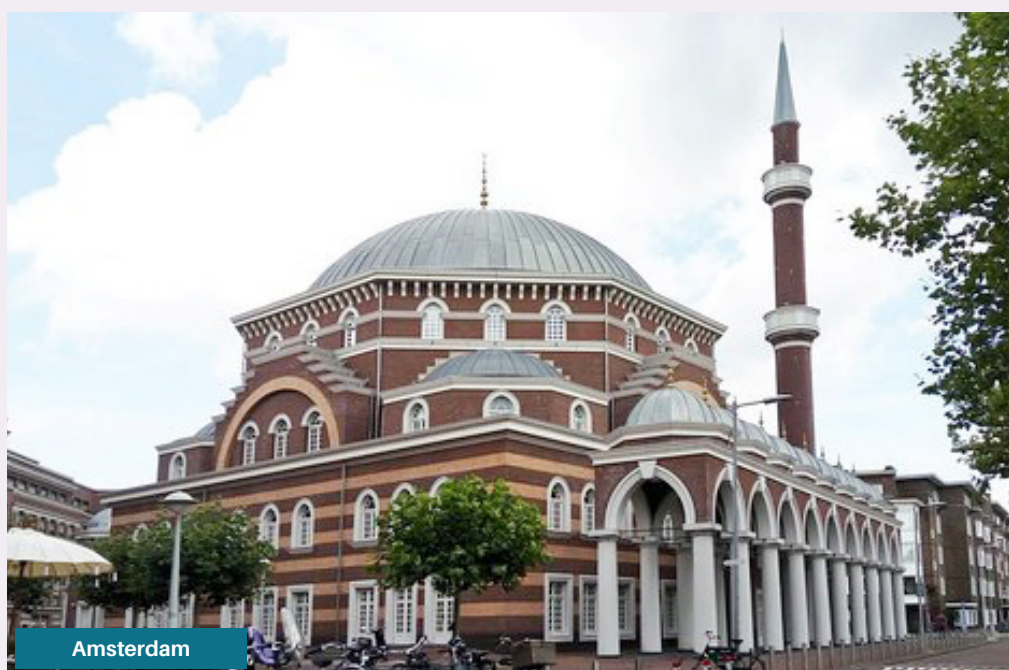
10. AMSTERDAM

Kota indah ini adalah rumah bagi seni

cocok untuk destinasi wisata halal di Eropa, mengingat sebanyak 14% penduduknya adalah warga Muslim. Di kota ini berdiri beberapa masjid terkenal sepe-



Brussels



Amsterdam

rupa, museum, dan taman yang indah. Tidak lupa kafe yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan berbatu yang cantik.

Beberapa tempat wisata yang sangat menakjubkan juga tersedia di kota ini, seperti The Rijksmuseum, Museum Anne Frank, atau Museum Van Gogh, yang tentunya sangat disayangkan kalau sampai dilewatkan.

Amsterdam juga salah satu kota yang

ti, Moskee El-Tawheed Amsterdam, Westermoskee Aya Sofya, dan Masjid Al-Karam.

Makanan halal pun jadi salah satu daya tarik tersendiri di Amsterdam. Karena wisatawan Muslim dapat menikmati di resto-resto ramah Muslim di Crystal (Steakhouse dan Pizza), Restaurant Riaz (makanan Indonesia), MOZO (masakan Maroko), Daarbaand (lezat Persia) dan Istanbul Plaza Doner Kebab (makanan Turki). ♦

34 WNI TANPA VISA HAJI DIPULANGKAN DAN 3 ORANG DIPROSES HUKUM

Sebanyak 34 jamaah dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap aparat keamanan (Apkam) Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa non haji, akhirnya pulang ke Tanah Air. Sementara tiga orang lainnya masih akan diproses secara hukum.

Keterangan tersebut disampaikan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary. Menurut Yusron, sejak beberapa hari lalu tim perlindungan jamaah haji KJRI Jeddah terus mendampingi pemeriksaan terhadap 37 WNI tersebut.

"Alhamdulillah dalam pendampingan tersebut, 34 jamaah dinyatakan bebas dan pagi ini telah kembali ke Indonesia dengan penerbangan Qatar Airways yang akan tiba di Jakarta pukul 21.30 WIB," kata Yusron B Ambary, seperti dialnsir dari laman Kemenag, Senin (3/6/2024).

Yusron menambahkan, sementara untuk tiga orang tersebut, yang ditengarai sebagai coordinator, mereka adalah berinisial SJ, SY dan MA, yang saat ini masih berada di Kejaksaan di Madinah untuk proses hukum lebih lanjut.

Yusron mengatakan, bahwa KJRI Jeddah akan memastikan hak-hak hukum WNI tersebut terpenuhi.

Berdasarkan pengakuan 34 jamaah yang sudah pulang mereka menyampaikan menyadari datang ke Saudi Arabia dengan visa ziarah bukan visa haji.

"Mereka dijanjikan oleh seorang oknum, mukimin WNI yang tinggal di Makkah untuk mendapatkan tasreh haji dan masing-masing membayar 4.600 Riyal," ungkap Yusron.

KJRI Jeddah kembali menegaskan bahwa visa yang dapat dipakai untuk ibadah haji adalah bisa haji reguler ataupun haji khusus, yang diterbitkan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Kedua, merupakan visa Mujalamah yang merupakan undangan dari Kerajaan Arab Saudi kepada individu-individu tertentu di

Tanah Air.

"Sementara untuk visa-visa lainnya masyarakat dapat bijak dalam melihat tawaran-tawaran haji dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Pastikan jenis visa Anda sebelum ada berangkat ke Tanah Suci," terang Yusron.

Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan sejumlah jamaah haji, diamankan aparat kepolisian Kerajaan Arab Saudi karena kedapatan tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen perhajian ketika Miqat di Bir Ali, Madinah pada 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

"Statusnya dideportasi (22 WNI). Jadi akan berlaku ketentuan deportasi yang salah satunya adalah larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun," kata Yusron melalui pesan online di Makkah, Jumat (31/5/2024).

Sementara itu, Direktur Layanan Haji Luar



Negeri, Subhan Cholid mengimbuu jamaah untuk tidak tergiur terhadap tawaran berhaji secara non prosedural dengan menggunakan visa non haji. Sebab, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah memperketat aturan terkait visa haji.

"Bagi jamaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi dan ingin masuk ke Makkah untuk berhaji, namun tidak memegang visa haji, hanya punya visa ziarah, sebaiknya tidak memaksakan diri. Sebab, itu tidak sesuai dengan ketentuan Arab Saudi," ungkap Subhan.

Subhan menambahkan, bagi jamaah pengguna visa ziarah atau lainnya, yang saat ini masih di Tanah Air, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk ke Arab Saudi dengan niat berhaji.

Visa ziarah bisa digunakan untuk masuk ke berbagai kota di Arab Saudi, tapi tidak untuk ke Makkah sampai tanggal 15 Dzulhijjah 1445H. Jamaah bisa mendiskusikan hal ini dengan travelnya, termasuk jika ada rencana untuk membatalkan keberangkatannya.

Kemenag Ingatkan Masyarakat

Berhaji dengan Visa Haji

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengingatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji, untuk memastikan menggunakan visa haji.

Hal tersebut dikatakan anggota Media Center Haji Kementerian Agama (Kemenag), Widi Dwinanda, menyusul adanya pengamanan terhadap 24 warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Arab Saudi di Miqat Masjid Bir Ali Madinah, pada Selasa

(28/5/2024) dan melarang para jamaah tersebut masuk ke Makkah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji.

Widi menambahkan, setidaknya ada tiga landasan ketentuan yang menegaskan bahwa berhaji harus menggunakan visa haji bukan visa ziarah.

"Pertama, di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terdapat dua jenis visa haji yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan haji khusus) dan visa haji Mujamalah (undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi)," kata Widi Dwinanda dalam keterangan resmi Kemenag di Jakarta, Jumat (31/05/2024).

"Haji dengan visa Mujamalah ini populer dengan sebutan haji Furoda, yakni haji yang menggunakan visa undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jamaah yang menggunakan visa ini, wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)," tambah Widi.

Kemudian yang kedua, lanjut Widi, fatwa Haiah Kibaril Ulama Saudi, yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikan haji.

Menurutnya, ada empat alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. Pertama, kewajiban

peroleh izin haji didasarkan pada apa yang diatur dalam syariat Islam.

Kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji.

"Ketiga, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah," ungkap Widi.

Kempat, Widi melanjutkan, haji tanpa izin tidak diperbolehkan. Sebab, kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jamaah, tetapi meluas pada jamaah lain.

Menurut fatwa tersebut, tidak boleh berangkat haji tanpa mendapat izin, dan berdosa bagi yang melakukannya karena melanggar perintah pemerintah.

"Bahkan, Pemerintah Saudi telah menetapkan sanksi berhaji tanpa visa dan tasreh resmi," tandasnya.

Terakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa haji dengan visa non haji atau tidak prosedural itu sah, tetapi cacat dan pelakunya berdosa. Keputusan ini menjadi salah satu hasil musyawarah pengurus Syuriyah Nahdlatul Ulama yang digelar pada 28 Mei 2024 lalu.

Pemerintah Arab Saudi memastikan, visa yang bisa masuk ke Makkah dan Masyair atau Rafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) adalah visa haji.

Hal ini ditegaskan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah, Ali Machzumi kepada tim Media Center Haji, Selasa (28/5/2024) di Kantor Daker Madinah. Menurutnya, Visa yang resmi untuk ibadah haji adalah visa haji, baik visa haji reguler maupun haji khusus, termasuk visa haji mujamalah.

Kadaker Madinah juga membemarkan adanya pemeriksaan bagi jamaah haji di lokasi Miqat Bir Ali atau Masjid Zulkhulaifah.

"Dan memang itu sudah menjadi kebijakan yang ditetapkan Arab Saudi," kata Ali Machzumi.

Selain itu, razia juga dilakukan polisi di perbatasan Madinah-Makkah di wilayah Jumum. Mayoritas pemeriksaan dilakukan terhadap rombongan jamaah yang berasal dari Madinah.

Menyikapi hal ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengimbuu jamaah haji untuk menggunakan visa resmi haji.

"Sekali lagi, kami mengimbuu agar Warga Indonesia tidak sekali-kali berhaji tanpa memakai visa haji.

Widi Dwinanda

Mengingat risikonya yang sangat banyak," tambah Ali.

Kadaker juga menjelaskan, banyak sanksi yang akan diberikan kepada jamaah yang tidak memakai visa haji resmi, akan terkena denda hingga 10 ribu riyal atau setara Rp 42 juta.

Sanksi lainnya, jamaah tanpa visa haji juga berpotensi ditahan sementara oleh polisi Arab Saudi selama musim haji berlangsung.

"Sanksi lainnya mereka juga akan dideportasi dan masuk daftar cekal. Jika terkena cekal, mereka tidak boleh masuk ke Arab Saudi minimal 10 tahun," pungkas Ali.

Arab Saudi Terbitkan Aturan Visa Ziarah Tak Bisa Masuk Makkah pada Musim Haji

Otoritas Arab Saudi menerbitkan kebijakan baru, pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal ke Makkah mulai 15 Zulqoidah sam-

ibadah haji 1445 H. Saya kira ini bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penertiban dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji yang datang dari berbagai negara di dunia," ungkap Subhan.

"Kami juga berharap ketentuan Pemerintah Arab Saudi ini juga diperhatikan dan diindahkan bagi warga Indonesia yang berniat ke Makkah dengan visa ziarah. Jangan sampai tersangkut dengan masalah hukum setibanya di Tanah Suci," tandasnya.

Konjen RI Jeddah Minta Jamaah Miliki Visa Haji Sebelum ke Makkah

Mengingat ketatnya pemerintah Arab Saudi terhadap para jamaah haji pemegang visa non haji, Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah, Yusron B. Ambary, mengimbau masyarakat Indonesia yang akan berhaji memastikan bahwa dirinya memiliki visa haji sebelum berangkat

Yusron menjelaskan, saat diamankan di Bir Ali, mereka diperiksa oleh intel aparat keamanan Arab. Koordinatornya menyerahkan contoh visa haji milik orang lain.

"Visanya tidak sesuai paspor. Setelah diperiksa, mereka ternyata menggunakan visa ziarah," ujar Yusron.

Namun karena mereka ditangkap sebelum melaksanakan ibadah haji, para jamaah ini akhirnya bisa dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air.

"Para jamaah ini berasal dari Banten," imbu Yusron.

Sementara itu, untuk tiga orang jamaah lainnya yang merupakan koordinator mereka dikenai pasal transporting Haji di mana ancamannya adalah denda 50 ribu riyal, kurungan 6 bulan penjara dan banned selama 10 tahun.

"Pemeriksaan biasanya akan didampingi, ada permintaan. Andai tidak didampingi biasanya ada penerjemah di situ," ujar Yusron.

Lebih lanjut Yusron menjelaskan, para jamaah ini telah membayar biaya haji yang berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 150 juta.

Yusron menyatakan, saat ini pemerintah Arab Saudi berusaha memperbiaki penyelenggaraan ibadah haji dengan menciptakan inovasi dalam pelayanan.

"Artinya tasreh menjadi sangat penting untuk mempersiapkan berapa orang yang harus dilayani, sampai ulama saudi menyatakan bahwa haji tanpa tasreh itu dosa, menteri haji sudah bilang barangsiapa berhaji tanpa tasreh haji, hajinya tidak sah," ungkapnya.

Karena itu, saat ini pemerintah Arab Saudi memperketat akses masuk ke Makkah dengan digelarnya razia di beberapa titik.

"(Sebab) Kalau misalnya ada 100 ribu atau 200 ribu haji gelap akan ganggu ibadah haji secara keseluruhan," pungkas Yusron.

Kemenag Akan Sanksi Travel Penyedia Visa selain Visa Resmi Haji

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, bahwa pihaknya akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji kepada jamaah yang bermaksud menunaikan ibadah haji.

Hal ini ditegaskan Menag Yaqut saat menjawab pertanyaan media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta.

"Kita kan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas, menanggapi wartawan di Komplek Parlemen,



pai 15 Dzulhijjah 1445 H.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid di Makkah, Kamis (30/5/2024).

"Saya mendapat informasi, Saudi telah menerbitkan aturan baru bagi para pengguna visa ziarah. Disebutkan bahwa pengguna visa ziarah, dengan beragam jenisnya, sudah tidak bisa masuk ke Makkah dari pada 15 Dzulqoidah - 15 Dzulhijjah 1445 H," ujar Subhan Cholid.

Menurutnya, aturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang diberlakukan bagi pengguna visa umrah. Pemerintah Arab Saudi telah menegaskan bahwa pengguna visa umrah batas akhir bisa masuk ke Makkah pada 15 Dzulqoidah 1445 H atau 23 Mei 2024, dan harus sudah keluar dari Arab Saudi pada 29 Dzulqoidah 1445 H atau 6 Juni 2024.

"Saudi terus memperketat aturan masuk ke Makkah pada musim penyelenggaraan

ke Tanah Suci.

Yusron menjelaskan, visa yang dapat digunakan untuk berhaji adalah yang visa haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu visa haji reguler, visa haji khusus, dan visa haji mujamalah.

Yusron berpesan masyarakat Indonesia yang akan berhaji harus melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah, jangan mudah terbuai dengan iming-iming visa lain untuk berhaji.

"Sebelum berangkat pastikan visanya adalah visa haji," ungkap Yusron B Ambary, seperti dilansir dari laman Kemenag, Kamis (30/5/2024).

Imbauan ini disampaikan Yusron menyusul adanya pengamananan terhadap 37 WNI di Miqot Masjid Bir Ali, Madinah pada 28 Mei 2024. Mereka diamankan pihak Kerajaan Arab Saudi dan dilarang untuk masuk Makkah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji.

Jakarta, Selasa (4/6/2024).

"Menteri haji Kerajaan Arab Saudi, juga sudah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji," tambah Menag.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji Mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jamaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jamaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji Mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK.

Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji Mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama.

"Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti berapa jamaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi," tandasnya.

Begini Prosedur Penggunaan Smart Card dalam Ibadah Haji

Proses pemberangkatan jamaah haji tahun 1445 H/2024 M dari hotel ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) akan dilakukan proses scan barcode Smart Card terlebih dahulu, sebelum jamaah naik ke dalam bus.

Smart Card merupakan salah satu terobosan otoritas Arab Saudi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Program ini mendapat perhatian secara khusus dari Kementerian Haji, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak Keamanan Umum Arab Saudi.

Jamaah yang tidak memiliki Smart Card, dilarang masuk ke Armuzna, apapun kedudukannya. Pemerintah Saudi akan menempatkan para petugas yang melakukan pemeriksaan secara berkala, untuk memastikan seluruh jamaah di Armuzna memiliki smart card.

Pemerintah Arab Saudi telah menyia-kan sanksi berat bagi para pihak yang melanggar aturan tersebut.

"Ketentuan ini sengaja disampaikan sejak awal, bukan untuk menakut-nakuti. Sebab, kita justru ingin memberikan hak untuk jamaah haji yang sudah membayar. Sehingga, mereka bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan tenang dan nyaman," kata Ketua Masyariq, M Amin Indragiri, saat Rapat Koordinasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersama Masyariq dan pimpinan Maktab di Makkah, Kamis (6/6/2024).

Berikut Prosedur Penggunaan Smart Card saat Keberangkatan Jamaah ke Arafah:

1. Bus akan datang ke hotel jamaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode.

bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap Maktab.

7. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah sampai maktab di Arafah.
8. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jamaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah.
9. Dalam perjalanan dari Makkah ke Arafah, akan ada pemeriksaan (check point) yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum.

"Kami berharap proses ini akan berjalan tidak begitu lama. Ini bagian dari tantangan kita semua atas kebijakan baru yang diterapkan tahun ini. Tapi insya Allah, jika kerja sama antara maktab dan sektor perumahan jamaah haji Indonesia terjalin dengan baik,



Smart Card Jamaah Haji Indonesia

Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Smart Card sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).



Scan Barcode

Smart card bisa dipindai untuk mengetahui data



2. Jamaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun.
3. Petugas melakukan scan barcode pada Smart Card Jamaah, sehingga naman-nya muncul dalam manivest.
4. Jamaah yang sudah discan barcode dipersilakan menaiki bus.
5. Jika sudah penuh, manivest akan ditutup dan pintu bus akan disegel.
6. Bus berangkat menuju Arafah. Pintu

semua akan ringan. Ini tanggung jawab bersama," ungkap Amin Indragiri.

Amin menambahkan, pihaknya telah melakukan finalisasi persiapan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Persiapan itu antara lain berkenaan dengan listrik dan pendingin udara (AC).

"Alhamdulillah siang tadi sudah uji coba di Arafah. Selama enam jam listrik dan AC dihidupkan dan alhamdulillah berjalan dengan baik," pungkas Amin Indragiri. ♦



KEMENDAGRI BERSAMA KEMENTAN TEKEN MOU CETAK SAWAH RAKYAT WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman mengenai program cetak sawah rakyat.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini, dilaksanakan di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim.

Ia menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.

"Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri),

Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi.

"Kita harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing dan kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu didukung dan mana yang tidak," tambah Mendagri.



Terkait anggaran pertanian, Mendagri menjelaskan, Pemda dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Mendagri pun mencontohkan Pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian.

Sementara itu, daerah dengan PAD rendah diperlukan intervensi dari pemerintah pusat, agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.

"Nah daerah-daerah [dengan PAD rendah] ini, memang harus dibantu, karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, sehingga pertanian ya mereka tidak punya uang," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah maupun perwakilan Pemda, baik secara langsung maupun virtual.

Kemendagri Gelar Pencanangan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Penajam Paser Utara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum),

menggelar Pencanangan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Jadi inikan Kabupaten terdekat dengan ibu kota negara, bisa kita katakan juga penyangganya atau buffer-nya, sehingga kita lebih menyuarakan kepada seluruh Indonesia bahwa ini [ibu kota negara yang baru] supaya lebih dikenal

Pencanangan ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (8/6/2024).

"Jadi inikan Kabupaten terdekat dengan ibu kota negara, bisa kita katakan juga penyangganya atau buffer-nya, se-

hingga kita lebih menyuarakan kepada seluruh Indonesia bahwa ini [ibu kota negara yang baru] supaya lebih dikenal," kata Pelaksana Harian (Ph.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri, Togap Simangunsong, di Kalimantan Timur, Sabtu (8/6/2024).

Togap mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah untuk mengawali Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang akan berlangsung di seluruh Indonesia.

"Di sini kita start awalnya untuk seluruh Indonesia, kemudian nanti puncaknya sekitar nanti pada tanggal 17 Agustus yang akan datang," imbuhnya.

Togap menyebutkan, total bendera Merah Putih yang telah disebar di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 buah. Ia berharap, dengan adanya gerakan ini, dapat meningkatkan rasa nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia dan memperkuat rasa cinta kepada bendera Merah Putih.

"Bendera inikan lambang negara kita, jadi bagaimanapun ini akan lebih kita tingkatkan [rasa] semangat nasionalisme," tutupnya.

Pencanangan gerakan ini ditandai dengan kirab Bendera Merah Putih dari Masjid Agung Al Ikhlas Kabupaten Penajam Paser

Utara menuju Lapangan Upacara Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Kirab dibuka langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 1.500 peserta dari berbagai kalangan yang turut serta membawa bendera Merah Putih. Mereka di antaranya pasukan drumband, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan (Ormas), siswa-siswi SD, SMP, dan SMA,

Perkuat SDM Dukcapil, Pemprov Jateng Gelar Bimtek PIAK untuk ADB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Permadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berkomitmen meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Tekad ini diwujudkan dengan menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) di Hotel D'Emmerick, Salatiga, Jateng.

Sekretaris Dinas Permadesdukcapil

kegiatan Bimtek ini dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat di jajaran Dinas Dukcapil di seluruh wilayah Jateng,” kata Nur Kholis di Salatiga, Jumat (31/5/2024).

Selain narasumber dari Dinas Dukcapil daerah, Dinas Permadesdukcapil juga turut mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditjen Dukcapil mengirimkan Tim Kerja yang diketuai oleh



serta masyarakat umum.

Kirab ditutup dengan penyerahan bendera Merah Putih yang dibawa oleh Paskibra kepada Plh. Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Bupati Penajam Paser Utara, dan Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Penajam Paser Utara.

Provinsi Jateng, Nur Kholis mengatakan, Bimtek PIAK ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh administrator database (ADB) di Kantor Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.

“Kepada seluruh peserta agar mengikuti

analisis Dukcapil di Direktorat PIAK, Fensi Felicia.

Kemudian juga tenaga ahli Direktorat PIAK Ditjen Dukcapil, Syafrizal Fauzi juga memberikan paparan terkait bidang PIAK, di antaranya terkait jaringan komunikasi data (jarkomdat), aplikasi SIAK Terpusat, Identi-

tas Kependudukan Digital (IKD), serta keamanan data dan jaringan.

"Peran para ADB dalam pelayanan administrasi sangat penting dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam sistem. Itu sebabnya pemahaman dan keahlian terhadap tata kelola SIAK Terpusat menjadi kunci," kata Syafrizal.

Sementara itu, Analis Dukcapil Subdit SIAK Fensi Felicia mempersilakan kepada seluruh peserta berkoordinasi ke tim pusat, jika menemukan kendala yang terkait

nas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, antara lain dalam pelaksanaan penerapan IKD," kata Handayani Ningrum.

Direktur Bintur Imbau Nomenklatur Dukcapil Tak Digabung Urusan Pemerintahan Lain

Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Andi Kriarmoni mengimbau, nomenklatur Dinas Dukcapil tidak digabung dengan urusan pemerintahan lain.

Karena itu, Dinas Dukcapil harus diatur secara tegas dan jelas dengan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota.

"Juga tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya sebagaimana tercan-

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita harus terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas aparatur agar dapat menjawab tantangan zaman," tambah Andi.

Andi menambahkan, bahwa pihaknya di pusat siap memberikan dukungan penuh kepada daerah, untuk memastikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan optimal.

Andi berharap, kunjungannya ke Padang kali ini, makin menguatkan sinergi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar.

"Sehingga pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah ini dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya.



jarkomdat maupun aplikasi SIAK.

Sebelumnya, Direktur PIAK, Handayani Ningrum mengatakan, tim teknis dan tenaga ahli Direktorat PIAK agar selalu siap membantu Dinas Dukcapil daerah.

"Ini mengingatkan Subdit SIAK juga harus mampu memberikan konsultasi kepada Di-

tum dalam Pasal 16 dan Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020," kata Andi Kriarmoni, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Senin (3/6/2024). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar.

Dalam lawatannya, Andi memberikan pembinaan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku di Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar. Andi menekankan pentingnya peningkatan kinerja pelayanan Dukcapil.

"SOTK adalah kunci utama untuk

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Hansastri menyambut baik masukan dan arahan yang diberikan Direktur Bintur Dukcapil.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan arahan dari Ditjen Dukcapil. Semoga dengan dukungan ini, pelayanan Dukcapil di Sumatera Barat bisa semakin baik dan memuaskan masyarakat," lanjutnya.

Selain Sekda Hansastri, kedatangan Andi Kriarmoni juga disambut oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besti Rahmad, dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumbar Fitriati. ♦



PEMOTONGAN HEWAN KURBAN IDUL ADHA 1445 H DI LINGKUNGAN KEMENDAG

Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H, Unit KORPRI Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaksanakan pemotongan hewan kurban yang berlangsung di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) PT Cianjur Arta Makmur, di Cianjur, Jawa Barat.

Hewan kurban berupa Sapi diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Muhammad Suaib Sulaiman selaku Ketua Panitia Idul Adha 1445 H Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada pemilik RPH PT Cianjur Arta Makmur, selaku penyedia hewan kurban, Tria Agus Bayuseno.

Suaib menjelaskan bahwa alasan pemotongan hewan kurban dilakukan di RPH dengan pertimbangan utama, yaitu kebersihan dan efektivitas, sehingga kebersihan daging hewan kurban tetap terjaga.

Lebih lanjut, Suaib mengatakan, bahwa pelaksanaan pembagian hewan kurban terdiri atas dua bentuk, yaitu hewan hidup, yang disalurkan kepada Yayasan dan Masjid/Mushola yang mengajukan permohonan kepada panitia, serta pembagian daging kepada mustahik di lingkungan Kemendag.

Pada perayaan Idul Adha tahun 1445 H/2024, panitia Idul Adha Kementerian Perdagangan telah menerima hewan kurban berupa Sapi sebanyak 70 ekor dan Kambing sebanyak 104 ekor. Hewan kurban berasal dari para pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 ekor sapi dipotong di RPH dan sisanya hewan hidup didistribusikan kepada Yayasan, Masjid, dan Mushola.

Daging Sapi yang telah dipotong melalui RPH dibagikan kepada 2.500 mustahik di lingkungan Kementerian Perdagangan oleh pimpinan Kementerian Perdagangan pada Rabu (19/6/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H, melakukan peninjauan di Rumah Potong Hewan (RPH), Ciroyom Depot, Bandung, pada Sabtu (15/6/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memeriksa kesiapan RPH dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 H, Senin, 17 Juni 2024.

Mendag pun mengajak masyarakat untuk menitipkan proses pemotongan hewan kurban di RPH. Pemotongan hewan di RPH sudah profesional karena sudah melalui proses antemortem dan postmortem, untuk menjamin kelayakan daging kurban. Setelah proses antemortem terdapat barcode yang berisi data dan bisa dicek melalui aplikasi.

RPH Ciroyom Depot, Bandung merupakan rumah potong hewan yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan kapasitas 30-40 ekor sapi per hari. Menjelang Idul Adha, kapasitasnya bisa meningkat mencapai 100 ekor per hari.

Produk Dekorasi Rumah Indonesia Memikat di Pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024

Produk dekorasi rumah Indonesia tampil memikat di pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024 yang diselenggarakan pada 12 - 14 Juni 2024 di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang.

Dalam pameran tersebut, produk Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi senilai Rp13,6 Miliar. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Merry Maryati berharap, keikutsertaan Indonesia pada pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024 dapat memperkenalkan produk berbasis desain asal Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di pasar global. Partisipasi dalam pameran ini akan membuka kesempatan penetrasi produk berbasis desain asal Indonesia di pasar Jepang dan global.

"Kemendag memiliki misi memperkenalkan kemampuan, keahlian, dan desain terbaik produk-produk Indonesia. Melalui peran perwakilan perdagangan di luar negeri, Kemendag akan terus membuka akses pasar untuk penetrasi produk-produk kreatif dan orisinal karya anak bangsa. Selama pameran diharapkan dapat terjalin kontrak dagang dengan mitra dagang potensial di Jepang dan kawasan sekitarnya, serta membuka pintu bagi produk Indonesia yang akan memasuki pasar global," kata Merry Maryati di Jepang, Rabu (12/6/2024).

Interior Lifestyle Tokyo 2024 merupakan pameran internasional tahunan yang berkonsep business to business (B to B) yang diselenggarakan Messe Frankfurt.

Pameran ini menampilkan produk-

produk kreatif yang berkaitan dengan rumah dan gaya hidup, seperti designed gift items, fesyen, peralatan makan, makanan, furnitur mewah dan eksklusif, serta dekorasi interior.

Produk yang ditampilkan tersebut, menekankan pada pembuatan produk ramah lingkungan, pemanfaatan barang lama dengan fungsi baru (upcycling), serta perdagangan yang adil (fair trade).

Pameran ini terbagi dalam 10 zona utama dan dua zona pendukung. Kesepuluh zona utama tersebut, yaitu Japan style, movement, kitchen life, home, ethical, accent, every day, creative resource, exterior, dan foodist.

Sedangkan zona pendukung terdiri atas zona talents dan next. Pada pameran

Osaka).

Atase Perdagangan Tokyo, Merry Indriasari menyatakan, partisipasi pada pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024 akan mendorong produk Indonesia untuk memiliki standar kualitas produk dan desain yang tinggi.

"Paviliun Indonesia merupakan etalase bagi produk dekorasi rumah Indonesia. Keikutsertaan pameran ini diharapkan semakin mendapatkan tempat di hati konsumen Jepang. Diharapkan produk Indonesia semakin memiliki standar kualitas produk dan desain yang tinggi," ungkap Merry.

Sementara Kepala ITPC Osaka, Didi Akhdiat Suryo, menjelaskan, material produk yang ditampilkan Paviliun Indo-



an, Paviliun Indonesia berada pada zona home dengan memfasilitasi lima pelaku usaha yang terpilih melalui proses kurasi.

Pelaku usaha tersebut terdiri atas pelaku usaha peraih Good Design Indonesia (GDI) dan Good Design Awards 2023, serta peserta program pendampingan Designer Dispatch Service (DDS).

Adapun produk yang ditampilkan terdiri atas keranjang dekoratif, wadah serbaguna, hiasan dinding, lampu, serta produk furnitur kecil. Ajang GDI sendiri merupakan ajang penghargaan desain untuk produk Indonesia yang terafiliasi dengan Good Design Award Jepang.

Kehadiran Paviliun Indonesia pada Pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024 merupakan hasil sinergi Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Japan External Trade Organization (JETRO), Atase Perdagangan Tokyo, serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC

nesia menyesuaikan minat konsumen Jepang yang menekankan pada fungsional produk dan material yang ramah lingkungan.

"Produk-produk yang ditampilkan adalah produk berdesain khusus dan diolah dari material yang ramah lingkungan," ujar Didi.

Ekspor produk dekorasi rumah Indonesia ke Jepang dalam lima tahun terakhir (2019 - 2023) terus meningkat dengan tren sebesar 3,65 persen. Sementara pada 2023, ekspor produk ini ke pasar Jepang tercatat senilai USD 38,94 juta.

Ekspor produk dekorasi rumah Indonesia ke dunia dalam lima tahun terakhir (2019 - 2023) juga terus meningkat dengan tren sebesar 11,19 persen. Untuk periode Januari - Maret 2024, ekspor produk dekorasi rumah Indonesia ke dunia tercatat sebesar USD 59,43 juta, naik 10 persen dari ekspor tahun 2023 yaitu USD 54,06 juta. ♦

MENHUB INSTRUKSIKAN PELINDO PERCEPAT PENANGANAN ROB DI PELABUHAN TANJUNG EMAS

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menginstruksikan kepada jajaran Pelindo untuk mempercepat penanganan rob di Pelabuhan Tanjung Emas.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menginstruksikan kepada jajaran Pelindo untuk mempercepat penanganan rob di Pelabuhan Tanjung Emas.

Hal tersebut disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

“Rekayasa konstruksi harus dilakukan secara lebih tepat. Lalu, saya minta agar dipercepat. Karena, kalau tidak cepat, barang-barang di Jawa Tengah jadinya tidak semuanya ke Pelabuhan Tanjung Emas, sebagian akan ke Jakarta atau Surabaya. Hal ini membuat ongkos logistik bisa menjadi lebih tinggi,” kata Menhub Budi karya Sumadi, di Semarang, Minggu (16/6/2024).

Jika diakumulasi rob di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang telah mencapai 11 sentimeter. Menhub mengatakan, akumu-

lasi tersebut terjadi karena tinggi rob yang datang mencapai 5 sentimeter dan daratan pelabuhan turun sebanyak 6 sentimeter.

Pelindo telah menganggarkan biaya sebesar Rp 1,2 Triliun untuk melakukan rekayasa konstruksi sebagai penanganan masalah tersebut. Pengerjaannya sudah dilakukan sejak tahun lalu dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2028.

Menhub mengatakan, Pelindo juga perlu mencari teknologi yang dapat menangani masalah tersebut secara permanen, seperti yang sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan Jakarta dan Surabaya. Sebab, kenaikan air laut akan terus terjadi.

“Kalau dibuat dengan struktur yang lebih baik lagi, maka rob ada, tapi penurunan pelabuhan tidak terjadi. Rob ini tidak hanya ada di Pelabuhan Tanjung Emas, tapi terjadi di seluruh Pantai Jawa,” tambah Menhub.



Kemenhub Raih Penghargaan Kolaborasi Aktif Arus Mudik Lebaran dari Polri

Kementerian Perhubungan meraih Penghargaan Kolaborasi Aktif Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Operasi Ketupat 2024 dari Kepolisian RI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi pada Acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun 2024 di Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Polri, yang telah berkerja sama menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

"Saya sangat mengapresiasi Kepolisian RI, khususnya Kakorlantas, yang sudah mampu bekerja sama dengan semua pihak, dan pada saat Lebaran kemarin, dapat bertindak tegas namun tetap humanis, sehingga penyelenggaraan arus mudik dan balik, berjalan lancar dan nyaman," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Yogyakarta, Rabu (12/6/2024).

Menhub menambahkan, meski sudah berjalan baik, namun Kemenhub tetap menyampaikan sejumlah evaluasi dan usulan perbaikan dalam penanganan arus mudik dan arus balik lebaran.

"Dalam rapat terbatas dengan Presiden, kami merinci apa saja yang harus ditingkatkan pada waktu mendatang, sehingga di waktu mendatang, mudik itu masalah-masalahnya lebih berkurang," tambah Menhub.

Evaluasi ini akan dilakukan di seluruh sektor Perhubungan. Beberapa hal yang signifikan untuk dilakukan di sektor darat adalah Kemenhub meminta agar rest area dapat ditambahkan kira-kira menjadi 14 rest area di Pulau Jawa.

Sementara untuk penyeberangan, Menhub berharap, semua sistem sudah berjalan secara elektronik dan terjadwal, sehingga tidak terjadi penumpukan di sekitar pelabuhan penyeberangan. Menhub juga menilai, perlu dilakukan penambahan pelabuhan di sekitar Merak.

"Untuk sektor laut dan perkeretaapian, kita harus menambah kuota program mudik gratis. Lalu di udara, kita minta operator lebih aktif untuk memberikan layanan yang baik," ungkap Menhub.

Penghargaan yang sama, juga diperoleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diterima langsung oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy.

"Terima kasih atas penghargaan ini. Sejak 2021, kita selalu bersama-sama menangani mudik, Polri, Kemendikbud, dengan

Kemenhub dan Kemen PUPR. Terima kasih atas kerja samanya selama ini sehingga dari waktu ke waktu penanganan arus mudik Lebaran semakin baik, angka kepuasan masyarakat pun semakin naik," kata Menko PMK.

Penghargaan dari Polri ini, menjadi indikator, sekaligus acuan agar pemerintah, kepolisian serta seluruh pihak terkait, dapat terus melakukan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran di masa yang akan datang.

Gandeng Pemda dan Pengelola Tempat Wisata, Menhub Ingatkan Masyarakat Gunakan Dalam memasuki libur panjang sekolah dan Hari Raya Idul Adha 1445 H, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Saloka Theme

wisata, untuk mengedukasi Masyarakat, agar saat datang ke tempat wisata menggunakan bus yang sudah di ramp check dan memiliki pengemudi yang baik. Karena menggunakan bus yang terpercaya dan pengemudi yang memiliki kapabilitas, biayanya tidak terlalu mahal," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Saloka Theme Park, Semarang, Minggu (16/6/2024).

Menhub menambahkan, saat ini masyarakat bisa memeriksa keamanan dan kelengkapan bus pariwisata secara mandiri, dengan memasukan nomor kendaraan pada web <https://mitradarat.dephub.go.id>.

"Dengan begitu, masyarakat bisa ikut berperan mengecek kondisi bus," imbuhi Menhub.

Sementara itu, General Manager Saloka



Park, Kabupaten Semarang.

Dalam kunjungannya tersebut, Menhub menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dan pengelola tempat wisata, untuk bersama-sama mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan bus laik jalan, bersama pengemudi yang telah memenuhi syarat keamanan dan keselamatan.

Adapun bus yang laik jalan adalah bus yang sudah melalui uji kendaraan berkala dan memiliki kelengkapan surat-surat. Bus juga harus dikendarai oleh pengemudi yang berkapabilitas.

"Saya minta kepada Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan General Manager Saloka Theme Park, untuk menginformasikan ini kepada rombongan-rombongan, adalah tugas bersama antara regulator dan pengelola

Theme Park, Johannes Harwanto mengatakan, libur panjang menjadi salah satu waktu yang banyak dipilih masyarakat untuk berlibur, sehingga jumlah orang yang berwisata naik.

"Pada puncak libur sekolah, kunjungan mencapai 8.000 orang dengan sekitar 160-an bus. Untuk area parkir tersedia hingga 5 hektar dengan kapasitas 200 kendaraan, sehingga secara kapasitas tidak membebani bahu jalan," kata Johannes Harwanto.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirullah; serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati. ♦

PENCAPAIAN INFLASI INDONESIA TERKENDALI, MENKO AIRLANGGA UNGKAP STRATEGI KEBIJAKAN 4K SEKTOR PANGAN

Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84 % (yoy), terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289 % yoy), Turki (75,45 % yoy), dan Rusia (7,84 % yoy).

Capaian ini tidak terlepas dari hasil konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan didukung oleh GNPIP.

Hla tersebut, disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang bertemakan "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung

Stabilitas Harga", di Istana Negara, Jumat (14/6/2024).

Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan.

Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture).

Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah.

Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga, di tingkat Pusat dan



Daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi guna membangun landasan yang solid bagi pencapaian sasaran inflasi tahun 2025-2027, masing-masing sebesar $2,5 \pm 1\%$, di tengah risiko dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global dan tantangan struktural yang masih mengemuka.

"Sesuai dengan strategi kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, sehingga inflasi tetap terjaga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua TPIP.

Menko Airlangga mengatakan, bahwa strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dilakukan melalui beberapa hal.

Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah, telah berhasil menahan

kenaikan harga pangan lebih tinggi.

Kedua, peningkatan produksi domestik di antaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Sedangkan dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar Kementerian/Lembaga juga perlu dioptimalkan.

Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu untuk dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah, serta penyediaan data pangan yang akuntabel.

Saat ini telah tersedia data harga secara real time dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengem-

banan.

"Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor," kata Menko Airlangga.

Setelah itu, sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah, dalam kesempatan tersebut diumumkan pemenang TPID Awards 2024.

Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Kinerja Terbaik untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta TPID Berprestasi untuk Kabupaten/Kota.

Pemenang TPID Award 2024 adalah sebagai berikut:

a) Wilayah Sumatera

Provinsi: Kepulauan Riau,

- Kab/Kota Terbaik: Kota Pekanbaru,
- Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Tanah Datar.

b) Wilayah Jawa-Bali

Provinsi: Jawa Tengah,

- Kab/Kota Terbaik: Kota Madiun,
- Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Kebumen.





c) Wilayah Kalimantan

Provinsi: Kalimantan Selatan,

- Kab/Kota Terbaik: Kota Banjarmasin,
- Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Kutai Kartanegara

d) Wilayah Sulawesi

Provinsi: Sulawesi Tenggara,

- Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Bone,
- Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Boalemo.

e) Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

Provinsi: Nusa Tenggara Barat,

- Kab/Kota Terbaik: Kota Mataram,
- Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Lombok Barat.

Tingkatan Produktivitas dan Daya Saing SDM Indonesia, Pemerintah Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi, serta PDB terbesar kelima dunia.

Untuk mewujudkannya, pengemban-

gan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama, yang perlu menjadi fokus bersama. Apalagi dengan adanya peluang bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, Indonesia berpotensi besar untuk memanfaatkan peluang itu jika dapat mempersiapkan SDM dengan baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi pada upaya merevitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau Technical Vocational Education and Training (TVET).

Hal itu dijalankan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022. Salah satu poin penting dalam Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah meningkatkan keterlibatan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam kegiatan vokasi, seperti penyusunan standar kompetensi, kurikulum, penyediaan tempat magang, dan penyediaan pelatihan.

Paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi yang sebelumnya masih supply driven, juga sekarang diarahkan menjadi demand driven yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Perpres No. 68 Tahun 2022 itu juga menekankan pentingnya kolaborasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L),



Pemerintah Daerah, DUDI, serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Upaya penguatan kolaborasi ini dilakukan melalui Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) di tingkat nasional, maupun TKDV di tingkat daerah.

"Diharapkan dengan kolaborasi berbagai pihak, kita dapat mempersiapkan SDM yang dapat menjawab kebutuhan industri (demand side), dan memperoleh input yang sesuai untuk mempersiapkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja (supply side)," kata Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Moh. Rudy Salahuddin, dalam acara Penutupan Proyek TVET System Reform 2.0, di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Proyek TVET System Reform 2.0 (TSR 2.0) sendiri merupakan upaya kerja sama antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Lembaga Kerja Sama Pembangunan Jerman, yang diimplementasikan oleh The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Republik Federal Jerman.

Proyek ini bertujuan mendukung pelaksanaan elemen-elemen kunci dari agenda reformasi Pemerintah Indonesia dalam bi-

dang TVET, termasuk dalam hal ini Strategi Nasional (Stranas) Vokasi.

Sebagai acara penutupan Proyek TRS 2.0 yang berakhir pada Juni 2024 ini, Kemenko Perekonomian didukung oleh GIZ



Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi pada upaya merevitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau Technical Vocational Education and Training (TVET).

menggelar konferensi bertajuk TVET Partnership: Shaping the Future of Indonesia's Vocational System.

Konferensi ini bertujuan menegaskan kembali pentingnya TVET dalam agenda nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan SDM.

Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan talkshow yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama bertema "Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi", dan sesi kedua bertema "Navigating TVET through Dynamic Environment".

Proyek ini juga menginisiasi pelatihan-pelatihan in-company master trainer untuk selanjutnya melatih pelatih tempat kerja yang disebarkan ke seluruh industri.

Kolaborasi TSR 2.0 juga menginisiasi penggunaan alat virtual reality (VR), instrumen digital yang sangat efektif untuk membantu pembelajaran vokasi, mulai dari mengatasi kekurangan guru hingga menghemat biaya praktik kerja.

"Saya yakin, hasil dan legacy yang ditinggalkan dari agenda bersama ini akan berdampak dan berkelanjutan. Kami berharap kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman dapat terus berlanjut ke depan dalam rangka memajukan TVET System di Indonesia, guna menghasilkan SDM yang terampil, berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ke depan," kata Deputy Rudy. ♦



TVET PARTNERSHIP: Shaping the Future of Indonesia's Vocational System

Jakarta, 12 Juni 2024



TUKAR PIKIRAN DITUNJUK ATAU DIPILIH

Terjadi tukar pikiran dalam Rapat Kerja antara Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR. Topiknya tentang kepala daerah yang ditunjuk dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Belum ada simpulan akhir.

Memang, sebelumnya sudah berkembang wacana mengenai dampak positif-negatif pengangkatan pejabat kepala daerah. Baik itu Bupati, Wali Kota maupun Gubernur. Para pejabat kepala daerah itu menggantikan pejabat yang dipilih melalui Pilkada namun sudah habis masa jabatannya sebelum berlangsung Pilkada serentak 2024.

Alhasil, terjadi silang pendapat tentang pejabat kepala daerah itu. Wacananya ternyata sampai juga di parlemen, lembaga legislatif tempat para wakil rakyat menyuarkan aspirasi konstituennya. Demikian antara lain yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian.

Dalam tukar pikiran itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menyebut 40 persen pejabat (Pj) kepala daerah yang sedang bertugas saat ini tidak layak dalam memimpin daerahnya masing-masing. Junimart menduga

Kemendagri mengambil Pj kepala daerah ini dari kementerian lain sehingga kurang memahami bagaimana cara mengelola tata pemerintahan.

"Bukan hanya pengamatan. Yang kami dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak jadi Pj. Kenapa bisa demikian? Mungkin stok di Kemendagri sudah habis, dan akhirnya mengambil dari kementerian lain. Yang Saudara Menteri tidak paham tentang pola pikir, dan mereka tidak paham mengenai tata kelola pemerintahan," ujar Junimart dalam Raker yang berlangsung Senin, 10 Juni 2024.

"Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan bahwa untuk dua tingkatan Pj, ada pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; menurut kami ini bukan jadi patokan utama. Saudara Menteri dan harus lihat juga bagaimana track record dari para Pj. Apakah dia mampu, apakah dia memang paham?" sambungnya.

Junimart mengatakan pula, ada se-



orang Pj kepala daerah yang sebenarnya paham, tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Contohnya adalah Pj kepala daerah di Papua Barat Daya. Junimart merasa orang itu sudah tidak bisa dipertahankan.

"Sangat mempermalukan bangsa dan negara ini, sangat mempermalukan Pak Jokowi juga. Bagaimana mungkin mendudukkan peletakan batu pertama itu bersejarah, tapi batunya tidak bersejarah. Pak Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, batunya hilang dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana. Ini bagaimana Saudara Menteri dan PJU dan pak sekjen, para dirjen harus bisa menyikapi ini? Ini tidak boleh terulang," kata Junimart.

"Dan memang kami lihat terus terang Komisi II ke sana, pimpinan dan para kapoksi, Pj itu harus punya empati dan harus punya malu. Anggaran sangat besar satu koma sekian triliun APBD-nya, belum lagi bantuan dari pusat. Ini Saudara Menteri ini mesti dicermati, kita tak perlu sebut nama tapi itu Papua Barat Daya," ujar Junimart yang juga menambahkan seorang Pj kepala daerah membutuhkan back up dari sekda yang lebih paham azas pemerintahan.

Menanggapi soal Papua Barat Daya, Mendagri Tito memohon maaf terkait kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya Mo-

hammad Musa'ad. "Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan," kata Mendagri.

Ia mengaku mengenal baik Musa'ad sebagai putra asli Fakfak, Papua Barat, yang merupakan akademisi, dan birokrat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Waktu saya Kapolda Papua, dia adalah think tank (pemikir, red.) utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengaku kaget ketika mendapatkan laporan kinerja yang kurang baik dari Musa'ad. "Saya langsung tegur keras sekali yang bersangkutan, termasuk juga saat batu (batu pertama peresmian kantor Gubernur Papua Barat Daya, red.) hilang itu saya keras sekali menegur, dan saya segera langsung ingatkan ke (penjabat, red.) Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan," katanya.

Dalam Raker itu berkembang pula wacana tentang positif-negatif Pilkada langsung. Untuk hal ini Mendagri mengemukakan Pilkada langsung bisa menghambat pembangunan. Menurut dia, Pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tak akur karena urusan politik.

"Kita melihat bahwa ini momentum un-

tuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota," ujar Tito.

Ia menyebutkan, perbedaan partai politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan. Dalam pandangan Tito, situasi itu menyebabkan pembangunan tak optimal dan merugikan masyarakat.

"Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," ungkapnya.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa situasi tersebut berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Alasannya, para penjabat ditunjuk langsung, bukan merupakan kader parpol, dan tak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

"Karena mereka tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, dan lain-lain... Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik,





ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik," kata Tito.

Mendagri juga mengemukakan telah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyeleksi calon penjabat kepala daerah yang ditunjuk. "Sudah melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kemudian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BIN (Badan Intelijen Negara), Kejaksaan Agung, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) untuk masalah hu-

kum," kata Tito.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan yang menyebut Kementerian Dalam Negeri telah kecolongan dengan adanya lima orang penjabat kepala daerah yang tersandung masalah hukum. "Cuma satu saja dari lima itu yang masalahnya terjadi di zaman dia (menjabat sebagai, red) Pj (penjabat kepala daerah), yaitu di Sorong (Yan Piet Mosso, red) kena OTT (operasi tangkap tangan) berkaitan dengan oknum BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan), tetapi empat lainnya adalah peristiwa lama," jelasnya.

Tito menduga peristiwa lama untuk empat penjabat kepala daerah yang tersandung kasus hukum terjadi karena mereka diisukan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. "Ada kecenderungan peristiwa itu diangkat kembali ketika yang bersangkutan angin-anginnya mau naik, ikut pilkada. Di Bandung Barat, misalnya, yang di Tanjungpinang kan masih camat. Peristiwa yang kita saja belum tentu tahu, catatannya juga mungkin enggak ada, baru munculnya saat ada laporan," ungkapnya.

Selain mantan penjabat bupati Sorong, penjabat bupati Bandung Barat, dan penjabat wali kota Tanjungpinang, terdapat mantan penjabat bupati Bombana dan penjabat bupati Kepulauan Tanimbar yang tersandung kasus hukum. Sebagai catatan, belum ada informasi Pj kepala daerah di Kalimantan yang tersandung masalah hukum.

Tanggapan datang dari Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardy Gaus. Ia menegaskan tidak setuju dengan usul Mendagri Tito Karnavian yang mengindikasikan tidak perlu ada pilkada supaya lebih hemat biaya.

"Saya berkehendak bahwa dengan



adanya proses penunjukan itu, yang Bapak katakan tanpa biaya, tidak punya beban, dan sebagainya, saya tidak menginginkan ini adalah alat legitimasi bahwa kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi itu akan ditunjuk. Itu tegas saya ungkapkan," ujar Gusparda.

Menurut dia, lebih tepat jika pemerintah melakukan pembenahan terhadap demokratisasi di kontestasi pilkada. Alasannya, belakangan ini Pilkada kerap disebut menimbulkan polarisasi hingga memerlukan biaya mahal.

"Ini jadi catatan penting bagi kita, kelemahan-kelemahan itu kita sisipi kepada hal-hal yang positif. Apa piranti-piranti daripada kelemahan-kelemahan itu. Bukan serta merta karena positif lebih banyak ditunjuk, lalu lebih baik kita tunjuk kepala daerah untuk periode berikutnya," kata dia.

"Kalau ini yang kita lakukan, saya khawatir kita tidak bicara tentang itu saja. Demokratisasi adalah suatu keniscayaan," ucap Gusparda.

Guspardi mengakui bahwa pilkada memang menimbulkan polarisasi, keaduan, dan membutuhkan biaya yang mahal. Namun, ia mengemukakan seharusnya ada perbaikan terhadap pilkada yang selanjutnya akan dilakukan.

"Tolong ada referensi yang akurat dalam rangka ke arah perbaikan terhadap

pelaksanaan pilkada. Goal-nya ke situ. Bukan ke arah bahwa karena dilakukan studi perbandingan bahwa lebih bagus ditunjuk langsung dibandingkan pemilihan lalu



Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota

goal-nya yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintah atau Mendagri," ujar dia.

Toh Mendagri Tito mengakui harus ada kajian dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data yang obyektif. "Kita ingin membuat studi nantinya, semacam

penelitian. Ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil Pilkada.

Kita ingin tahu juga. Selama ini mungkin kita hanya berdasarkan pengetahuan empirik, pengetahuan yang belum didasarkan dengan metodologi," sambungnya.

Mendagri pun menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera melakukan penelitian tersebut. Ia mengklaim, hasil temuan itu bakal disampaikan pada masyarakat, DPR, dan partai politik (parpol).

"Setelah itu kita enggak merekomendasi apapun, tapi kita akan memberikan masukan kepada hasilnya kepada publik, kepada DPR, partai politik untuk melihat kajian itu apapun hasilnya," ujarnya.

Dalam pandangannya, publik juga harus mempertimbangkan mana yang lebih baik apakah kinerja penjabat atau kepala daerah hasil Pilkada. "Kalau yang hasil pilkada lebih bagus itu akan memperkuat sistem pemilihan rekrutmen melalui Pilkada. Kalau ternyata yang ini yang lebih bagus kelompok yang hasil rekrutmen penugasan itu juga perlu menjadi pertimbangan," ujarnya.

Boleh jadi wacana ini masih akan berlanjut. Soal world view, pandangan dunia, ideologi, akan ikut mempengaruhi opini: Mau menunjuk atau memilih pemimpin? ♦



CIPTAKAN PILKADA MUBA DAMAI DAN TANPA KONFLIK

Guna mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang damai dan tanpa konflik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar peluncuran pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muba tahun 2024. Peluncuran Pilkada Damai berlangsung di Stale Berkuda Sekayu.

Pada kesempatan ini orang nomor satu di Kabupaten Muba, H Sandi Fahlepi hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

"Kita percaya, semua yang hadir di sini sependapat, bahwa Pilkada Damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan pemerintah juga telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusifitas dan keamanan selama Pilkada Serentak 2024," ungkapnya.

Pj Bupati Muba ini juga menyampaikan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan berpolitik bagi masyarakat. Pilkada juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen masyarakat, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari diri Bangsa Indonesia.

"Nilai-nilai demokrasi dimaksud adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan

teratur, penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju," ulasnya.

Saat ini sudah bukan trend nya lagi, masa kampanye diisi dengan kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Untuk itu, mari kita saling bekerja sama, sehingga pilkada Kabupaten Muba 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Muba telah kian cerdas dalam berpolitik. Saya atas nama Pemkab Muba tidak henti-hentinya mengingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu meningkatkan sinergitas dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang kita cintai ini. Mari kita turut serta menjaga suasana sejuk, aman dan kondusif menjelang pilkada serentak tahun 2024 dan bersama sama kita wujudkan Pilkada Damai dan Muba Zero Konflik," tuturnya.

Ketua KPU Kabupaten Muba Sigit Nugroho mengatakan, mereka tidak bisa bekerja



dengan sendiri namun membutuhkan kerjasama dari semua masyarakat Kabupaten Muba untuk dapat membantu menciptakan kondusifitas pada Pilkada Serentak nantinya.

"Salah satunya adalah sosialisasi agar rekan-rekan bisa membantu kami. Bahwasanya, pada tanggal 27 November tahun 2024 kita akan memilih calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Muba yang akan memimpin Kabupaten Muba selama 5 tahun akan datang. Semoga pada saatnya nanti pemilihan Cabup dan Cawabup di Kabupaten Muba berjalan dengan aman, damai dan penuh dengan kelancaran," terangnya.

Siapkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Secara terpisah Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi bersama KPU dan Bawaslu serta TNI-Polri di dalam Kabupaten Muba menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang telah ditetapkan pada Rabu 27 November 2024 mendatang.

"Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Mendagri. Pemkab Musi Banyuasin siap menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Semoga hasil Pilkada nanti bisa mendapatkan pemimpin yang potensial dan bisa membawa kemajuan daerah khususnya membawa wilayah Kabupaten Muba semakin Maju, dan kian terdepan," ungkap Sandi Fahlepi usai mengikuti rapat koordinasi terkait fasilitas dan dukungan Pilkada

serentak dengan Mendagri Tito Karnavian, secara virtual di ruang rapat Serasan Sekate.

Sandi Fahlepi juga mengajak KPU, Bawaslu dan TNI-Polri bersatu dan bersinergi untuk menjaga kondusifitas wilayah dan mensukseskan Pilkada serentak khususnya di Kabupaten Muba.

Terkait anggaran hibah, lanjutnya untuk KPU, Polres dan Kodim, sudah disalurkan semua dan diharapkan dapat digunakan secara akuntabel dan transparan.

"Saya juga mengajak mari kita terus bersinergi dan kompak karena ini sangat penting, ketika itu ada sesuatu permasalahan yang tidak kita inginkan pasti menjadi masalah nasional. Saya yakin dengan semangat dan bersinergi kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

Untuk pelaksanaan Pilkada di Muba ini, Kesbangpol Muba sudah mentransfer dana hibah Pilkada ke KPUD sebesar Rp 81.295.450.971, Bawaslu Muba sebesar Rp 25.805.826.200, Kodim 0401 Muba sebesar Rp 3.535.300.000 dan Polres Muba Rp

11.027.858.000.

"Tahap I tahun 2023 kita sudah transfer ke KPU Muba sebesar Rp 36.342.187.791 dan tahap II tahun 2024 sebesar Rp 44.553.263.180 jadi tahap I dan tahap II sudah ditransfer totalnya sebesar Rp 81.295.450.971. Bawaslu tahap tahun 2023 Rp 10.322.330.000 dan tahap II 15.483.406.200 sehingga total Rp 25.805.826.200, Kodim 0401 Muba sebesar Rp 3.535.300.000 dan Polres Muba Rp 11.027.858.000," urai Kepala Kesbangpol

dukung yakni KPU, Bawaslu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/ Polri, Papol dan Pasion, media dan masyarakat.

Selain itu, ia juga minta Pj Gubernur, Pj Bupati agar segera merealisasikan anggaran hibah Pilkada serentak tahun 2024.

"Tugas rekan rekan Pj Gubernur, Pj Bupati dan walikota itu mengisi kekosongan menjelang lahirnya pemimpin daerah yang dipilih rakyat. Untuk itu, kepada rekan rekan Pj Gubernur, Bupati dan walikota agar bisa menjalankan tugas dengan baik dan



Muba, Joni Martohonan.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa Pj Kepala Daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang kepala daerah definitifnya habis masa jabatan, supaya pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan. Tugas mereka sudah diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Mendagri Tito juga menekankan agar Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota dapat membangun sinergi antar elemen pen-

wewenang. Tolong jaga netralitas, kondusifitas dan tidak berpihak kepada salah satu partai politik atau pasangan calon Pilkada," terangnya.

Sementara bagi penjabat kepala daerah yang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota agar segera menyampaikan pengunduran dirinya kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon. ♦



PANTAU LANGSUNG KONDISI MASYARAKAT HINGGA KE RUMAH

Layanan prima yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus benar-benar sampai dan dirasakan. Guna memastikan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi Mahmud turun langsung memantau masyarakatnya hingga ke rumah-rumah dan layanan pemerintah.

Salah satunya dengan mendatangi RSUD Sekayu dan beberapa layanan kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekda Apriyadi Mahmud ingin memastikan pelayanan kesehatan kembali berjalan normal seperti biasa usai libur bersama perayaan Idul Adha.

"Alhamdulillah layanan kesehatan warga Muba di RSUD Sekayu tetap berjalan normal seperti biasa," ungkapnya.

Dikatakan, pelayanan publik terutama layanan kesehatan menjadi prioritas agar pelayanannya bisa dimanfaatkan warga.

"Jangan sampai kita lambat atau lalai melayani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sekayu dr Sharlie Esa Kenedy MARS mengatakan pelayanan kepada masyarakat di RSUD Sek-

ayu terus ditingkatkan demi memberikan layanan yang baik.

Ia menambahkan, saat ini RSUD Sekayu dengan support Pj Bupati Sandi Fahlepi bersama Sekda Muba Apriyadi Mahmud terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.

"Termasuk alat alat kesehatan yang terus di upgrade. Demi pelayanan yang prima untuk warga Muba," tandasnya.

Temui Warga Hingga ke Rumah

Bukan hanya melakukan pemantauan layanan pemerintah, Sekda Apriyadi Mahmud juga melakukan silaturahmi ke rumah-rumah warga pra sejahtera sekaligus membagikan daging kurban. Selain membawa daging kurban, mantan Pj Bupati Muba itu juga membawa paket sembako untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan.

Kunjungan Sekda, Apriyadi Mahmud ini disambut gembira warga pra sejahtera. Selain dikunjungi mereka juga diberikan bantuan sembako dan daging kurban.

"Alhamdulillah bisa ketemu pak Apriyadi, kami juga dapat pembagian daging kurban dan sembako," ungkap Nurbaya salah satu warga Kelurahan Soak Baru Sekayu.

Senada diungkapkan warga perumahan becak Sekayu, Nuriyah. Ia mengaku, dirinya bersama keluarga tak menyangka kediamannya disambangi oleh Sekda Muba Apriyadi Mahmud.

"Kami doakan niat tulus pak Apriyadi untuk Kabupaten Muba ini diberikan ridho oleh Allah SWT," tuturnya.

Dojid, warga kampung 5 Sekayu juga mengaku sangat senang mendapat kunjungan dari Apriyadi Mahmud.

"Pak Apriyadi selalu rutin berbagi dengan masyarakat, semoga pak Apriyadi



Salah satunya dengan mendatangi RSUD Sekayu dan beberapa layanan kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin.

diberi kemudahan demi kebaikan Kabupaten Muba ke depan," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Apriyadi Mahmud mengatakan kunjungan ke rumah warga setiap Lebaran merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilakukan.

"Bagikan daging kurban sekaligus silaturahmi, rasanya sangat senang bisa jumpa langsung warga saat momen lebaran," ujar Mustasyar PCNU Muba itu.

Untuk itu dia mengajak, agar warga Muba terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan kondusifitas di Kabupaten Muba.

"Semoga sedikit oleh-oleh yang diberikan ini bermanfaat," tandasnya. ♦



7 AMALAN DI BULAN DZULHIJJAH BESERTA DALIL-DALILNYA

Islam mengenal dua perayaan hari besar yang disyariatkan, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Fitri yang bertepatan pada bulan Syawal, terdapat beberapa amalan atau ibadah yang khusus dilaksanakan pada bulan tersebut. Seperti melaksanakan puasa enam hari setelah hari pertama bulan Syawal.

Hal yang sama juga terjadi pada Hari Raya Idul Adha, yakni bulan Dzulhijjah. Pada bulan ini pun terdapat amalan tertentu yang keutamaannya hanya bisa didapatkan pada bulan Dzulhijjah.

Bahkan bulan Dzulhijjah ini termasuk dari empat bulan mulia yang tercantum dalam Surat Taubat ayat 36.

Terkait hal tersebut, Imam Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, menyatakan, yang dimaksud dengan Haram disini adalah apabila melakukan maksiat akan mendapatkan siksaan yang lebih berat, jika melakukan ketaatan saat bulan haram maka akan mendapatkan banyak pahala.

Ia juga mengilustrasikan bahwa perbedaan antara keempat bulan mulia dengan bulan lainnya, bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat.

Ia memberikan beberapa contoh, seperti hari Arafah menjadi berbeda dengan hari-hari lainnya lantaran terdapat beberapa ibadah khusus.

Berdasar pada penjelasan sebelumnya, bulan Dzulhijjah yang termasuk dari empat bulan mulia, sangat dianjurkan untuk menghidupkan ibadah-ibadah tertentu pada bulan tersebut.

Berikut 7 ibadah di bulan Dzulhijjah beserta dalilnya, yang dirangkum dari Nu Online:

1. Berpuasa pada 10 Hari Pertama

Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seorang Muslim disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa secara terus menerus, seperti yang tercantum pada hadits riwayat Imam Bukhari: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada amal ibadah yang lebih utama selain yang dikerjakan pada sepuluh hari ini (maksudnya sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah)".

Para sahabat bertanya: "Apakah sekalipun jihad di jalan Allah?". Rasulullah saw menjawab: "Sekalipun dari jihad. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada sedikitpun yang pulang dari padanya" (HR. Bukhari).

Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, para fuqaha (ahli

fiqh) menjadikan hadits ini sebagai dalil disunnahkannya berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dikarenakan kelaziman dalam melaksanakan puasa sebagai suatu amal.

2. Menghidupkan Malam 10 Hari Pertama

"Dari Qatadah, dari Ibnu Al-Musayyib, dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: Sepuluh hari pertama dalam Dzulhijjah merupakan hari yang sangat disenangi oleh Allah, karenanya beribadahlah pada-Nya, dirikanlah puasa dan hidupkanlah malam seperti meng-



hidupi Lailatul Qadar.” (HR. Imam Tirmidzi).

Selain berpuasa pada sepuluh hari pertama, pun dianjurkan menghidupi malam setiap harinya.

3. Memperbanyak dzikir (Tahlil, Tahmid, Takbir)

Disunnahkan pula memperbanyak dzikir, seperti memperbanyak bacaan tahlil, tahmid, dan dzikir. Sebagaimana hadits:

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad saw bersabda: Sepuluh hari pertama dalam Dzulhijjah merupakan hari yang sangat diagungkan dan disenangi oleh Allah, karenanya perbanyak ucapan tahlil, takbir, tahmid.” (HR. Imam Ahmad).

4. Beramal Shaleh

“Nabi Muhammad saw bersabda: be-

ramal shaleh di saat sepuluh hari pertama merupakan amal yang sangat disukai oleh Allah.” (HR. Imam Ahmad).

Ibnu Abbas berpendapat bahwa amal shaleh yang diutamakan merupakan amal shaleh secara umum.

5. Puasa Tarwiyah

Pada bulan Dzulhijjah disunnahkan pula melaksanakan puasa Tarwiyah yang bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Seperti yang dijelaskan Al-Qarafi:

“Menurut pendapat ulama mayoritas, berpuasa pada hari Tasu’a dan Tarwiyah disunnahkan. Sesungguhnya sudah disebutkan bahwa berpuasa pada hari Tarwiyah sama dengan puasa satu tahun, berpuasa pada bulan Haram dan Sya’ban, Dzulhijjah. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahwa berpuasa pada hari-hari tersebut setara dengan setahun.”

6. Puasa Arafah

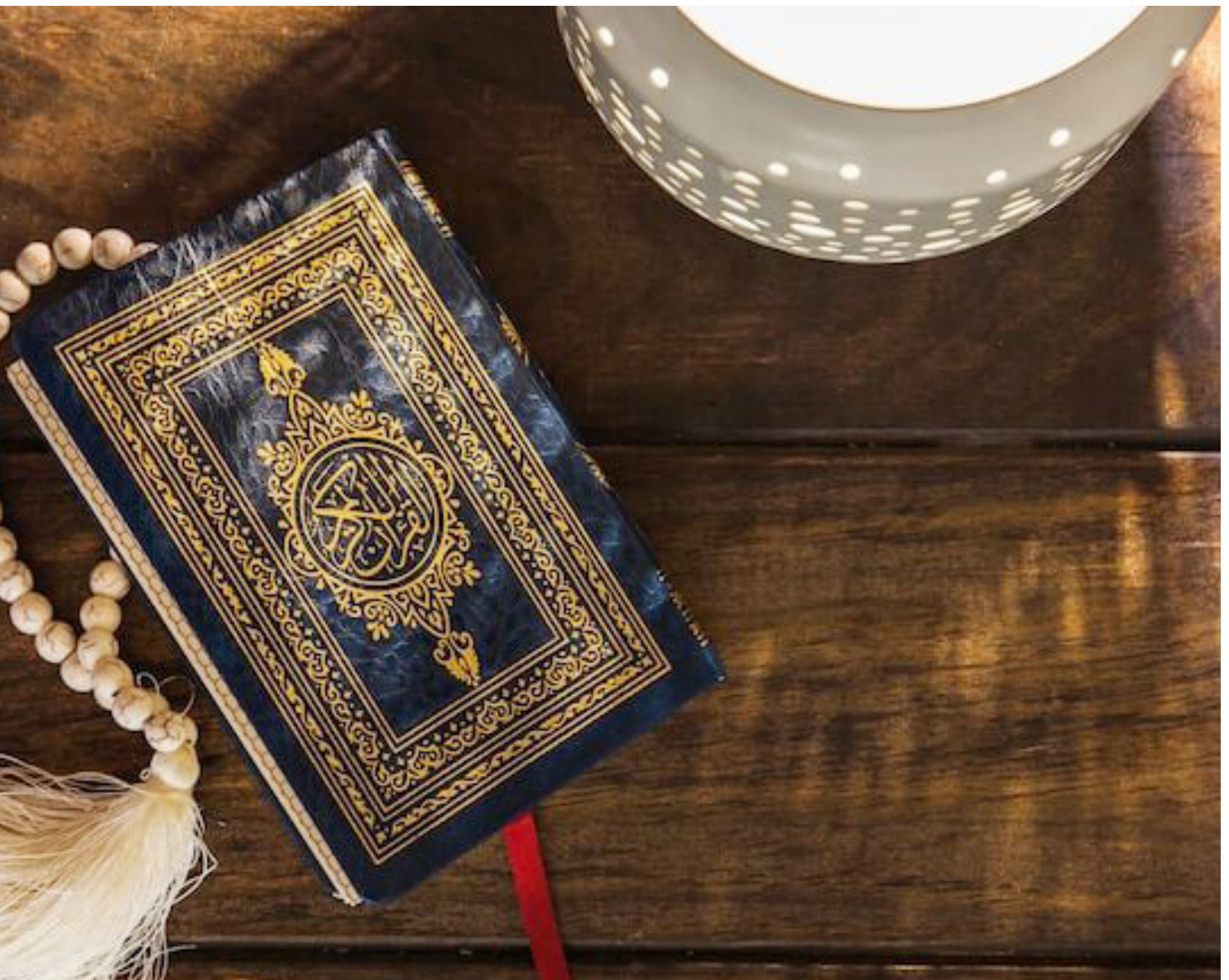
Setelah berpuasa pada hari Tarwiyah, lalu berlanjut berpuasa pada hari Arafah:

“Dari Abi Qatadah, berkata suatu ketika Nabi saw ditanya: bagaimana pendapatmu wahai Nabi mengenai puasa hari Arafah? Nabi menjawab: Puasa tersebut akan melebur dosa yang lampau maupun akan datang.” (HR. Imam Muslim).

7. Menunaikan Ibadah Haji

Tidak hanya termasuk dari rukun Islam, melaksanakan ibadah haji pun merupakan amalan yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah.

“Sudah sewajarnya bahwa haji lebih utama dari jihad, sebab peribadatan haji terkhususkan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun ibadah haji merupakan amal yang paling utama dilaksanakan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” ♦



Elen Setiadi SH MSE

PUTRA RIAU DIANGKAT SEBAGAI PJ GUBERNUR SUMSEL

Riau dan Sumatera Selatan memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Apa harapan untuk putra Riau yang bertugas sebagai Pj Gubernur Sumsel?

duduk sebagai komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara. Ia pun masih aktif sebagai komisaris PT Kereta Api Indonesia, badan usaha milik negara yang memiliki wilayah operasi di Sumsel hingga Lampung. Jaringan kereta api di Sumsel-Lampung, selain melayani penumpang, juga mengangkut batu bara milik BUMN PT Bukit Asam yang lokasi tangbangnya berada di Kabupaten Muara Enim.

Sebagai Komisaris di PT Kereta Api In-

donesia (KAI), Elen diangkat pada 5 Maret 2024 lalu berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN SK-61/MBU/03/2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII (2016-2019), Komisaris PT Bio Farma (2019-2021), Komisaris PT Angkasa Pura I (2021-2023), dan Komisaris PT Integrasi Aviassi Solusi (IAS).

Elen Setiadi lahir di Cerenti, Kuantan Singingi pada 1 September 1971. Ia menempuh pendidikan sarjana pada jurusan Hukum di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat (1995). Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister pada jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2006).

Ia juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti Negotiation, Conflict Resolution, and Meeting Management (2012) dan Capacity Building in Governance Economic Policy Coordination (2013).

Sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak 2020, Elen pernah menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016-2020). Selain itu, Elen Setiadi juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2015); Wakil Sekretaris Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2015).

Rekam jejak tugas birokrasinya antara lain menjabat Kepala Bagian Pelaksanaan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2007); Kepala Bagian Hukum Kementerian Koordinator Bidang

Elen Setiadi diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Selatan menggantikan Agus Fatoni yang ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Sementara tugas utama Agus Fatoni adalah Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Elen Setiadi juga masih aktif sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Titik temu keduanya adalah latar belakang bidang ekonomi dan keuangan meskipun berbeda kementerian. Pengaruh latar belakang itu pada akhirnya, sedikit-banyak, akan mewarnai kebijakan dan penugasannya di daerah. Agus Fatoni tampak jelas sangat hirau dengan penerapan kebijakan fiskal (anggaran), baik alokasi maupun penyebarannya ke berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

Sedangkan Elen, rekam jejaknya menunjukkan beberapa kali



Perekonomian (2007-2013); dan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013-2016). Ia mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2008 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2016 karena kesetiaannya terhadap Negara serta kecakapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nah, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Februari 2024, nama Elen sempat disebut-sebut akan menduduki

kang asal daerah akan berpengaruh juga dalam penugasan sebagai Pj Gubernur? Kelak akan diketahui dalam pelaksanaannya.

Toh dari sisi topografi, kondisi muka bumi, bentang alam Riau dan Sumsel memiliki banyak kesamaan, antara lain sungai-sungai yang mengalir di kedua provinsi. Sebagai catatan, Sumsel adalah wilayah perairan umum (sungai, danau, rawa) terluas di Asia Tenggara dengan luas sekitar 2,5 juta ha, manakala Riau memiliki hampir 2,2 juta ha areal serupa.

Nah, kesamaan topografi itu menga-

Sumsel memiliki sumber migas meski dalam skala berbeda. Namun, Sumsel memiliki batu bara lebih banyak. Sedangkan untuk perkebunan, sawit lebih banyak di Riau, namun untuk kopi Sumsel merupakan produsen terbesar di Indonesia.

Toh bukan soal sumber daya alam yang menjadi soal bagi kedua provinsi, melainkan tata kelolanya. Nah, dengan latar belakang hukum bisnis dan pengalaman sebagai komisaris beberapa BUMN, juga sebagai banyak hal yang dapat dilakukan Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumsel. Dalam kaitannya dengan hubun-



jabatan sebagai Pj Gubernur di kampung halamannya, Riau. Namun, ternyata ia malah menjadi komisari PT KAI pada Maret dan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sumsel pada Juni 2024.

Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sumsel, Sri Sulastri, mengkonfirmasi pengangkatan Elen menggantikan Agus Fatoni. "Iya, hari Senin dijadwalkan pelantikan Pj Gubernur Sumsel dan Gubernur lainnya," ujarnya, Sabtu, 22 Juni 2024.

Jadi, Pj Gubernur Sumsel akan beralih dari putra Lampung Agus Fatoni ke putra Riau Elen Setiadi. Apakah latar bela-

rah ke cara hidup masyarakatnya. Misalnya soal konsumsi dan budidaya ikan air tawar. Juga pusat-pusat pertumbuhan ekonominya. Harap diingat Palembang sebagai pusat pemerintahan Sumsel berada di tepian Musi, sedangkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berada di tepian Sungai Siak.

Banyak lagi kesamaan antara Sumsel dan Riau selain sisi topografi. Dari sisi budaya, keduanya sama-sama Melayu yang juga menjadi tuan rumah pendatang dari berbagai suku di Indonesia.

Dari sisi sumber daya alam, Riau dan

gan antara pemerintah pusat dan daerah, mungkin saja program tata kelola hutan terutama pemutihan perkebunan sawit yang menerobos hutan di Satgas Sawit menjadi tugas tambahan untuk Elen.

Tapi, pengembangan ekonomi daerah memang tak semudah membalik telapak tangan. Pertumbuhan ekonomi Sumsel yang lebih baik dan di atas rata-rata nasional sudah memadai sebagai target Pj Gubernur selama semester II 2024. Pada 2025, giliran Gubernur Sumsel terpilih hasil Pilkada serentak 2024 yang harus menunjukkan kinerja dan prestasinya. ♦



JUARA DUNIA TINJU TAK TERKALAHKAN SUDAH MUALAF GERVONTA DAVIS TETAP AKAN TERUS BERTARUNG SEPERTI MUHAMMAD ALI

Gervonta Davis (29) merupakan petinju profesional Amerika Serikat, Juara Dunia Kelas Ringan tak terkalahkan. Julukannya keren, yaitu tank. Sebab semua pertandingan dimenangkannya dengan Knock Out (KO), hanya 2 kali menang angka telak.

Banyak penantang sudah menunggu untuk memperebutkan gelar Juara Dunia Kelas Ringan dari tangan Davis, yang kini sudah memiliki nama Abdul Wahid setelah dirinya mualaf dan mengucapkan Syahadat pada Minggu, 25 Desember 2023.

Mualaf, Davis akan terus menjadi petinju. Ia mengikuti jejak idolanya petinju legendaris Cassius Clay alias Muhammad Ali dan Mike Tyson. Ia kagum akan kesalehan Muhammad Ali dan Mike Tyson, yang membuat mereka hidup bahagia tapi tetap tangguh di ring tinju.

Diberitakan Baltimore Banner, petinju tersebut mengucapkan Syahadat dan menerima nama barunya Abdul Wahid (Hamba Tuhan Yang Maha Esa). Namun saat itu, ia

belum secara resmi mengubah namanya melalui pengadilan.

Imam Hassan Abdi yang juga dikenal dengan panggilan Imam Hassan Somali, karena berasal dari Somalia, mengatakan kepada Baltimore Banner bahwa dirinya kagum dengan kepribadian Gervonta Davis.

Menyandang gelar Juara Dunia Tinju Kelas Ringan tak terkalahkan, menurutnya, Gervonta Davis sangat rendah hati. Fakta itu yang membuat Imam Hassan sangat terkejut. Ia tidak menyangka sosok yang begitu garang dan bersuara lantang di ring tinju, ternyata begitu bersahaja.

"Kerendahan hati yang saya dapatkan darinya - dan saya terkejut bertemu dengannya, karena saya tahu siapa dia tetapi

saya tidak tahu sejauh mana, Ternyata dia adalah orang yang sangat rendah hati," kata Imam Hassan.

"Pembicaraannya adalah tentang menjadi versi terbaik dari apa yang kita bisa sebagai manusia," kata Imam Hassan tentang keinginan Gervonta Davis sebagai seorang Muslim.

Kabar mualafnya Gervonta Davis mendapat sambutan hangat dari seluruh petinju dunia. Tak urung beberapa tokoh olahraga pertarungan, termasuk mantan juara kelas penjelajah WBC Badou Jack memberikan sambutan. Mereka mengucapkan selamat kepada Gervonta.

Jack menulis di X (sebelumnya Twitter): 'Selamat datang di Islam saudara @Gervontaa Alhamdulillah.'

Petarung MMA Movsar Evloev juga menyambutnya dengan menulis di media sosial: 'Semoga Allah memudahkan Anda dan menjaga Anda di jalan yang lurus. Selamat datang di Islam saudara @Gervontaa'.

Bintang MMA Movsar Evloev dan Ali Abdelaziz keduanya menyambut baik keyakinan barunya

Mantan manajer Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, juga menulis 'Mashallah' yang artinya 'Tuhan menghendaknya' dalam Bahasa Arab.

Mualaf, Keputusan Gervonta Davis yang Mengejutkan Dunia Tinju

KABAR Gervonta Davis telah mengucapkan Syahadat di Hari Natal 2023 membuat dunia tinju sangat terkejut. Ia mendapat liputan luas dari berbagai media olahraga,



petinju tersebut mengucapkan Syahadat dan menerima nama barunya Abdul Wahid (Hamba Tuhan Yang Maha Esa). Namun saat itu, ia belum secara resmi mengubah namanya melalui pengadilan.

terlebih pertarungan. Terutama karena keputusan itu dibuat Gervonta Davis saat dirinya berada di puncak kejayaannya sebagai juara dunia tinju.

Sehari setelah masuk Islam, Gervonta mengumumkan nama barunya, Abdul Wahid. Langkah Gervonta ini seperti mengikuti jejak Cassius Clay atau Muhammad Ali dan Mike Tyson atau Malik Abdul Aziz.

Saat ini Gervonta merupakan pemegang sabuk WBA kelas ringan. Itu diraih Gervonta setelah menumbangkan Mario Barrios pada 26 Juni 2021 lewat technical knockout atau TKO di ronde ke-11.

Setelah itu Gervonta berhasil mempertahankan sabuk juara dunianya empat kali. Empat petinju yang ditumbangkannya adalah Isaac Cruz, Rolando Romero, Hector Garcia, dan Ryan Garcia.

tor Garcia, dan Ryan Garcia.

Kiprah Gervonta di ring tinju memang fenomenal. Rekor tinjunya saat ini adalah 29 kali tanding dengan 27 knockout (KO) dan dua lainnya menang keputusan juri. Ia tak terkalahkan.

Gervonta sudah kenal dunia tinju sejak

Setelah menjalani 16 pertarungan tanpa kekalahan, yang kesemuanya diselesaikan lewat KO atau TKO, Gervonta berduel dengan Mario Antonio Macias untuk perebutan gelar juara dunia IBF kelas bulu super.

Ia lantas mendapatkan sabuk WBA



usia lima tahun. Ia dilatih Calvin Ford di sasana Upton Boxing Center di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Sentuhan Ford ini membuat talenta Gervonta terasah.

Saat berusia 17, ketika masih menjadi petinju amatir, Gervonta sudah meraih gelar National Golden Gloves Championship 2012. Gervonta juga meraih dua medali emas Olimpiade Junior.

Lelaki yang disebut sebagai 'the face of boxing' 2023 usai menumbangkan Ryan Garcia ini memulai karier profesionalnya pada 2013. Desi Williams adalah lawan pertamanya pada 18 Februari.

setelah mengalahkan Jesus Cuellar dalam duel unifikasi. Setelah itu Gervonta dua kali mempertahankan gelar, sebelum akhirnya naik kelas ringan.

Gervonta memutuskan naik kelas karena merasa tak ada lagi lawan setimpal di kelasnya. Ia pun langsung berhadapan dengan pemegang sabuk juara dunia WBA kelas ringan, Yuriorkis Gamboa.

Saat ini Gervonta bisa dibilang sebagai raja kelas ringan. Namun demikian petinju seperti Devin Haney, George Kambosos Jr, Teofimo Lopez, dan Vasilij Lomachenko siap menantangnya. ♦

Perjalanan Mualaf Dokter Tirta

SEJAK KECIL BELAJAR AGAMA ISLAM DAN KATOLIK

Dokter Tirta termasuk salah satu yang paling terkenal di Indonesia, karena banyak konten yang ia bagikan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Tidak hanya masalah kesehatan, dr Tirta sering juga sharing masalah-masalah sosial.

Terbaru, media kembali ramai memberitakan tentang proses mualaf dr Tirta yang sebetulnya sudah ia ceritakan pada 2020. Saat itu, dr Tirta menjadi bitang tamu di podcast Denny Sumargo.

Dari kisah itu terungkap, ternyata perjalanan hidup dr Tirta cukup berwarna. Ia lahir dari pernikahan orangtuanya yang berbeda agama. Ayahnya orang Jawa beragama Islam, sedangkan ibunya Jawa Tionghoa beragama Katolik.

Dengan kondisi orangtuanya yang demikian, Tirta kecil terbiasa belajar dua agama, Islam dan Katolik. Teman-teman bermainnya juga tidak mempersoalkan apa agama yang dia anut ketika itu. Sebab ayahnya seorang Muslim.

Di samping sering nongkrong di masjid bersama teman-teman sebayanya, Tirta kecil juga rajin ke Sekolah Minggu. Begitulah, mualafnya dia tidak sama dengan banyak orang yang tiba-tiba dapat hidayah.

Dokter Tirta menjadi mualaf tidak secara instan melainkan berproses panjang. Sampai ia yakin dirinya benar-benar sudah mendapat hidayah.

Trigger dirinya

mantap untuk memeluk agama Islam adalah saat dirinya masih di SMA, di mana ia melihat ayahnya menangis bercerita dengan ibunya. Bahwa sang ayah disarankan untuk tidak menunaikan ibadah Umrah.

Ayah dr Tirta saat itu dinilai sebagai seorang Muslim yang gagal. Ia gagal menjadikan istri dan anaknya menganut agama yang sama dengan dirinya Islam.

Ayahnya sudah dalam penerbangan ke Arab Saudi untuk umrah. Tapi di pesawat itu teman-teman rombongan umrah membully ayah dr Tirta, yang disebut bukan Muslim yang baik. Ia gagal menjadikan anak-anaknya Muslim.

Tangis sang ayah membuat hati dr Tirta terluka. Hal itu yang mendorong tekadnya kuat untuk memeluk Islam di usia 22 tahun, 5 tahun setelah ia mendengar cerita sedih ayahnya itu. Ia tak mau ayahnya terhalang masuk surga hanya karena dirinya tidak beragama Islam. Hidayah diperolehnya karena ia sangat berbakti kepada orangtuanya.

Mimpi Disuruh Masuk Rumah, Ternyata Milik Ustaz Pembimbingnya

Dokter Tirta memang sedikit banyak sudah memiliki pengetahuan tentang Agama Islam. Niat untuk mualaf sudah terbetik sejak lama, namun belum dilaksanakan.



akannya. Karena ia ingin mendapatkan sesuatu yang merupakan hidayah baginya.

Dan, yang diharapkannya itu tiba, hidayah yang diperolehnya melalui mimpi. Dalam mimpinya, dr Tirta merasakan tubuhnya diangkat oleh sosok misterius seperti malaikat. Ia dibawa ke sebuah bangunan besar berwarna hitam. Namun, saat ingin masuk ke bangunan tersebut, ia justru dilarang.

Malaikat tersebut justru menyuruhnya untuk masuk ke sebuah rumah warna hijau. Rumah tersebut (setelah ia bangun dari mimpi) rupanya mirip dengan kediaman sosok kiai yang mendampingi dr Tirta menjadi mualaf, yakni Kiai Zumroni.

"Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore dan gue lihat tubuh gue sendiri diangkat ke atas. Ada bangunan gede banget, item, ada dijaga dua malaikat. Gua mau masuk pintu enggak diizinkan. Sama malaikat disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau yang ternyata tuh itu adalah rumahnya Kiai Zumroni yang membuatku syahadat," katanya dilansir dari podcast Denny Sumargo.

Mimpinya agak panjang. Bukan hanya disuruh ke rumah berwarna hijau, dr Tirta masuk dan melihat ada 9 kiai dengan satu keranda hijau di tengah pengajian. Ia men-

gaku disuruh buka keranda tersebut dan ternyata ada orang. Bahkan, jenazah tersebut bangkit. Hanya saja wajahnya tidak kelihatan karena wajahnya bersinar.

Sosok tersebut lalu memberikan sebuah amplop pada dr Tirta, tanpa menyebutkan apa isinya. Tentu saja dr Tirta menanyakan isi amplop tersebut, namun sosok itu mengelak memberitahukannya.

"Tapi wajahnya enggak kelihatan, bersinar banget. Terus gue cuma dikasih amplop, dimasukkin ke saku. Gue tanya dong, 'Ini amplop apaan?'. 'Suatu saat lu

akan tahu apa yang harus lu lakuin', udah," katanya.

Walau itu mimpi di sore hari, dr Tirta yakin akan makna yang terkandung di dalamnya. Apalagi sejak mimpi itu, ia mendengar suara adzan di telinga 4 hari tanpa henti. Hal ini yang akhirnya membuatnya yakin bahwa hidayah telah datang padanya.

dr Tirta pun menjadi mualaf dengan bimbingan Kiai Zumroni, yang rumahnya ia lihat di dalam mimpinya beberapa hari sebelumnya. ♦



BUNGA MAWAR DAN KEMBANG SEPATU INDAH DAN WANGI, MEMILIKI SEJUTA KHASIAT DAN RASANYA NIKMAT

Bunga Mawar dengan keindahan yang cerah telah menjadi kebutuhan pokok dalam kesehatan dan kebugaran selama ribuan tahun, di samping peran pentingnya dalam memperindah segala suasana.

Bunga Mawar awalnya digunakan sebagai obat karena kemampuan alaminya untuk mendukung kekebalan tubuh, kesehatan kulit, peradangan, dan gejala yang berhubungan dengan PMS atau gangguan haid.

Ratu bunga ini secara tradisional telah digunakan untuk tujuan pengobatan dan budaya sejak abad ke-7 di Timur Tengah dan selama ribuan tahun dalam praktik Pengobatan Tradisional China.

Kelopak bunga dan bunga mawar utuh dikeringkan dan diseduh menjadi teh mawar, serta dioleskan untuk menenangkan kulit. Kedua budaya tersebut terus menggunakan mawar untuk keseimbangan fisik dan spiritual hingga saat ini.

Bunga penyembuh ini mengandung polifenol, antioksidan kuat yang melindungi tubuh Anda dari radikal bebas dan merusak sel. Bunga Mawar juga kaya akan vitamin dan mineral yang mendukung sistem kekebalan tubuh, mengandung sifat antibakteri, dan menenangkan stres dan kecemasan dengan aroma manisnya yang lembut.

Bagaimana mengonsumsinya? Bunga Mawar bisa dimakan begitu saja. Bisa pula dibikin jus, atau dikeringkan lalu diminum sebagai teh. Dijadikan es krim, dicampur dengan susu bisa.

5 ALASAN UNTUK RAJIN MENGONSUMSI BUNGA MAWAR

1. Bikin Glowing Bak Dewi dari Kayangan

Apakah Anda siap untuk mengetahui daftar alasan mengapa mawar akan membuat kulit Anda terasa diremajakan? Kaya akan vitamin A dan E berarti mawar akan menghidrasi dan mengencangkan kulit sekaligus mengurangi garis-garis halus yang mengganggu dan melembutkan lingkaran hitam.

Bunga Mawar juga mendukung produksi kolagen alami tubuh, protein tubuh kita yang bertanggung jawab untuk

kesehatan kulit, kuku, dan rambut.

Sarat dengan sifat anti-inflamasi dan antibakteri, mawar juga dapat membantu meredakan jerawat dan menenangkan kondisi kulit seperti eksim dan rosacea. Minumlah dan nyalakan.

2. Meredakan Gejala PMS yang Tidak Nyaman

Bosan dengan kram + kembung saat haid? Sifat anti inflamasi pada mawar dapat membantu meringankan gejala PMS yang tidak nyaman seperti kembung, kram, sakit kepala, dan mual.

3. Meningkatkan Mood dan Menceriakan

Penelitian telah menunjukkan bahwa mawar memiliki sifat meningkatkan suasana hati dan menghilangkan stres. Secara tradisional, bantuan untuk suasana hati yang rewel adalah dengan menghirup uap mawar dari teh.

Saat ini, kualitas mawar yang m e m - bang - kit -

kan semangat dapat dirasakan dengan menyeruput harumnya bunga mawar. Aromatik alami mendorong ketenangan, menghilangkan stres dan ketegangan, dan mendorong tidur nyenyak.



4. Meningkatkan Imun

Tahukah Anda mawar kaya akan vitamin C? Vitamin C mendukung produksi sel darah putih untuk membantu tubuh kita melawan infeksi, pilek dan flu.

Juga kaya akan antioksidan, mawar dapat membantu memerangi stres oksidatif dan efek radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit dan penuaan dini.

5. Menyehatkan Pencernaan

Merasa mual? Mengonsumsi bunga mawar dapat meredakan sakit perut, gas tidak nyaman dan kembung dengan cara memperlancar sistem pencernaan. Hal ini juga mendorong keseimbangan kembali flora usus yang sehat, tempat sebagian besar penyakit kronis bermula.

KEMBANG SEPATU BERBUNGA SEPANJANG TAHUN, KHASIATNYA SEGUDANG

KEMBANG Sepatu yang nama Latinnya *hibiscus rosa-sinensis* sudah berabad-abad dikenal sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun sebagian orang menganggapnya kurang menarik, sebab tidak tahan lama, hanya mekar pada waktu pagi dan layu di sore hari.

Kelebihan Kembang Sepatu sebagai tanaman hias antara lain dapat tumbuh di mana saja di Indonesia, mudah perawatannya, sangat disukai hewan ternak, bunganya aneka warna, dan berbunga sepanjang tahun.

Masyarakat zaman dahulu sering menggunakan daunnya sebagai kondisioner rambut, juga bisa dijadikan barut

ini sangat berkhasiat.

Khasiat Kembang Sepatu:

1. Menurunkan tekanan darah tinggi karena Kembang Sepatu memiliki kandungan anthocyanin yang menghambat enzim angiotensin-converting (ACE).
2. Berkhasiat anti kanker karena Kembang Sepatu mengandung kelompok senyawa flavonoid.
3. Rebusan dari akar kembang sepatu juga digunakan sebagai bahan kompres untuk meredakan pembesaran kelenjar tiroid pada penyakit gondok.
4. Teh Kembang Sepatu bisa mengatasi syndrome atau yang dikenal dengan nyeri perut
5. Menurunkan berat badan dengan cara meminum air rebusan Kembang Sepatu.
6. Kandungan kandungan antimikroba, flavonoid, anti jamur pada Kembang Sepatu juga bisa mengatasi infeksi saluran kandung kemih
7. Mengobati Diabetes Karena bunga Kembang Sepatu memiliki kandungan asam ferulic
8. Memiliki kandungan anti inflamasi yang tinggi, Kembang Sepatu bisa menyembuhkan jerawat. ♦



Ratu bunga ini secara tradisional telah digunakan untuk tujuan pengobatan dan budaya sejak abad ke-7 di Timur Tengah dan selama ribuan tahun dalam praktik Pengobatan Tradisional China.

ketika sedang panas demam. Ada juga yang mengonsumsi daun dan bunga ini sebagai sayur.

Ternyata, khasiat kembang sepatu jauh lebih banyak. Berbagai penelitian telah dibuat dan menunjukkan bahwa tanaman



PILKADA SERENTAK PROVINSI SUMATERA SELATAN **AJANG KOMPETISI PETAHANA, PENJABAT, DAN MEMBANGUN DINASTI**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai hangat. Karena 17 kabupaten-kota di Provinsi Sumsel, semuanya menggelar Pilkada Kabupaten/Kota 2024, yang nama para kandidat calon bupati (cabup) dan calon wali kota (cawako) telah bermunculan.

Mereka yang terpilih menjadi Bupati dan Wali Kota Periode 2025-2030 sebab rencananya pelantikan dilaksanakan pada Januari 2025.

Ke-17 Kabupaten dan Kota yang akan menggelar Pilkada 2024:

1. Kota Palembang
2. Kota Prabumulih
3. Kota Lubuklinggau
4. dan Kota Pagar Alam
5. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
6. Kabupaten Ogan Ilir (OI)
7. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
8. Kabupaten OKU Selatan (OKUS)
9. Kabupaten OKU Timur (OKUT)
10. Kabupaten Muara Enim
11. Kabupaten Lahat
12. Kabupaten Musi Rawas (Mura)
13. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)
14. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
15. Kabupaten Empat Lawang
16. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)
17. Kabupaten Banyuasin.

Dari jumlah itu, ada beberapa kabupat-

en-kota yang saat ini jabatan kepala daerahnya sudah dipegang oleh Penjabat (Pj) dan sebagian masih dipegang kepala daerah definitif atau incumbent.

Kabupaten dan Kota yang Dipimpin Kepala Daerah Definitif:

1. Kabupaten OKUS
2. Kabupaten OKUT
3. Kabupaten Ogan Ilir
4. Kabupaten Musi Rawas
5. Kabupaten Muratara
6. Kabupaten PALI

Dari jumlah itu, sejumlah petahana dipastikan menjadi Calon Bupati (Cabub) Pilkada 2024. Sementara itu ada beberapa Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang memutuskan untuk menjadi Cabup di daerah yang mereka pimpin.

Di sisi lain, para kepala daerah kabupaten-kota periode 2018-2023, yang baru satu periode dalam jabatan tersebut, memutuskan untuk mencalonkan diri kembali.

Yang menarik adalah istri mantan bupati dan mantan wali kota menjadi cabup atau cawako, yang oleh masyarakat dipandang sebagai upaya mendirikan dinasti politik.



Mantan Kepala Daerah Ramai-ramai Calonkan Istri

Mantan bupati dan wali kota di Provinsi Sumatera Selatan membuat tren baru dengan mendukung istri-istri mereka menjadi cagub dan cawagub. Bahkan ada yang mendorong istri dan anak sekaligus, setidaknya dalam pengambilan formulir pendaftaran di partai politik (parpol) saat penjarangan.

Adalah mantan Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya yang sempat mendorong istrinya dan anaknya mengambil formulir pendaftaran calon di parpol. Tapi saat pengambilan formulir, hanya istrinya yaitu Suryanti Ngesti Rahayu Ridho, yang hingga hari ini menduduki urutan teratas elektabilitas Cawako Prabumulih.

Adalah Joncik Muhammad, Bupati Empat Lawang Periode 2018-2023 yang mendorong istrinya menjadi cabup. Saat itu ia sedang berjuang untuk menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur Sumsel. Karena urung maju di Pilkada Provinsi Sumsel 2024, Joncik memutuskan untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Empat Lawang sebagai Cabup Periode 2025-2030.

Bagaimana dengan istrinya Hj Hepy Sapriani SKM MKes, yang kini Pj Sekda Kabupaten Empat Lawang dengan jabatan definitifnya Kepala Dinas Kesehatan? Dikatakan Joncik, istrinya memilih mencalonkan diri di Pilkada Kota Pagar Alam sebagai cawako. Karena istrinya memang berasal dari Kota Pagar Alam.

Bagaimana dengan istri Cik Ujang Hj Lidyawati SHut MM, yang semula akan maju di Pilkada Kabupaten Muara Enim? Dengan Cik Ujang maju menjadi Calon Wakil Gubernur Sumsel berpasangan Herman Deru, maka ia urung mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Lahat 2024.

Karena itu Cik Ujang mendorong sang istri mengurungkan pencalonan di Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya berkompetisi di Pilkada Kabupaten Lahat, di mana peluang menangnya lebih besar.

Petahana yang akan mencalonkan diri kembali:

1. Bupati Ogan Ilir H Panca Wijaya Akbar

2. Bupati OKU Timur H Linosin Hamzah
 3. Bupati Musi Rawas Hj Ratna Mahmud
 4. Bupati Musi Rawas Utara H Devi Sartoni.
- Mantan Bupati/Wali Kota yang Mencalonkan Diri Kembali:

1. H Askolani Jasi di Kabupaten Banyuasin
2. H Joncik Muhammad di Kabupaten Empat Lawang

3. H Alfiantoni di Pilkada Kota Pagar Alam.

Pj Bupati/Wali Kota yang Mencalonkan Diri:

1. H Ratu Dewa di Pilkada Kota Palembang
2. H Rizali Ahmad di Pilkada Kabupaten Muara Enim
3. H Apriyadi Mahmud di Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. ♦





PILKADA PROVINSI SUMATERA SELATAN

3 PASLON MAJU TAPI SESUNGGUHNYA DERU DAN MAWARDI YANG BERKOMPETISI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 bakal berlangsung sengit. Karena hingga saat ini hanya ada 3 bakal pasangan calon (paslon) yang siap berkompetisi di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel tersebut. Ketiga paslon adalah Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati, Herman Deru-Cik Ujang, dan Heri Amalindo-Popo Ali Martopo.

Sebetulnya masih ada satu paslon lagi yang sudah deklarasi akan maju di Pilkada Provinsi Sumsel 2024, tapi hingga kini belum ada lanjutan kabarnya lagi. Paslon yang telah deal di Jakarta tersebut adalah Eddy Santana Putra-Andi Asmara.

Sementara Pasangan Holda-Meli Mustika Ilyas, yang awal-awalnya sangat gencar mempromosikan program-program mereka, boleh dikatakan layu sebelum berkembang. Holda-Meli Mustika Ilyas (HOME) me-

milih urung maju Pilkada Sumsel 2024.

HOME memutuskan mundur dari arena, Karena Partai Demokrat, tempat Holda membaktikan diri sebagai Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel, sudah resmi mengusung Cik Ujang, yang berpasangan dengan Herman Deru. Holda memilih bersikap tegak lurus dengan keputusan DPP Partai Demokrat.

Dari keempat paslon, katakanlah 3 yang sudah memastikan diri untuk maju, paslon Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (MA-

TAHATI) menjadi yang sangat menarik. Pertama karena Mawardi Yahya pada Periode 2018-2023 merupakan Wakil Gubernur Sumsel berpasangan dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Di Pilkada Sumsel 2024, Mawardi memutuskan berpisah dari Herman Deru dan maju sebagai Calon Gubernur Sumsel 2025-2030 di Pilkada Sumsel 2024'

Mawardi Yahya menjadi sosok yang paling duluan mendeklarasikan diri maju ke Pilkada Sumsel 2024 sebagai Calon Gu-

bernur, yang awalnya berpasangan dengan Harnojoyo; Mawardi Yahya-Harnojoyo (MAHAR). Namun akhirnya urung, karena Harnojoyo tidak didukung oleh DPP Partai Demokrat.

Bergerak cepat Mawardi Yahya usai bubar dengan Harnojoyo. Ia jeli melihat permata satu ini, Hj RA Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang juga salah satu pentolah DPD Partai Golkar Sumsel.

Gayung bersambut. Begitu Mawardi, Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, melamar RA Anita Noeringhati ke DPP Partai Golkar, yang merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, menerima dengan tangan terbuka. Mawardi Yahya-Anita Noeringhati langsung diberi rekomendasi, sehingga lahirah Paslon MATAHATI.

Ajang Pembuktian Tiga Nama Besar

Pengamat Politik Sumsel Haekal Al Hafafah meyakini hanya tiga paslon yang bakal adu kehebatan di Pilkada Provinsi Sumsel 2024. Mereka adalah Herman Deru-Cik Ujang (HDCU); Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (MATAHATI); dan Heri Amalindo-Popo Ali (HAPAL).

Menurut Haekal, Pilgub Sumsel 2024 akan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, karena yang kali ini akan berlangsung sangat menarik. Sebab di sinilah ajang pembuktian antara tiga nama besar Mawardi Yahya, Herman Deru, dan Heri Amalindo. Namun sebetulnya yang head to head adalah Mawardi Yahya dan Herman Deru.

Ya. Haekal secara khusus menyoroti 'pertikaian' antara HD dan Mawardi Yahya. Keduanya memiliki elektabilitas yang kuat. Terle-

bih selama berpasangan, keduanya begitu harmonis. Herman Deru dan Mawardi Yahya lebih terlihat seperti adik dan kakak. Keharmonisan Herman Deru dan Mawardi Yahya juga sama dengan istri keduanya yaitu Hj Febrita Lustia dan Hj Fauziah.

Selama bekerja bersama-sama memimpin Pemerintahan Provinsi Sumsel, Mawardi Yahya dan Herman Deru tidak pernah dilanda gosip keretakan. Tak pernah terbetik kabar keduanya rebutan lahan kursi jabatan, proyek, dan peran lainnya. Semuanya ber-



Sehingga jangkauan ingatan publik Sumsel kepada Herman Deru jauh lebih baik dibanding dengan Mawardi, mengingat Sumsel ini sangat luas.

langsung harmonis dan manis, seiya-sekata.

Menurut Haekal, Mawardi Yahya diuntungkan oleh kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang di Sumsel suaranya mencapai 70-an persen. Tentu tidak terlepas dari kerja keras Mawardi, sehingga angka ini jauh melampaui perolehan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Namun. Mawardi Yahya perlu mencatat bahwa strategi politik Herman Deru tidak kaleng-kaleng. Sebab Pasangan HDCU memiliki basis dukungan yang kuat. Herman Deru jauh lebih kuat basis elektoralnya dibanding Mawardi Yahya.

Ia merinci bahwa setidaknya, ada yang membedakan antara Herman Deru dan Mawardi Yahya.

Pertama, HD sudah pernah maju di Pilkada Sumsel sebanyak dua kali, yakni pada 2013 bersama Maphilinda namun kalah, dan pada 2018 bersama Mawardi Yahya, ia menang.

Kedua, ingatan publik jauh lebih dekat kepada HD ketimbang Mawardi. Sebab, sebagai mantan gubernur, HD lebih banyak turun ke lapangan daripada Mawardi sebagai mantan Wakil Gubernur.

"Sehingga jangkauan ingatan publik Sumsel kepada Herman Deru jauh lebih baik dibanding dengan Mawardi, mengingat Sumsel ini sangat luas," katanya.

Bagaimana dengan hadirnya RA Anita Noeringhati sebagai satu-satunya calon wakil gubernur (cawagub) bergender perempuan? Menurut Hekal, hal tersebut masih dinilai biasa saja oleh sebagian besar masyarakat Sumsel.

"Pemilih perempuan belum tentu otomatis bergeser ke kandidat Paslon yang juga mewakili figur perempuan, karena isu keterwakilan gender itu belum menjadi kebutuhan di Sumsel," tandasnya.

Oleh karena itu, Haekal menyimpulkan bahwa persaingan di Pilgub Sumsel 2024 akan menjadi milik Herman Deru dan Mawardi Yahya, arena kompetisi untuk kedua calon gubernur ini saja. ♦

MUHAMMAD RASUL PARIPURNA MEMPARIPURNAKAN CINTA KEPADA RASULULLAH SAW

Buku berjudul "Muhammad Rasul Paripurna" karya KH Moch Djameluddin Ahmad menyajikan berbagai detil kehidupan Nabi Muhammad SAW. Segala aspek kehidupan Baginda Nabi SAW ditulis dengan jelas menggambarkan bagaimana sang penulis mencintai Rasulullah SAW.

Buku ini wajib dibaca umat Islam agar mampu mengenal kepribadian Rasulullah SAW, sehingga tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang sudah mencintai Baginda Nabi SAW, kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu menjadi paripurna.

Sesuai hadits Rasulullah SAW yang bermakna:

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintai baginya dibandingkan mencintai dirinya sendiri, hartanya, anaknya, orangtuanya dan manusia seluruhnya" (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Penulis menyebutkan bahwa tidak satu makhluk pun yang tidak tidak jatuh

JUDUL BUKU:
MUHAMMAD RASUL PARIPURNA
PENULIS:
KH. MOCH DJAMALUDDIN AHMAD
PENERBIT:
PUSTAKA AL-MUHIIBBIN
TAHUN TERBIT:
2021
JUMLAH HALAMAN:
204
ISBN: 978-602-9253-46-7

cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sosok terkasih-Nya.

Dalam satu firman-Nya, Allah SWT menyebutkan, "Kalau bukan karena engkau Muhammad, Aku tidak akan menciptakan alam ini."

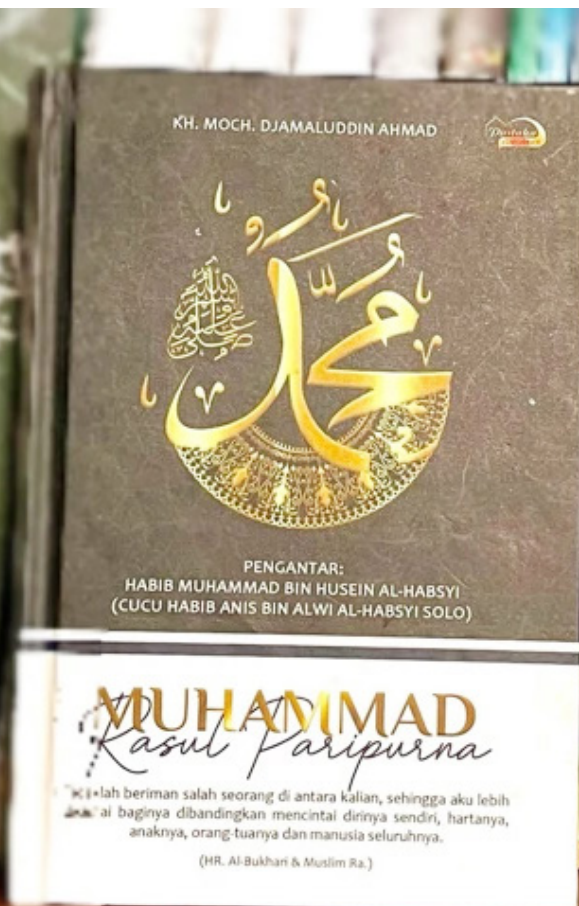
Dikisahkan Sayyidah Aminah saat mengandung putranya itu didatangi 9 nabi yang mengabarkan bahwa janin yang dikandungnya adalah pemimpin dunia. Sosok yang mampu mendengar-

kan suara Qalam di Lauh al-Mahfudz saat masih dalam kandungan.

Muhammad adalah manusia sempurna yang memiliki mukjizat membenamkan matahari, menjatuhkan bulan ke bumi lalu membelahnya menjadi dua, menyempurnakan anggota tubuh yang cacat, mengembalikan penglihatan orang buta. Mampu menjadikan gunung emas dan perak menjadi debu.

Kendati memiliki mukjizat, Nabi Muhammad tetaplah memiliki sifat sebagai manusia biasa. Beliau harus bekerja, merasakan sakit, menanggung kesedihan, dan tentunya beribadah dengan ke-tauhidan yang sempurna meskipun telah dijanjikan surga oleh Allah Swt.

Nabi Saw juga tidak mampu mengelak ketika ajal telah datang. Sosok yang begitu mencintai umatnya, tiada kesedihan akan berpisah di dunia melainkan berat meninggalkan umatnya, bahkan Nabi memohon agar sakitnya sakaratul maut seluruh umatnya ditimpakan kepadanya saja.* ♦



ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 200.000

6 EDISI (6 BULAN) RP 400.000

12 EDISI (12 BULAN) RP 800.000



BERLANGGANAN

**0896
4369
4121**

FREE

**GRATIS ONGKIR
JABODETABEK**

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

PT. INTER MEDIA DIGITAL

**Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750**

TELP 021-791 96781

FAX 021-791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice tv

Kisah Hidup Abdullah Ibnu Mubarak

MENGGALI ILMU DARI 4.000 GURU

Dikisahkan Abdullah Ibnu Al Mubarak bin Wadlih Al Handzali Al Marwazi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Mubarak, adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Marwa, Khurasan, pada tahun 118 H.

Dalam kitab *Siyar A'lam an-Nubala*, Syamsuddin az-Zahabi, dijelaskan bahwa Ibnu Mubarak merupakan ulama terkemuka pada masanya, yang dikenal dengan keilmuannya yang luas, kesalehannya, dan sifat zuhudnya.

Ayahnya, Al Mubarak, berasal dari Turki, sedangkan ibunya berasal dari Khwarezmia (sekarang Khiva) yang dulunya termasuk bagian Khurasan atau sebelah barat Uzbekistan.

Ibnu Mubarak lahir dari pasangan suami istri yang taat dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ketakwaan agamanya. Ibnu Mubarak tumbuh dan besar menjadi anak yang cerdas dan gemar belajar.

Sejak masih kecil, ia sudah mempelajari ilmu agama dari ayahnya dan ulama-ulama lainnya di Marwa. Ia juga berguru kepada ulama-ulama besar di berbagai kota di dunia Islam, seperti Basrah, Baghdad, dan Damaskus.

Guru pertama yang ditemui Ibnu Mubarak adalah Rabi' bin Anas al-Kharsyi. Ia berusaha untuk bertemu Rabi' bin Anas di penjara dan mendengar sekitar 40 hadits darinya.

Kemudian, ia juga melakukan perjalanan pada tahun 141 H dan mengambil hadits dari para tabi'in yang ditemuinya.

Menurut catatan Syamsuddin az-Zahabi, dalam kitab *Siyar A'lam an-Nubala*, Ibnu Mubarak berguru kepada banyak ulama, bahkan lebih dari 4.000 guru. Sementara Imam bin Hanbal menuturkan, bahwa Ibnu Mubarak adalah ulama yang sangat giat mencari ilmu. Ia rela merantau ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama.

Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk menimba ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, "Pada zamannya, tak ada seorang pun yang lebih giat menimba ilmu melebihi Ibnu Al-Mubarak."

Ibnu Al-Mubarak pernah belajar kepada 4.000 orang guru di berbagai negeri. Di antara gurunya dari kalangan tabi'in lainnya, seperti Sulaiman at-Taimi, 'Ashim al-Ahwal, Humaid at-Tawwal, Hisyam bin

'Urwa, al-Jariri, Ismail bin Abi Khalid, al-A'masy, Buraidah bin Abdullah bin Abi Burdah, Khalid al-Khudhari, Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Kemudian Ibnu Mubarak juga pernah berguru pada Abdullah bin Aun, Musa



bin Uqbah, Ajlajah al-Kindi, Husain al-Mu'allim, Hanzhalah as-Sadusi, Huyawah bin Syarih al-Misri, Kahmas, al-Azuza'i, Abu Hanifah, Ibnu Juraij, Ma'mar, at-Tsauri, Syu'bah, Ibnu Abi Dzi'b, Yunus al-Ili, al-Hammadan, Malik, al-Laits, Ibnu Lah'i'ah, Hisyam, Ismail bin 'Iyasy, Ibnu 'Uyainah, dan Baqi' bin al-Walid.

Semasa hidupnya, Ibnu Mubarak banyak melakukan perjalanan dan mengembara, hingga ia meninggal dunia dalam pencarian ilmu.

Dalam pengembaraannya, Ibnu

Mubarak pernah mengunjungi berbagai kota di Irak, Suriah, Hijaz, dan Yaman. Saat mengunjungi Irak, ia berguru kepada para ulama besar Irak, seperti Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah.

Di Suriah, ia berguru kepada para ulama besar Suriah, seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abu Hazim al-A'raj, dan Malik bin Dinar.

Sementara di Hijaz, ia berguru kepada para ulama besar seperti Urwah bin Zubair. SedangkandDi Yaman, ia berguru kepada para ulama besar seperti Syu'bah bin al-Hajjaj dan Hammad bin Zaid.

Berdasarkan penuturan para ulama pada masanya, sosok Ibnu Mubarak digambarkan sebagai ulama dan ahli ha-

menemaninya dari Mesir ke Makkah. Ibnu al-Mubarak memberi mereka makan roti kismis, padahal dia berpuasa sepanjang tahun," tambah Ismail.

Di sisi lain, dikisahkan pula bahwa Ibnul Mubarak dikenal sebagai seorang ulama shaleh dan zuhud, yang senantiasa bersikap rendah hati. Tak pernah merasa lebih baik dari orang lain, meski sesungguhnya ia pribadi yang mulia dan terhormat. Keutamaannya diakui oleh banyak orang.

Ali bin Shiddiq, melalui kesaksian Ali bin Zaid al-Fara'idi menyebut Ibnu Mubarak sebagai sosok paling mulia yang pernah ditemui. Hal serupa diungkapkan Abu Asma', ulama hadits lainnya, yang membandingkan Ibnu Mubarak

jalan.

Ia mengumpulkan uang dan membaginya rata kepada para sufi. Kederawan Ibnu Mubarak juga diceritakan oleh Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Sya'iq, bahwa Ibnu Mubarak selalu menemani saudara-saudaranya dari Merv untuk menunaikan ibadah haji.

Dia menanggung semua biaya perjalanan dan kebutuhan mereka seperti memberi mereka makanan yang lezat, hidangan penutup yang lezat, pakaian yang bagus selama di Makkah.

Selain itu, Ibnu Mubarak juga membantu para jamaah haji untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk dibawa pulang. Setelah selesai



dits yang sangat mulia akhlaknya.

Ismail bin Iyas, seorang sahabatnya, memuji Ibnu Mubarak karena sifat-sifat baiknya, terutama kedermawanannya.

Dalam sebuah riwayat, Ismail bin Iyas menceritakan sosok Ibnu Mubarak. Ismail berkata, "Tidak ada orang lain di dunia yang seperti Ibnu Mubarak. Saya tidak tahu ada sifat baik apa pun yang Allah ciptakan kecuali Dia telah memberikannya kepada Abdullah bin al-Mubarak."

"Teman-teman saya pernah bercerita kepada saya bahwa mereka pernah

seperti Amirul Mukminin di antara manusia.

Selanjutnya, berdasarkan riwayat dari Umar bin Hufazh As-Sufi dari Manbij, dikisahkan bahwa sosok Ibnu Mubarak adalah seorang yang dermawan, terutama kepada orang-orang miskin dan fakir.

Suatu hari, ia sedang dalam perjalanan dari Baghdad ke Misis. Di tengah jalan, ia bertemu dengan sekelompok sufi yang sedang kesulitan. Ibnu Mubarak menawarkan untuk membantu mereka dengan menafkahi mereka selama per-

haji, ia bertanya kepada masing-masing jamaah, "Apa yang keluargamu minta untuk kamu beli di Makkah?" Jamaah menjawab, "Ini dan itu." Ibnu Mubarak kemudian membelikan barang-barang tersebut untuk mereka. Ia juga menanggung biaya perjalanan mereka hingga sampai ke Merv.

Sesampainya di Merv, Ibnu Mubarak mengecat rumah dan pintu para jamaah. Tiga hari kemudian, ia mengadakan jamuan makan untuk mereka dan memberikan mereka pakaian. ♦

MENGIKUTI TREND ALL EYES ON RAFAH DENGAN TUJUAN JIHAD



OLEH
M RUFAD BALYA B

Kekhawatiran internasional terhadap serangan Israel di Rafah yang berlangsung selama berminggu-minggu, berubah jadi kemarahan setelah pengeboman sejak Minggu (26/5/2024) waktu setempat.

Dilansir Forbes, ungkapan 'All eyes on Rafah' adalah seruan kepada masyarakat dunia untuk memperhatikan serangan terhadap Rafah di Gaza, Palestina. Kalimat 'All Eyes on Rafah' digunakan di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kekejaman yang terjadi.

Slogan inilah yang memicu netizen dunia untuk ikut bersimpati kepada korban di Rafah serta mengecam perbuatan yang dilakukan Israel. Dan inilah gerakan netizen di medsos yang kerap dikenal sebagai istilah "Julid Fi Sabilillah".

Dulu, pada awal-awal agresi militer Israel untuk menyerang Gaza, Gerakan ini sudah dipopulerkan oleh netizen Indonesia yang berkoalisi dengan Malaysia dalam melawan Zionis dan Israel di media sosial.

Memang gerakan ini berfokus untuk memerangi propaganda Zionis di media sosial, demi tercapainya tujuan dalam operasi melawan Israel di jagat maya.

Target utama dari gerakan ini merupakan tentara Israel, polisi Israel, warga Israel atau Institusi Israel yang membuat narasi anti-Palestina. Tak hanya itu, gerakan ini berfokus untuk memerangi Zionis dan Israel, bukan Yahudi sebagai ras dan agama.

Lantas, bagaimana hukum melakukan gerakan perlawanan "Julid Fi Sabilillah" sebagai gerakan jihad di media sosial untuk mengecam perbuatan zionis Israel?

Sebelum kita membahas tentang gerakan ini, alangkah baiknya kita memahami konsep jihad dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti yang diterangkan dalam kitab Fiqh al-Manhaji ini, Jihad menurut istilah syariat Islam adalah menegakkan persatuan orang Islam. Atau menyerahkan seluruh kemampuan untuk menolong syariat Allah dan meluhurkan kalimat Allah.

Yang tujuan utama dari jihad adalah meluhurkan agama Allah, tentunya jihad memiliki batasan serta tahapan-tahapan agar sesuai dengan syariat Islam. Di antara tahapan dalam berjihad ataupun mencegah kemungkaran itu ada 5 tahapan seperti yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumiddin di bawah ini,

Mencegah kemungkaran mempunyai 5 tahapan :

1. Memberi pemahaman

2. Memberi petunjuk dengan perkataan yang lembut
3. Mencaci atau berkata kasar
4. Mencegah dengan paksa
5. Mengancam akan memukul

Sedangkan konteks jihad untuk menyebarkan ajaran Islam di era kecanggihan teknologi informasi saat ini dapat dilakukan dengan berbagai platform, termasuk media sosial. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi.

Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya



tentang syair, beliau menjawab bahwa syair dapat digunakan sebagai media untuk berjihad. Sebagaimana hadis shahih yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW ditanya, bagaimana pendapat Nabi tentang syair? Beliau menjawab: "Seorang mukmin berjihad menggunakan senjata dan lisannya, dengan syairmu seakan engkau melempari musuhmu dengan panah."

Hadis di atas menunjukkan bahwa jihad menyebarkan ajaran Islam dapat dilakukan dengan beragam media, baik media verbal seperti ceramah mengaji atau dengan tulisan. Di era teknologi saat ini berbagai berita dapat menyebar dengan cepat.

Banyak informasi tentang agama

yang keliru, adanya gerakan radikal yang mengganggu terhadap stabilitas negara, hoaks yang bertebaran, ujaran kebencian, adu domba, gerakan melawan pemerintah, serta kejanggalan dalam memahami agama tersebar di ruang publik, baik melalui media cetak, media sosial, atau visualisasi video di internet.

Peran jihad bagi pesantren adalah menjawab, meluruskan, dan menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin dengan memanfaatkan teknologi media yang mutakhir.

Jihad seperti ini merupakan fardhu kifayah yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki keilmuan yang mendalam.

Termasuk fardhu kifayah apabila menegakkan argumentasi keagamaan dan

mengurai kerancuan dalam memahami agama.

Maka dari itu, kembali lagi ke pembahasan awal kita terkait hukum julid fi sabilillah atau jihad via media sosial.

Menurut penulis yang dirangkum dari beberapa sumber, hukumnya adalah boleh, bahkan bisa menjadi fardlu kifayah dalam rangka upaya kepedulian terhadap warga Palestina dan aksi protes terhadap agresi Israel.

Namun demikian dalam menyampaikan konten atau tulisan harus menghindari dampak negatif yang lebih besar, semisal mem-bully agama atau sesembahan mereka, provokasi yang melanggar aturan-aturan perang yang disepakati dunia internasional, dan lain-lain. ♦ nu online jatim



DOKTOR DULU, BARU NYALON BUPATI

Deden Nasihin berminat menjadi Bupati Cianjur, Jawa Barat. Ia juga mengalami masalah wilayah kabupatennya, dan meraih gelar doktor yang mengkaji kawin kontrak di kawasan Puncak.

Jadi, Dr Deden Nasihin itu sejatinya politisi. Malah ia menjadi salah satu bakal calon bupati Cianjur dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Apapun, upayanya mengkaji kawin kontrak dari sisi administrasi publik tetap menjadi bahan kajian layak dan relevan dengan perkembangan warga setempat, khususnya Cianjur.

Salah seorang Tim Penguji, Dr Drs Asep Sumaryana MSi mengatakan, disertasi Deden Nasihin berkenaan den-

gan salah satu persoalan di Cianjur, yaitu, fenomena kawin kontrak. Perbup 38/2021 pada dasarnya sebagai upaya menanggulangi hal tersebut.

Melalui disertasi itu, Deden Nasihin, berupaya menata ulang hal-hal yang berkenaan dengan solusi atas kondisi tadi. "Dalam kapasitasnya sebagai warga Cianjur, anggota DPRD, bahkan calon bupati agaknya hal tersebut menjadi PR (pekerjaan rumah) besar yang harus ditangani agar laukna beunang, caina herang (terangkapikannya, airnya tetap jernih) yang secara kolaboratif dengan elemen Cianjur lainnya," kata Asep Sumaryana.

Hadir dalam sidang promosi itu, tim promotor yang diketuai oleh Dr Drs Heru Nurasa MA, dan Dr Drs Harijanto Bekt MSi serta Prof Ida Widaningsih MA PhD sebagai anggota promoto. Sementara, para tim penguji selain Asep Sumaryana antara lain Dekan FISIP Unpad Dr Widya Setiabudi Sumadinata MT MSi, Dr Drs Asep Sumaryana MSi, Dr Sawitri Budi Utami, Dr Ramadhan Pancasilawan. Kemudian, Prof Dr Dra Nunung Nurwati, dan penguji eksternal Dr Atalia Praratya yang juga istri Ridwan Kamil.

Seusai Deden Nasihin memaparkan rumusan disertasi dan menjawab lontaran sejumlah pertanyaan. Alhasil, tim penguji sepakat menyatakan, Deden Nasihin lulus dan layak menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan.

Dalam sidang promosi doktor administrasi publik



Deden Nasihin mengangkat tema “Implementasi Pencegahan Perkawinan Kontrak di Kabupaten Cianjur (Studi Kasus di Kecamatan Cipanas)”. Kang Denas mengatakan, masih terjadi praktik kawin kontrak di Kabupaten Cianjur meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pencegahan perkawinan kontrak, yaitu, Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021. Sebagian besar pelaku kawin kontrak adalah turis dari Timur Tengah.

Bahkan, Bupati Cianjur menyiapkan tenaga memadai, yaitu, dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kawin Kontrak dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 474.2/KEP.301-KESRA/2021. “Namun kawin kontrak masih terjadi,” ujarnya.

Ke depan, tutur Kang Denas, sapaan akrab Deden Nasihin, pemerintah harus membuat peraturan daerah (perda) yang memuat sanksi. Selain itu, perlu kolaborasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat.

Libatkan agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. “Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya,” tutur Kang Denas.

Caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih ini mengatakan, ketersediaan sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan termasuk mengatasi masalah kawin kontrak. Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan.

Alasannya, kata Kang Denas, mereka merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan tidak terimplementasinya kebijakan pencegahan praktik kawin kontrak di Kabupaten Cianjur adalah penegakan hukum lemah dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat.

Lemahnya perbup tentang kawin kontrak karena tidak memuat sanksi. Karena itu harus diperkuat dengan peraturan daerah (perda) agar memuat sanksi bagi pelaku kawin kontrak. Bahkan, tutur Kang Denas, terbentuk sikap permisif di kalangan masyarakat Cipanas terhadap praktik ilegal tersebut. Kawin kontrak menjadi sumber mata pencarian sebagian warga di sana.

“Selain itu, faktor ekonomi memaksa para pelaku melakukan kawin kontrak sebagai solusi instan untuk mendapatkan

uang,” ucap Kang Denas.

Di Cipanas, ujar Kang Denas, sejumlah perempuan menjadi pelaku kawin kontrak. Kemudian, orang yang berperan sebagai agen atau mamasa, wali, dan penghulu. Mereka semua diuntungkan secara ekonomi dan bisnis dengan praktik ilegal tersebut.

“Berdasarkan penelitian, kami menemukan fakta, di sana ada perempuan yang bisa melakukan kawin kontrak tiga kali dalam seminggu. Ini praktik ilegal, lebih ke arah prostitusi terselubung,” tutur Kang

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, kawasan Bukit Dago Utara, Kota Bandung.

Tubagus Ace Hasan Syadzily atau akrab disapa Kang Ace didampingi Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jabar Metty Triantika, Anggota DPRRI Dewi Asmara, dan anggota DPRD Provinsi Jabar Phinera Wijaya serta pengurus dan akademisi Partai Golkar lainnya.

“Dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan, kami ucapkan dan sampaikan se-



Denas.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengatakan, prestasi akademik yang diraih salah satu kadernya, Deden Nasihin, yang menyandang gelar doktor membuktikan kader Partai Golkar dikenal selain sebagai politisi juga ia adalah seorang teknokrat.

Wakil Ketua DPRD Cianjur Deden Nasihin yang juga Wakil Ketua Bidang Khusus DPD Partai Golkar Jabar berhasil meraih gelar doktor Administrasi Publik Fakultas

lambat atas raihan prestasi akademik gelar doktor Deden Nasihin, “kata kang Ace

Ia pun berharap, prestasi akademik ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan kemajuan bangsa,” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily atau akrab disapa Kang Ace saat memberikan sambutan selepas sidang promosi doktor Deden Nasihin.

Apakah dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Mungkin Dr Deden sendiri yang harus membuktikannya. ♦

Pilgub Sumut 2024

MENCARI CAWAGUB UNTUK BOBBY

Siapa berpasangan dengan siapa dalam pemilihan serentak Kepala Daerah 2024 masih berproses hingga tiba saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Tak terkecuali Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Sebelum menentukan pasangan, tentu saja calon kepala daerah dulu yang harus lebih dulu. Untuk Pilgub Sumut 2024, Partai Golkar menyerahkan secara resmi surat dukungan untuk Wali Kota Medan Bobby Nasution maju sebagai bakal calon gubernur (cagub).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat dukungan itu didampingi Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ketika Bobby berkunjung ke kediaman Airlangga di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.

"Dukungan ini terus masih satu nama, calon gubernur, dan nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu pasangan yang akan dipilih oleh Pak Bobby," kata Airlangga saat konferensi pers bersama Bobby Nasution serta petinggi Partai Golkar.

Dia mengatakan Bobby merupakan bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang sudah mendapatkan dukungan dari lima partai politik, termasuk Golkar yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan surat dukungan itu, dia memastikan Partai Golkar sudah bulat memutuskan calonnya di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil survei, menurutnya calon yang didukung oleh partainya tersebut posisinya unggul.

Selain itu, menurutnya Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajek-

shah yang sebelumnya digadang-gadang bakal maju menjadi Cagub Sumut, ke depannya akan fokus di DPR RI. Menurutnya pria yang akrab disapa Ijeck itu meraup suara yang cukup besar dalam Pemilu Legislatif 2024. "Selanjutnya karirnya (Ijeck) saya akan perhatikan," kata Airlangga.

Sementara itu, Bobby berharap kesempatan yang diberikan oleh Partai Golkar itu bisa menjadi penyemangat bagi dirinya pribadi dan bagi masyarakat Sumatera Utara. Bobby yang kini merupakan kader Partai Gerindra itu menjelaskan dukungan yang diberikan oleh Golkar itu merupakan surat tugas.

Sedangkan untuk surat rekomendasi, menurutnya akan diberikan oleh Golkar ketika dirinya telah memilih pasangannya di Pilkada. "Alhamdulillah ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan," kata menantu Presiden Joko Widodo itu.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyodorkan pula nama kadernya, yakni

Sekar Tandjung sebagai bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah didukung maju sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Menurut Airlangga, Partai Golkar memilih untuk menyodorkan kader-kader muda untuk Pilkada Sumut, selain nama-nama yang disodorkan oleh Koalisi Indonesia



Maju (KIM). Menurut dia, Sekar yang merupakan putri dari mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, memiliki hubungan dengan Sumatera Utara.

"Ini adalah Sekar Tandjung. Jadi ada hubungan dengan Sumut. Dan Partai Golkar punya beberapa kader muda yang nantinya bisa dipilih untuk mendampingi Bobby," kata Airlangga.

Selain Sekar Tandjung, menurut Airlangga, Partai Golkar juga menyodorkan nama kader lainnya yakni Ketua Umum Hipmi Akbar Buchari. Akbar merupakan kader Partai Golkar dan pernah menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara.

Sedangkan Bobby Nasution menyatakan sudah menerima nama-nama yang disodorkan untuk mendampingi dirinya pada pilkada Sumut. Selain Sekar yang baru disodorkan oleh Partai Golkar, menurut dia, juga nama-nama yang menjadi pertimbangannya, yakni beberapa kepala daerah di Sumatera Utara.

"Tadi disebut juga (Sekar), karena tadi lagi di Jakarta ya sekalian diperkenalkan. Namanya nggak cuma satu tadi," kata Bobby.

Dukungan pencalonan Sekar sebagai bakal Cawagub antara lain datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut. "Saya merespon baik Partai Golkar menyodorkan nama Sekar Tandjung dalam pencalonan Pilgubsu. Selain cantik, kita butuh keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan Sumut, untuk mengakomodir suara perempuan," ujar Wakil Ketua Umum KAMMI Sumut Nugra Ferdino di Medan, Jumat 21 Juni 2024.

Mengutip data BPS, Nugra menyebutkan perempuan pemilih di Sumut signifikan. "Menurut data BPS pada 2023 jumlah perempuan di Sumut ada sebanyak 7.665.326 orang dari jumlah keseluruhan penduduk 15.386.640 jiwa," ujarnya.

Nugra mengemukakan pula, pasangan Bobby-Sekar akan menyelesaikan permasalahan harmonisasi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana terjadi di masa sebelumnya. "Harmonisasi kepemimpinan Sumatera Utara ini turut menjadi sebuah permasalahan. Bagaimana Gubernur Almarhum Syamsul Arifin berkonflik dengan Gatot Pujo Nugroho, kemudian Gubernur Gatot Pujo Nugroho berkonflik dengan Tengku Erry Nuradi, dan yang terakhir adalah Gubernur Edy Rahmayadi berkonflik dengan Musa Rajekshah. Konflik ini mengganggu kestabilan politik dan menghambat pembangunan Sumatera Utara," jelas Alumni Ilmu Politik USU ini.

Toh Doli Tandjung mengemukakan,

penetapan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk dipasangkan dengan Bobby Nasution masih terbilang panjang. Menurut dia, meski Partai Golkar sudah mendorong nama putri Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yakni Sekar Tandjung, itu belum final.

Doli menyatakan, masih ada beberapa tahapan untuk partai politik lain yang

Cawagub Sumut yang dipasangkan dengan Bobby. Terpenting, sambung Doli, sosok yang nantinya akan mendampingi Bobby Nasution harus memiliki background jelas dan karir politik bagus.

Dengan begitu, figur tersebut nantinya bisa menambah potensi kemenangan Bobby Nasution di Pilkada Sumut. "Tentu figur itu nanti harus menambah kekuatan

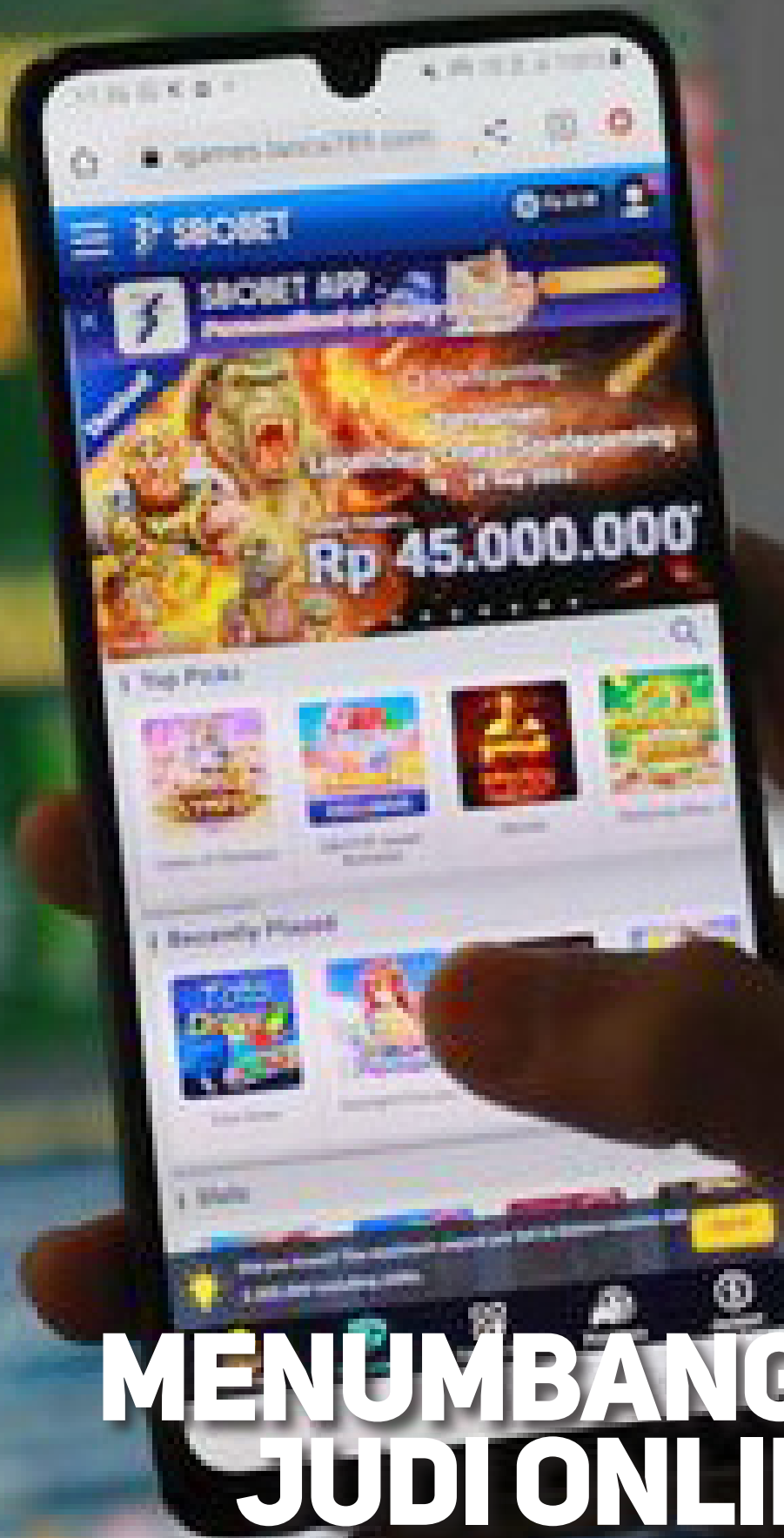


nantinya bergabung ke koalisi pendukung Bobby Nasution dalam menetapkan siapa sosok yang tepat. "Nah, tapi siapa pada akhirnya, kami membutuhkan waktu ya, mendiskusikan di internal dulu, kemudian nanti dibicarakan Pak Bobby. Baru kemudian dibicarakan di tingkat partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Pak Bobby itu," kata Doli kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Jadi, kata Doli, setidaknya masih ada tiga tahap lagi sebelum menentukan nama

potensi kemenangan Pak Bobby. Jadi itu yang harus kita kaji, dia dari latar belakang apa, latar kebudayaan seperti apa, latar politiknya seperti apa, basis kulturalnya seperti apa," tandasnya.

Pada akhirnya hitung-hitungan itu dapat diringkas menjadi tingkat popularitas dan elektabilitas. Popularitas menyangkut cakupan potensi meraup suara di seluruh daerah pemilihan, sedangkan elektabilitas adalah potensi keterpilihan pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah. ♦



MENUMBANGKAN JUDI ONLINE

Satgas Pemberantasan Judi dalam Jaringan sudah terbentuk. Semoga darurat judi online bisa berubah ke tingkat yang dapat terkendali.

Sudah sejak akhir Agustus 2023, pemerintah menyerukan kewaspadaan terhadap perjudian dalam jaringan. Masyarakat umum menyebutnya judi online karena menggunakan jaringan internet.

"Indonesia ini darurat judi online, daya rusaknya terlalu tinggi dan sudah sangat meresahkan. Ruang digital kita jadi rusak, rakyat menjadi korban. Kita harus sama-sama memerangi judi online," kata Budi akhir Agustus 2023.

Menurut Budi, pemerintah terus mendapat laporan dari masyarakat terkait perjudian

melarang semua transaksi judi online melalui dunia perbankan. Tapi ini ranahnya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), makanya kita juga koordinasi dengan BI, OJK, Kepolisian, PPATK. Ini harus simultan terus, komprehensif, memberantas judi online ini," ujar Menkominfo Budi.

Budi juga mengimbau kalangan artis dan publik figur untuk turut bekerja sama dengan tidak mempromosikan judi online. Lebih dari itu, Menkominfo berharap, masyarakat dapat lebih produktif dalam memanfaatkan ruang digital.

"Kita harap ruang digital ini membuat

dan Keamanan sebagai ketua dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai wakil ketua.

Sedangkan anggotanya yaitu Menkominfo sebagai Ketua Harian Pencegahan, Kapolri sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, Dirjen IKP Kominfo sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan, dan Ka. Bareskrim Polri sebagai Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum.

Keppres ini terbit setelah setidaknya tiga rapat tertutup dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Dua rapat terakhir tercatat pada 18 April dan 22 Mei 2024. Menteri



dian online. Setiap hari pula Kementerian Kominfo terus memantau dan menghapus konten situs web yang mempromosikan judi online.

Malah Menteri Budi menilai kemampuan teknologi pemerintah selalu diuji dalam memberantas judi online ini. "Kita harus terus improve, karena ini beradu kemampuan, beradu teknologi antara bandar judi online dan Pemerintah. Tapi saya optimis bisa," ungkapnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan judi online dan pinjol ilegal. "Kita akan bicara dengan lembaga perbankan,

masyarakat makin produktif. Pemerintah juga turut andil mendorong budaya masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital. Kami juga melakukan program literasi digital, untuk menyadarkan masyarakat betapa merusaknya ruang digital kita digunakan untuk hal-hal buruk seperti judi online ini," tandasnya.

Beberapa bulan setelah pernyataan darurat judi online itu, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres bernomor 21 tahun 2024 itu bertanggal 14 Juni 2024. Dalam keppres dicantumkan satgas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan, satgas diperlukan supaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas judi daring lebih holistik, mencakup semua unsur. Sebelumnya, kementerian/lembaga bertindak sendiri-sendiri.

Kemenkominfo bisa memblokir akun-akun judi daring, tetapi akun-akun lain bermunculan dengan mudahnya. OJK bisa memblokir, tetapi tak bisa membuka atau membekukan rekening. Hal ini hanya bisa dilakukan aparat penegak hukum. Karena itu, menurut Budi Arie, satgas diharapkan bisa memberantas secara komprehensif.

Muncul kesan pembentukan satgas ini terkesan lambat terlebih jika dibandingkan

dengan pernyataan darurat judi online pada September 2023. Sejak rapat 19 April, keppres baru terbit 14 Juni. Toh Budi Arie membantah bahwa proses ini lama.

"Enggak, enggak lama, cepat kok. Kamu saja yang bilang lama," elaknya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Budi Arie menambahkan, pemberantasan judi daring ataupun pinjaman daring ilegal akan dilakukan komprehensif. "Enggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Ketua OJK Mahendra Siregar mengemukakan sejak akhir 2023 hingga Maret 2024, lembaganya telah memblokir kurang lebih lima ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk

tidak melalui rekening bank. Ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi," jelasnya.

Nah, sementara tindakan pemberantasan judi online berlanjut, beberapa hari setelah penandatanganan Keppre, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menggelar rapat koordinasi. Salah satu keputusan rapat, Satgas akan segera melakukan tindakan-tindakan dan kegiatan berkaitan dengan pemberantasan judi daring.

"Kita telah menyepakati tiga tugas utama yang akan segera kita kerjakan," ujar Menko

MA Nomor 1 Tahun 2013," kata Menko Hadi.

Tugas kedua, Satgas akan menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Menko Hadi menjelaskan, modus saat ini adalah pelaku yang mendatangi kampung-kampung, mendekati masyarakat untuk membuka rekening secara online. "Setelah itu, rekening yang telah dibuat diserahkan ke pengepul rekening dan dijual ke Bandar," katanya.

Tugas ketiga, Satgas akan menindak gim online yang terafiliasi dengan judi online. "Nantinya akan kita screening melalui virtual account top up yang digunakan untuk judi online," kata Menko Polhukam.

Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa Satgas akan menurunkan Polri



transaksi judi online. "Memang kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo. Apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai lima ribu rekening," ungkap Mahendra.

Menurut dia, penyelesaian permasalahan tersebut tidak cukup dengan memblokir website dan rekening yang digunakan untuk judi online semata. Segala upaya dari berbagai pihak terkait harus dimaksimalkan agar judi online kelak bisa dihentikan.

"Bukan tidak efektif, justru kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas dari judi online. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya

Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada konferensi Pers Rakor Satgas Pemberantasan Judi Daring di kantor Kemendagri Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.

Tugas pertama, kata Menko Hadi, Satgas akan menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online sesuai hasil analisis PPATK. Hal ini diawali dengan pemblokiran sementara oleh PPATK selama 20 hari dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri akan mengumumkan rekening terblokir tersebut selama 30 hari. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan atau keberatan, maka aset tersebut dapat disita oleh negara.

"Hal ini tentunya kita lakukan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Baik hukum acara pidana maupun Peraturan

dan TNI untuk terus melakukan upaya pencegahan, utamanya melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman judi online.

"Kami akan kerahkan para Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Saya memastikan seluruh anggota Satgas berjalan di satu rel yang sama untuk mencapai tujuan kita bersama," kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Toh sebelum terbitnya Keppres Pemberantasan Judi Daring, polisi sudah bergerak memberantasnya. Mabes Polri menyatakan ada 318 kasus tindak pidana perjudian online yang diungkap selama periode 23 April, beberapa hari setelah rapat koordinasi, hingga 17 Juni 2024.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, dari total 318 kasus judi online di berbagai wilayah itu, sebanyak 464 orang ditetapkan sebagai tersangka. "Bareskrim Polri dan jajaran telah berhasil

mengungkap kasus perjudian online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024

Wahyu yang juga Wakil Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Satgas Judi Online mengatakan dari ratusan kasus tersebut, penyidik menyita barang bukti uang sebesar Rp67,5 miliar. Selain itu, polisi juga turut memblokir total 257 rekening bank dan 296 kartu ATM yang terkait aktivitas perjudian. Kemudian, ada barang bukti 494 unit HP dan 36 unit laptop yang digunakan untuk mengoperasikan perjudian.

“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Kapolri, pengungkapan judi online ini merupakan wujud komitmen Polri untuk melindungi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Pada periode yang sama, Wahyu mengatakan polisi juga telah mengajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap 15.081 situs ataupun konten terkait judi online yang ditemukan dari hasil patroli siber.

Wahyu pun mendorong masyarakat melaporkan aktivitas judi online yang ada di lingkungan sekitar. Ia memastikan polisi bakal menindak tegas dan memproses seluruh kasus terkait judi online secara tuntas dan tanpa terkecuali.

Salah satu yang mencolok adalah sindikat judi online di tiga situs internet. Polri menyebut perputaran uang di tiga situs judi daring itu mencapai Rp 1 triliun. “Estimasi perputaran uang pada ketiga website judi online tersebut sejumlah Rp 1.041.000.000.000,” kata Komjen Wahyu.

Polisi telah mengamankan 18 tersangka dalam kasus ini. Para tersangka diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, serta Pasal 303 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. “Ancaman hukuman pidana penjara paling lama adalah 20 tahun penjara,” jelasnya.

Kabareskrim Polri menjelaskan pula modus operandi yang dilakukan para pelaku terkait ketiga situs judi online ini hampir sama. Para pelaku, kata dia, melakukan kegiatan melawan hukum itu secara kolektif. Mereka disebut turut membuat sistem pembayaran judi online. “Tentu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada tiga web-

site judi online tersebut,” sambungnya.

Para tersangka juga menyamakan pembayaran judi online ini melalui pembayaran yang ada di luar negeri. Bahkan, lanjutnya, mereka juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer. “Jadi alat pembayaran yang dibuat di Indonesia dengan rekening bank yang ada di Indonesia serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasikan dari luar negeri. Ini dilakukan untuk menyamakan transaksi keuangan,” ujarnya.

Tiga situs yang kena gulung itu adalah 1XBET, W88, dan Liga Ciputra. Wahyu Widada merinci, dalam pengungkapan kasus judi online di situs 1XBET, ada sembilan tersangka yang ditangkap. Kemudian, pada situs W88, sebanyak tujuh tersangka ditangkap. Sedangkan terkait situs Liga Ciputra, sebanyak dua tersangka diamankan.



kan.

“Praktik perjudian online di website Liga Ciputra pada 11 Juni 2024 oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap dua orang tersangka,” ujar dia.

Dari para tersangka berhasil disita barang bukti berupa akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset sebesar Rp 13,5 miliar hingga uang tunai miliaran rupiah. “Uang tunai sendiri Rp 4,7 miliar, tiga unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah kartu ATM, sembilan unit laptop, lima unit token,” ucap Wahyu.

Sedangkan praktisi teknologi informasi dan komunikasi Pratama Persadha mengingatkan banyak agen dan bandar judi online bahkan menggunakan hacker atau peretas untuk membobol situs pemerintah dan menjadikannya landing page bagi masyarakat yang ingin melakukan permainan judi online.

Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC

(Communication & Information System Security Research Center) mengemukakan, dengan begitu pemblokiran situs yang memuat link judi online belum cukup memadai. “Tidak efektif, bukan itu caranya. Kalau misalkan mau serius, yang diblokir adalah link alamat IP permainan judi onlinenya, jadi bukan websitenya. Kita main judi online pakai aplikasi. Kita download aplikasi, yang kita log in kemudian kita main di situ, itu yang diblokir,” ungkap Pratama.

Dengan memblokir alamat IP, kata Pratama, artinya sama dengan pemerintah menghancurkan sebuah kasino sehingga orang tidak bisa lagi bermain di situ. Menurut dia, permasalahan judi online seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari saja. Yang terpenting adalah adanya kemauan politik dari pemerintah secara menyeluruh untuk memberantas judi online

sampai ke akar-akarnya.

“Pak Presiden sudah bagus, mau membentuk satgas. Tetapi, satgasnya benar enggak? Satgasnya kompeten tidak? Benar mau menegakkan hukum secara maksimal tidak? Ngeri enggak cara melakukan pemberantasan judi online?” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus benar-benar serius dalam mengatasi permasalahan ini. Alasannya saat ini judi online sudah menjadi penyakit masyarakat.

“Karena depositnya sangat kecil Rp10.000 sekarang bisa, sehingga yang jadi target itu driver ojol, tukang becak, pedagang di pasar, tukang parkir, yang sebenarnya mereka untuk hidup saja susah. Akhirnya ketika mulai terjerat judi online, kalah, kemudian dia mau main lagi supaya bisa menang tetapi tetap kalah, dan pasti akan kalah, akhirnya mereka melakukan pinjaman online. Akibatnya apa? Terjerat pinjaman sana, sini, anaknya mau sekolah tidak bisa, makan tidak bisa,” tandasnya. ♦



BANSOS UNTUK (KELUARGA) PEJUDI ONLINE

Bantuan sosial (bansos) untuk pejudi memang menambah masalah. Tapi, keluarga yang terdampak perjudian online masih bisa memperoleh bansos.

Persoalannya memang seperti lingkaran setan: Judi dapat membuat dan menambah miskin. Warga miskin toh tetap layak mendapat bansos. Namun, bansos tunai dapat dijadikan modal berjudi. Jadi?

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pun angkat bicara soal bansos untuk para pejudi online. Presiden Jokowi menegaskan tidak ada program keluarga pelaku bisa jadi penerima bansos.

"Nggak ada," kata Jokowi menjawab pertanyaan di sela-sela acara peninjauan program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.

Sedangkan Wapres Kiai Ma'ruf mengungkapkan, bantuan sosial (bansos)

hanya ditujukan masyarakat yang tergolong miskin. "Pokoknya orang miskin saja, kategorinya miskin, yang diverifikasi memang dia miskin, pantas mendapatkan bansos, dan itu terus di-update setiap tahun," ujarnya, Kamis, 20 Juni 2024.

Toh ketika ada penerima bansos yang justru menggunakan dana bantuan untuk judi online, Ma'ruf mengusulkan agar nama penerima tersebut dicabut dari daftar. "Itu dicabut saja, kalau penerima bansos, bansosnya digunakan untuk judi. Itu usul saya," kata Kiai Ma'ruf.

Ia berharap, jangan sampai ada masyarakat yang menggunakan bansos untuk berjudi. "Jadi bukan orang berjudi menerima bansos. Penerima bansos yang berjudi, dicabut," tegas dia.

Wacana keluarga pelaku judi online bisa jadi penerima bansos ini diungkap Menko PMK Muhadjir Effendy. Ia mengklarifikasi pemahaman masyarakat atas pernyataannya mengenai korban judi online jadi penerima bansos. Harap maklum, Muhadjir juga duduk sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring.

Muhadjir menegaskan, bukan pelaku judi online yang menerima bansos, melainkan keluarga pelaku yang menjadi korban. "Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku. Pelaku dalam hal ini adalah pemain dan yang menjadikan korban itu para bandar ya, kemudian ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa

nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa mendapatkan bantuan sosial itu mereka menganggap para pejudi itu yang nanti dapat bantuan. Jadi itu adalah terjadi misleading (penyesatan) itu, tidak begitu," kara Muhadjir Effendy seusai salat Idul Adha di gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2024.

Ia menyebut Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan pelaku judi online merupakan pelaku tindak pidana melanggar hukum. "Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya

Selanjutnya Muhadjir menegaskan mereka yang direncanakan akan mendapatkan bansos adalah keluarga pelaku yang dirugikan secara finansial hingga psikologis akibat judi tersebut. "Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korban-nya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para pejudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni," ujarnya.

Muhadjir

berpandangan, bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online. Sebab, keluarga yang menjadi korban, khususnya anak dan istri. Namun, Muhadjir menyebutkan, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online adalah salah satu materi yang diusulkan Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudi Online.

dian Online.

Muhadjir menyebut keluarga pelaku itu pun tidak serta-merta langsung mendapatkan bansos. Tapi, keluarga yang menjadi korban pejudi online juga harus melewati verifikasi sesuai kriteria penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Nah, bagaimana tanggapan Kemen-



Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku.

sos? Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Sosial (Kemensos) Don Rozano Sigit menegaskan, bantuan sosial (bansos) memang tidak diperuntukkan bagi pelaku judi online.

Namun, ia menjelaskan mekanisme penerimaan bansos ditujukan untuk rakyat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, keluarga pelaku judi online yang mengalami kesulitan ekonomi tetap bisa menerima bansos tersebut.

"Sebetulnya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Muhadjir (Menko PMK RI) dan Bu Mensos kan jelas, pelakunya diproses hukum. Terus, siapa pun yang miskin, bukan hanya karena judi online, dia berhak mendapat bansos," kata Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024

Don kemudian memaparkan verifikasi layak tidaknya seseorang menerima bansos adalah tugas dari pemerintah daerah. Setelah itu, hasil verifikasi tersebut akan diserahkan ke pusat untuk diproses lebih lanjut. "Daerah yang mengatakan ini pantas, ini tidak pantas, nanti dari daerah baru



kembali lagi ke kami. Jadi, mekanisme itu tetap dijalankan untuk siapa pun,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pemerintah siap membantu siapapun yang membutuhkan, asal sudah melalui proses yang sesuai. “Jangankan untuk judi online, untuk napter pun bisa. Kalau kita bisa, kita bantu kalau dia selesai menjalani hukuman. Masa kita tidak bisa bantu warga negara kita sendiri,” ujar Don Rozano.

“Tapi tadi, proses hukum jalan, proses verifikasi dan validasi jalan di daerah, dan tadi itu yang ditolak oleh daerah itu, tidak sampai 10 persen,” ungkapnya.

Namun, fakta lain menunjukkan, warga yang masih berstatus pelajar pun banyak

yang sudah terjerat judi online. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut ribuan pelajar terpapar judi online.

Berdasarkan data dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) yang diperoleh KPAI, ada sekitar 2.000 siswa tingkat SD, SMP, SMA dan MI, MTS, serta MA, yang terpapar judi dan game online yang berafiliasi dengan judi di Demak, Jawa Tengah.

“Para siswa yang ditengarai menjadi korban judi online tersebut memiliki kondisi kejiwaan yang labil, halu, prestasi dan kehadiran di sekolah menurun, serta adanya penyimpangan penggunaan uang saku,” kata Komisioner KPAI Sub Kluster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawi-

yan, Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Kawiyan, data yang diperoleh PGSI itu seharusnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya. Langkah lanjutannya bisa berupa kebijakan untuk pencegahan, penanganan, serta penegakan hukum bagi para pelaku judi online.

Selain itu, KPAI juga menyinggung data yang disampaikan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa jumlah korban judi online tidak sedikit. Mengutip data PPATK, Kawiyan mengungkapkan, perputaran uang di bisnis judi online senilai Rp 327 triliun sepanjang 2023. Ada 168 juta transaksi yang melibatkan 3,2 juta orang.

PPATK juga pernah merilis bahwa besaran transaksi tersebut nilainya Rp100.000 ke bawah, yang kebanyakan dilakukan oleh ibu rumah tangga dan anak-anak. “Jadi, angka 2.000 anak korban judi yang disampaikan PGSI Kabupaten Demak baru merupakan angka kecil dari secara keseluruhan (pelajar pelaku judi online),” ujar Kawiyan.

Jadi, Kawiyan berharap lembaganya dilibatkan di Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk Presiden Joko Widodo. “KPAI mengusulkan agar dalam Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibuat berdasarkan Kepres (Keputusan Presiden) itu melibatkan



kementerian dan lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan KPAl,” kata Kawiyan. Senin, 17 Juni 2024.

Dari kalangan ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh memandang bansos tak perlu dikait-kaitkan dengan judi online. Semestinya, menurut Asrorun Niam, terkait judi online, semua pihak harus kompak memberantasnya.

“Intinya, perlu ada komitmen bersama perang terhadap tindakan perjudian. Soal perjudian, tone-nya harus sama: pemberantasan tindak pidana perjudian,” ungkapnya

Sedangkan Bansos itu untuk kepentingan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi hak dasarnya. “Tidak usah dikait-kaitkan dengan perjudian,” tandasnya.

Asrorun pun menegaskan perlu ada kekompakan dari seluruh pihak untuk memberantas judi online. “Saya mengapresiasi atas komitmen pemberantasan tindak pidana perjudian, salah satunya dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, seluruh pihak harus punya komitmen yang sama, secara sinergis dan terkoordinir. Jangan sampai ada narasi yang justru kontraproduktif terhadap komitmen besar yang sudah dibangun Presiden,” ujarnya.

Oleh sebab itu, MUI mengingatkan bansos pada dasarnya untuk keluarga miskin yang berusaha dan bekerja. Bukan sebaliknya, untuk mereka yang melakukan perjudian.

“Kalau fiskal negara memadai, semua dapat insentif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika uang untuk bansos terbatas, ya harus ada skala prioritas. Prioritasnya adalah orang miskin yang mau bangkit berjuang dari kemiskinan, yang mau berusaha, yang gigih bekerja,



Sebetulnya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Muhadjir (Menko PMK RI) dan Bu Mensos kan jelas, pelakunya diproses hukum.

bukan yang pejudi, harus ada mekanisme punishment serta disinsentif,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengemukakan, pemerintah sebaiknya mendalami soal laporan

tentang kalangan masyarakat penerima bansos melakukan judi daring. “Banyak laporan dari lapangan bahwa pelaku judi online antara lain juga penerima bansos,” kata Hidayat dalam keterangan pers Kamis, 20 Juni 2024.

Hidayat mengatakan, jika bansos yang diberikan buat mengentaskan masyarakat miskin malah disalahgunakan maka tujuan pemberian itu melenceng dari rencana awal. “Jadi jangan sampai bansos malah memperpanjang lingkaran setan judi online, padahal mestinya lingkaran setan itu diputuskan,” ucap Hidayat.

Dia juga berharap pemerintah solid dalam mensukseskan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, Presiden Jokowi sudah menegaskan praktik judi daring harus diperangi karena sangat merusak masyarakat.

“Karena sudah sejak beberapa bulan yang lalu Menkominfo menyatakan Indonesia darurat judi online, apalagi jumlah dan nilai transaksinya terus meningkat setiap waktu hingga total sudah lebih dari Rp600 triliun,” papar Hidayat.

Jadi, Indonesia memang layak menyatakan darurat judi online dan menumbangkannya. Namun, penanganan warga terdampak pun memerlukan kehati-hatian jangan sampai justru menumbuhkan kembali judi online yang telah tumbang. ♦





PDN TUMBANG DULUAN

Seiring dengan pemberantasan perjudian online, Pusat Data Nasional (PDN) tumbang duluan. Masih memerlukan penelusuran dan penjelasan.

Toh seiring belum tentu menggambarkan sebab-akibat. Terlalu dini menyimpulkan pemberantasan judi online menyebabkan reaksi berupa serangan terhadap PDN.

Bisa saja seiring merupakan dua peristiwa berbeda dan tak berhubungan satu sama lain. Namun, bisa juga berhubungan. Misalnya, PDN dengan sengaja dinonaktifkan sementara terkait pemberantasan judi online.

Penonaktifan secara sementara bukan mustahil. Terlebih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa situs judi online menyusupi laman dan server milik pemerintah.

Hadi mengatakan bahwa peretas atau hacker menyusup melalui backdoor. "Bahwa ada sektor-sektor yang dimasuki backdoor, rata-rata (laman) milik pemerintah daerah," kata Hadi saat konferensi pers di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.

Hadi meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memonitor para peretas tersebut.

"BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus mendedukasi agar server-

server pemda aman dari backdoor oleh para hacker, karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut," ujar Hadi.

Hadi juga mengatakan, peretas menyusup ke laman pemerintah melalui beberapa

tahap. "Masuk ke website-website, server milik pemerintah dengan beberapa tahapan, melalui initial access, eksekusi, dan per sistem," kata Hadi.

Nah, untuk membersihkan ulah para



peretas itu, bisa saja sistem dinonaktifkan sementara. Namun, semuanya masih belum jelas.

Yang jelas, akibat tumbanganya PDN, ada layanan publik yang terganggu. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengakui, Pusat Data Nasional down bisa berdampak terhadap sejumlah layanan publik. "Saat ini kami melakukan pemulihan layanan secara bertahap," ujarnya Kamis, 20 Juni 2024.

Toh Budi belum memerinci layanan publik apa saja yang akan terkena dampak Pusat Data Nasional down. Meski begitu, salah satu layanan publik yang mengakui terdampak oleh tumbanganya PDN adalah instansi imigrasi.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengemukakan, instansinya berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem Pusat Data Nasional. "Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup Pusat Data Nasional di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin," kata Silmy dalam pernyataan resmi, Kamis, 20 Juni 2024.

Ia mengatakan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala akibat Pusat Data Nasional down.

Silmy memastikan bahwa masyarakat yang berada di bandara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Ia menyarankan penumpang pesawat untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor, tetap dilayani seperti biasa. Toh permohonan percepatan paspor sehari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.

"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Koinfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya," ungkap Silmy.

Secara keseluruhan, menurut laman web Kemenkominfo, hingga 2021 PDN mencakup layanan di 56 kementerian dan lembaga tingkat pusat. Selain itu, tercakup pula layanan di 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.

Nah, dalam pandangan pengamat siber Pratama Persadha, penyebab gangguan sistem PDN dapat berasal dari berbagai faktor. "Beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan total, seperti ini antara lain terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet. Serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, jika memang terjadi serangan siber dalam permasalahan tersebut, pola tersebut sama seperti halnya yang

akan memakan waktu selama itu.

Masalah suplai listrik, misalnya, bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lain atau genset untuk catuan sementara. Termasuk jika yang bermasalah adalah koneksi internet, seperti putusnya kabel fiber optik yang masuk kedalam PDN, masih bisa ditanggulangi dengan cepat menggunakan koneksi radio Point-to-Point, yang memiliki bandwidth besar. "Tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan instalasi," terang Pratama.

Begitu pula jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, seharusnya waktu



menimpa Bank Syariah Indonesia. "Jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah yang terjadi pada PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware," ujar Pratama.

Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka risiko yang mengancam semakin besar karena tidak hanya mengganggu layanan, tentu bisa mengakibatkan bocornya data pribadi. Seharusnya bila masalah yang dihadapi PDN merupakan masalah teknis, tentu tidak

penanggulangan yang dibutuhkan tidak akan selama itu karena bisa diselesaikan dengan memanfaatkan perangkat Anti-DDoS. "Serta bekerja sama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP," tuturnya

Toh semua kemungkinan itu masih memerlukan pembuktian dari penelusuran pada sistem PDN. Yang pasti, tumbanganya PDN merupakan bagian dari masalah keamanan dan kedaulatan cyber. Jadi, harus segera diatasi. ♦

CUKUPKAH AKAL MANUSIA UNTUK MENGETAHUI BAIK DAN BURUK?

Pertanyaan yang sering muncul di kalangan ulama adalah bagaimana cara mengetahui hukum Tuhan. Apakah akal manusia mampu mengetahuinya, atau hanya melalui wahyu? Pertanyaan ini sebenarnya merupakan persoalan epistemologi hukum dalam syariat Islam.

Dalam kajian baca kitab Ushul al-Fiqh: Dirasah Naqdiyyah fi Aliyat Iktisyaf al-Ahkam al-Syar'iyyah karya Syamsul Anwar, ada tiga teori utama yang berkembang di kalangan ulama ushul dalam masalah ini, yaitu teori rasionalisme (al-'aqlaniyyah), teori tradisionalisme (al-taqlidiyyah), dan teori rekonsialisme (al-taufiqiyyah).

Pertama, teori al-'aqlaniyyah dianut oleh kaum Mu'tazilah. Mereka berpegang pada salah satu dari lima prinsip dasar mereka, yaitu keadilan Tuhan. Menurut mereka, keadilan Tuhan mengharuskan manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan atau kekuatan. Dengan kata lain, manusia tidak lemah dan memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum Tuhan melalui akal, bahkan bila tanpa wahyu.

Kaum Mu'tazilah percaya bahwa setiap perbuatan memiliki sifat dan karakteristik intrinsik yang bisa dikenali melalui akal. Ini dikenal sebagai teori "tahsin" (penyempurnaan) dan "taqbiḥ" (penghinaan) akal. Mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah baik dan wajib dilakukan oleh mukallaf, dan ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, segala sesuatu yang merugikan adalah buruk dan harus dihindari, dan pelanggaran akan mendapat hukuman. Mereka bahkan berpendapat bahwa orang yang belum menerima wahyu tetap dibebani untuk melakukan kebaikan yang diketahui oleh akal, dan menjauhi keburukan.

Kedua, teori al-taqlidiyyah diajukan oleh kaum Asy'ariyah. Dasar teologis mereka adalah kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Menurut pandangan ini, manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak dapat mengetahui hukum Tuhan tanpa wahyu. Akal tidak bisa menentukan apa yang baik atau buruk karena tidak ada sifat intrinsik dalam perbuatan yang dapat menjadi standar penilaian.

Kalangan Asy'ariyah percaya bahwa sesuatu yang baik adalah apa yang ditentukan baik oleh Tuhan, dan yang buruk adalah apa yang ditentukan buruk oleh



oleh ARIEF ASSOFI,
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DI Yogyakarta

Tuhan. Oleh karena itu, hukum Tuhan hanya dapat diketahui melalui wahyu yang disampaikan oleh para Rasul. Bagi mereka yang belum menerima wahyu, atau tidak adanya dakwah Islam, maka



Mereka berpegang pada salah satu dari lima prinsip dasar mereka, yaitu keadilan Tuhan. Menurut mereka, keadilan Tuhan mengharuskan manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan atau kekuatan.

tidak ada beban hukum.

Ketiga, pendekatan al-taufiqiyyah yang berusaha menggabungkan kedua teori sebelumnya. Teori ini dianut oleh kaum

Maturidiyah. Mereka percaya bahwa akal bisa mengetahui apa yang baik dan buruk karena sifat intrinsik dalam perbuatan. Akal bisa memahami bahwa pelaku kebaikan layak dipuji dan pelaku keburukan layak dicela. Namun, akal tidak bisa menentukan bahwa Tuhan mewajibkan perbuatan baik dan memberikan pahala untuk itu, atau bahwa Tuhan melarang perbuatan buruk dan menghukumnya. Tidak ada kaitan langsung antara kemampuan akal untuk mengetahui dan kewajiban hukum serta pahala dan hukuman dari Tuhan.

Jadi, dalam pendekatan al-taufiqiyyah, ada pengakuan terhadap kemampuan akal dalam mengenali kebaikan dan keburukan, namun pengetahuan ini tidak cukup untuk menentukan hukum syariat tanpa bantuan wahyu. Wahyu diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang kewajiban agama dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.

Ketiga teori ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana hukum Tuhan dapat diketahui. Kaum Mu'tazilah mengandalkan akal, kaum Asy'ariyah bergantung sepenuhnya pada wahyu, dan kaum Maturidiyah mencoba menggabungkan keduanya.

Di sini Prof Syamsul Anwar tidak men-tarjih salah satu dari ketiga pandangan. ♦ muhamadiyah.or.id



IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781

0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIMCHOICE

QURBAN
IDUL ADHA
DI BERBAGAI
LEMBAGA

PERSAINGAN
PILKADA
KIAN
TERBUKA

MENCARI
CAWAGUB
UNTUK BOBBY

MUALAF
DOKTER
TIRTA

MUBA
TAMBAH
MENYALA

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

**PUTRA RIAU
PJ GUBERNUR
SUMSEL**